



2013

LAPORAN KEBERLANJUTAN

MENDUKUNG KEPEDULIAN TERHADAP
LINGKUNGAN DENGAN MEMBANGUN
SINERGI PERBANKAN DAN CSR YANG
BERKELANJUTAN

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

DAFTAR ISI

PROFIL LAPORAN	 01
Deskripsi Tema	02
Sambutan Komisaris Utama	03
Sambutan Direktur Utama	05
Uraian Singkat Laporan Keberlanjutan	07
Profil Bank Jatim	09
Risiko, Tantangan dan Strategi	12
KEBERLANJUTAN KINERJA EKONOMI	 15
Kinerja Ekonomi	17
Sejarah Singkat Bank	27
Peta Operasional Perusahaan dan Pangsa Pasar	28
Produk dan Layanan	31
Bersama Membangun Masyarakat	43
Interaksi dengan Komunitas Setempat	45
KEBERLANJUTAN KINERJA SOSIAL	 46
Aspek Kemasyarakatan	49
Aspek Kepatuhan dan Kebijakan Publik	56
Aspek Ketenagakerjaan	57
Aspek Penilaian Pemasok	70
Aspek Hak Asasi Manusia	71
Apresiasi untuk Nasabah	72



KEBERLANJUTAN KINERJA LINGKUNGAN	77
Konsumsi Energi	79
TATA KELOLA PERUSAHAAN	81
Visi dan Misi Bank	82
Motto dan Slogan	83
Budaya Perusahaan	84
Makna Logo	85
Tata Kelola Perusahaan	87
Kebijakan Remunerasi Bagi Pemimpin Divisi/Setingkat	112
Penerapan Manajemen Risiko	114
Sistem Pengendalian Internal	115
Pelibatan Pemangku Kepentingan	121
INDIKATOR TAMBAHAN SEKTOR JASA KEUANGAN	129
Mengelola Risiko Sosial dan Lingkungan	130
Penyaluran Kredit Produktif	131
PENUTUP	133
Penghargaan Tahun 2013	134
Informasi Penting	138
Umpan Balik Laporan Keberlanjutan	139
Referensi Silang Global	140

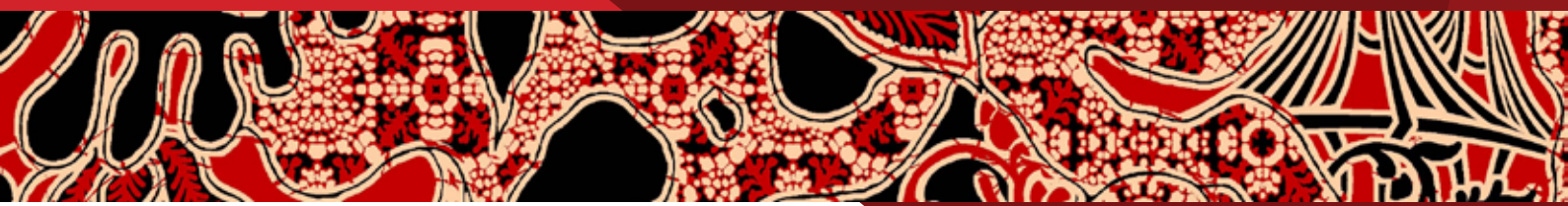






01

PROFIL
LAPORAN



**MENDUKUNG KEPEDULIAN
TERHADAP LINGKUNGAN
DENGAN MEMBANGUN
SINERGI PERBANKAN DAN
CSR YANG BERKELANJUTAN**

*Kegiatan perbankan dan
Corporate Social Responsibility
dilakukan sebagai bentuk
kepedulian bank terhadap
lingkungan agar dapat
memperbaiki kualitas tingkat
kehidupan sebagai bentuk
keberlanjutan*





Sambutan Komisaris Utama

(G4-1)

“Sinergi bisnis dan tanggung jawab sosial lingkungan dijalankan berdasarkan prinsip keberlanjutan yang tidak hanya mementingkan keuntungan, tetapi memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan”

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
dan Salam Sejahtera

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Di tengah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 6,55% (YoY) yang sangat membanggakan, karena lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,78% maupun provinsi lainnya, sektor perbankan memegang peranan penting di dalamnya. Tentu saja apa yang dihasilkan bank saat ini juga merupakan rentetan kerja keras di dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan di Jawa Timur sebagaimana visi dan misi bank yaitu “Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah.” Sedangkan dalam hal tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya, bank senantiasa berupaya memberikan manfaat membantu terwujudnya generasi masa depan bangsa yang lebih baik yaitu dengan pembangunan sarana pendidikan, beasiswa, edukasi, seni budaya. Sedangkan di bidang kesehatan

dengan memberikan bantuan medis, peningkatan gizi masyarakat, serta di bidang sosial antara lain menyentuh perbaikan lingkungan, pembinaan PKL (Pedagang Kaki Lima), RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan bantuan bencana pada daerah-daerah yang terkena musibah.

Dewan Komisaris memberi aspirasi dan mengharapkan manajemen untuk terus melanjutkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi tantangan baik pada aspek ekonomi yang terkait dengan bisnis perusahaan, aspek sosial dengan praktik ketenagakerjaan yang baik, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, peningkatan apresiasi terhadap nasabah serta berusaha mendukung terciptanya lingkungan dan masyarakat yang sehat. Tantangan dan peluang semakin menarik perhatian para pelaku ekonomi di masa mendatang, termasuk bank dalam menetapkan strategi dan menerapkan perilaku bisnis yang bersinergi dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Dewan Komisaris memiliki keyakinan bahwa dengan bekerja keras, profesional,



integritas tinggi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, maka bank dapat menghadapi tantangan tersebut serta menjadikan sebagai peluang untuk berinovasi.

Kami atas nama Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen dan pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam pencapaian kinerja selama tahun 2013, semoga Allah meridhoi upaya kita untuk meraih pertumbuhan yang berkesinambungan di tahun-tahun mendatang. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MULJANTO
Komisaris Utama





Sambutan Direktur Utama (G4-1)

“Keberlanjutan Kinerja Ekonomi, Sosial dan Lingkungan sebagai Upaya Menghadapi Tantangan”

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
dan Salam Sejahtera

Pemangku kepentingan yang terhormat

Tahun 2013 telah dilalui dengan pencapaian kinerja keberlanjutan yang membanggakan dan bank telah memberikan kontribusi untuk mendukung upaya *Millenium Development Goals* (MDGs) melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur sosial, sarana pendidikan dan kesehatan. Tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) bagi bangsa Indonesia adalah mengentaskan kemiskinan yang ekstrim dan kelaparan, memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, mempromosikan kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kualitas kesehatan ibu, memberantas HIV/AIDS, malaria dan beragam penyakit lainnya, menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Bagi bank, kinerja berkelanjutan memberikan dampak positif ke masyarakat melalui pendekatan program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Untuk itu bank berusaha meningkatkan kinerja keberlanjutan dalam 3 aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial yang tidak terpisahkan dan saling berhubungan.

Kinerja Ekonomi

Kinerja ekonomi memprioritaskan pada kemampuan bank untuk meningkatkan kondisi perekonomian para pemangku kepentingan. Perolehan nilai ekonomi dari nasabah selama tahun 2013 adalah Rp216 miliar sedangkan distribusinya pada masyarakat adalah Rp15,25 miliar.

Penyaluran kredit terbesar untuk pemberdayaan ekonomi rakyat kepada pengusaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain dalam bentuk pinjaman, bank juga memberikan penghargaan kepada 9 UMKM dengan memberikan peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan usaha mereka.

Di samping itu kontribusi bank terhadap pendapatan negara berupa pajak di tahun 2013 sebesar Rp329,20 miliar

Kinerja Sosial

Aspek sosial mencakup praktik ketenagakerjaan yang sehat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, apresiasi terhadap nasabah dan aspek kemasyarakatan. Selama tahun 2013 tidak ada pelaporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia maupun praktik yang



melanggar ketentuan ketenagakerjaan. Untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integritas tinggi, bank telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk pemberian pelatihan, manajemen karir maupun penghargaan terhadap karyawan. Biaya pelatihan yang telah dikeluarkan sebesar Rp18,74 miliar. Bank juga memberikan kesempatan yang sama tanpa memandang *gender*, suku, agama, ras dan golongan dalam melaksanakan rekrutmen. Penghargaan terhadap nasabah diwujudkan dalam pemberian layanan jasa perbankan dan mekanisme pengaduan nasabah. Pembangunan infrastruktur sosial merupakan salah satu wujud upaya bank untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat lokal di samping melaksanakan tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs). Bank berkontribusi sebesar Rp4,60 miliar yang direalisasikan untuk perbaikan 1.120 unit rumah tinggal yang tidak layak huni dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.



Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan menekankan pada upaya bank untuk menjaga dan melestarikan ekosistem dan sumber daya alam. Melalui beberapa kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diwujudkan selama tahun 2013 dengan ikut mensukseskan program Menuju *Open Defecation Free* (ODF) dan kegiatan perlindungan terhadap lingkungan. Pada tahun 2013, bank berkontribusi dalam kegiatan pemulihan dan perlindungan lingkungan sebesar Rp1,77 miliar dalam bentuk pemberian fasilitas pembuangan sampah, pembangunan jaringan air bersih dan penanaman pohon.

Atas nama Direksi, kami menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kepentingan atas dukungan dan peran sertanya dalam mencapai kinerja keberlanjutan selama tahun 2013 serta menjamin kebenaran materialitas yang diungkapkan dalam laporan ini. (G4-48)

Bank membuka kesempatan kepada para pemangku kepentingan dalam memberikan kritik dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja bank di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

HADI SUKRIANTO
Direktur Utama



Uraian Singkat Laporan Keberlanjutan

Selamat Datang di Laporan Keberlanjutan Bank Jatim Tahun 2013

Sebagai wujud keterbukaan pelaporan, bank menerbitkan laporan keberlanjutan ini disamping laporan tahunan. Laporan ini yang kedua sejak bank menerbitkan laporan keberlanjutan yang pertama pada tahun 2012. Bank berusaha menggambarkan upaya, kegiatan, kebijakan, program dan kinerja dalam pengelolaan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dalam periode waktu sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 (G4-28, G4-29, G4-30). Informasi dalam laporan ini disajikan berdasarkan prinsip materialitas, di mana informasi tersebut telah disesuaikan dengan analisa dampak operasional dan interaksi bank dengan para pemangku kepentingan. Aspek material yang diungkapkan dalam pelaporan ini meliputi aspek ekonomi, sosial, kepatuhan, ketenagakerjaan, tanggung jawab produk dan lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap bank dan pemangku kepentingan (G4-DMA).

Penyusunan laporan ini mengacu kepada indikator GRI G4 (G4-18, G4-23). Materi yang diungkapkan merupakan hal-hal yang dianggap relevan dengan bidang usaha bank dan yang tidak relevan diabaikan dalam laporan ini (G4-19, G4-20). Indikator kinerja GRI versi G4 yang diterapkan pada laporan ini disajikan dengan huruf warna biru di dalam kurung pada setiap halaman terkait, untuk memudahkan para pembaca menemukan indikator GRI tertentu.

Pada laporan ini, topik prioritas yang diangkat mengenai “*Mendukung Kepedulian terhadap Lingkungan dengan Membangun Sinergi Perbankan dan CSR yang Berkelanjutan*”. Dengan pemilihan dan penetapan topik tersebut, bank berkomitmen untuk terus mensinergikan kegiatan utama bank dan membangun kepedulian terhadap masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.



Terdapat beberapa ulang informasi mengenai program-program tanggung jawab sosial lingkungan yang telah ada pada tahun sebelumnya dan tetap dilaksanakan di tahun 2013 sebagai informasi bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai keberlanjutan tanggung jawab bank kepada masyarakat dan lingkungan (G4-22).

Sampai dengan tahun 2013, bank tidak memiliki daftar entitas anak (G4-17), juga tidak memiliki laporan keuangan konsolidasi serta tidak mengungkapkan laporan hal-hal yang dianggap relevan dengan kinerja entitas anak pada tahun 2013 (G4-21).

Bank belum memiliki laporan *assurance* eksternal untuk mendampingi laporan ini (G4-33).

Bank menyambut umpan balik dari seluruh pembaca dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelaporan di masa mendatang. Seluruh komentar, umpan balik dan saran dapat disampaikan melalui formulir umpan balik pada halaman belakang laporan ini atau langsung menghubungi: (G4-31)

• PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Tbk
Corporate Secretary
Tel: +62 31 5310090-99
Email : humas@bankjatim.co.id





Profil Bank Jatim

Sifat Kepemilikan dan Badan Hukum Bank (G4-7)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1976 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976 yang menyangkut status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas menjadi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C no. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 Tanggal 21 April 1997.

Secara operasional dan seiring dengan perkembangan, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu mengubah struktur permodalan/kepemilikan dengan diizinkan modal saham dari pihak ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.



Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8227.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008/1999.

Anggaran Dasar bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007. Perubahan pada Tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No. 56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B serta penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dengan Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Terakhir Anggaran Dasar telah mengalami perubahan dari Perseroan Tertutup menjadi Terbuka sesuai dengan Akta No. 89 Tanggal 25 April 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07 Mei 2013 Nomor 37 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29772/2013. Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memperkuat permodalan bank serta meningkatkan ekspansi kredit, jaringan kantor serta teknologi informasi, bank melaksanakan *Initial Public Offering/IPO*. Hal ini tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Jatim Nomor 19 tanggal 19 Maret 2012 dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H. yang antara lain telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar bank dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan sekaligus melakukan penyesuaian dengan peraturan Bapepam dan LK.

Pada Tanggal 18 Juni 2012, bank memperoleh Surat Nomor S-7555/BL/2012 perihal Pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau Pelaksanaan Penawaran Awal dari Bapepam dan LK, sehingga tanggal 19 Juni 2012 bank mengadakan *Public Expose dan Due Dilligence Meeting*. Setelah memenuhi seluruh persyaratan pernyataan pendaftaran, bank memperoleh Surat Nomor S-8143/BL/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, sehingga pada tanggal 12 Juli 2012 saham bank dicatatkan perdana di Bursa Efek Indonesia.

**KETERLIBATAN BANK (G4-16)**

NO.	NAMA ASOSIASI	KETERANGAN
1.	ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	Organisasi yang berperan sebagai wadah dalam mempersatukan dan mempererat hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia
2.	KDKE (Konsorsium Data Kerugian Eksternal)	KDKE merupakan sistem aplikasi berbasis WEB yang menjadi pusat data kerugian eksternal yang beranggotakan bank-bank terkemuka yang ada di Indonesia. Dengan adanya konsorsium ini memungkinkan perbankan untuk berbagi data kerugian risiko operasional dengan cara aman, anonim dan konsisten. Keanggotaan bank sebagai anggota KDKE sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No.X/12C/SP-DIR dan No.051/001/DALKO/2013 antara Bank Jatim dengan LPPi
3.	BMPD (Badan Musyawarah Perbankan Daerah)	Organisasi yang didirikan untuk mendekatkan, mempererat hubungan serta untuk saling tukar informasi antar perbankan dalam wilayah kerja perbankan
4.	HRD Club Perbanas	Suatu wadah komunikasi antar HRD/SDM khususnya di dunia perbankan
5.	ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia)	Organisasi yang berperan sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar anggota untuk memperjuangkan bank syariah baik internal maupun eksternal
6.	MES (Masyarakat Ekonomi Syariah)	Organisasi yang berperan sebagai wadah acuan dan teladan sebagai usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi dan etika usaha yang sesuai dengan syariah Islam di Indonesia
7.	FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan)	Wadah komunikasi dan konsultasi antar lembaga Direktur Kepatuhan dalam lingkungan perbankan Indonesia
8.	ACFE (<i>Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter East Java Region</i>)	Organisasi terbesar anti <i>fraud</i> di dunia dan penyedia utama pelatihan anti <i>fraud</i> dan pendidikan. ACFE mengurangi <i>business fraud worldwide</i> dan menginspirasi kepercayaan publik terhadap integritas dan objektivitas dalam profesi



Risiko, Tantangan dan Strategi (G4-2)

Salah satu misi bank yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan adalah “Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah”. Sesuai dengan misi tersebut, bank berupaya untuk memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja bisnis perusahaan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pada tahun 2013, bank menghadapi beberapa tantangan pada sektor ekonomi bisnis antara lain (G4-EC8):

1. Persaingan pasar yang semakin ketat dengan meningkatnya jumlah bank;
2. Fluktuasi nilai tukar Rupiah;
3. Suku bunga acuan dari Bank Indonesia yang memberikan tantangan bagi perusahaan dalam hal penentuan suku bunga dana maupun kredit;
4. Kenaikan harga barang dan jasa yang dipicu oleh kenaikan bahan bakar minyak, tarif dasar listrik menyebabkan banyak perusahaan yang profitabilitasnya menurun.

Pada sektor sosial antara lain (G4-EC8):

1. Inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat;
2. Kondisi keahlian dan keterampilan sumber daya manusia;
3. Adanya pemogokan kerja dan demonstrasi;
4. Naiknya harga bahan bakar minyak berdampak terhadap transportasi untuk kinerja perusahaan.

Pada sektor lingkungan antara lain (G4-EC8):

1. Kondisi geografis pada beberapa wilayah kantor bank yang berisiko terhadap bencana alam;
2. Terjadinya beberapa bencana alam pada tahun 2013, tetapi tidak berdampak signifikan bagi kelangsungan bisnis perusahaan;
3. Untuk meningkatkan fungsi intermediasi, terdapat beberapa wilayah kerja bank di pulau (Kangean dan Bawean) yang terkendala masalah transportasi;
4. Kondisi lingkungan yang beragam di wilayah kantor cabang bank mengharuskan adanya perbedaan strategi pemasaran produk *funding* dan *lending/financing*;
5. Cuaca dan iklim yang berpengaruh terhadap *performance* kredit di sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

Melalui identifikasi terhadap risiko-risiko dan tantangan, maka bank berupaya menerapkan strategi yang tepat untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Perluasan jaringan;
2. Terkait dengan *Funding*:
 - a. Fokus terhadap produk-produk berbasis dana murah (CASA);
 - b. Membentuk tim khusus peningkatan *funding* dikepalai oleh Penyelia Pemasaran yang bertanggung jawab kepada Pemimpin Bidang Operasional;
 - c. Melakukan optimalisasi produk *existing* melalui modifikasi dan *bundling*;



- d. Menambah fitur-fitur layanan, sebagai produk layanan seperti *autodebet*;
 - e. Promosi, sosialisasi dan edukasi guna lebih memperkenalkan produk-produk *funding* di masyarakat dengan cara:
 - Melalui media cetak maupun elektronik;
 - Gelar *event* bersama lembaga pendidikan dan institusi baik pemerintah maupun swasta;
 - f. Membuat program untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga baik dari sisi nominal maupun jumlah penyimpanan dana dengan menyediakan sarana infrastruktur yang mendukung;
 - g. Melakukan penghitungan yang tepat terhadap suku bunga dana.
3. Terkait dengan *Lending/Financing*:
- a. Meningkatkan kredit/pembiayaan khususnya kepada UMKM dan fokus terhadap peningkatan pendapatan bank dengan sasaran optimalisasi kerjasama dengan perusahaan atau lembaga yang memiliki binaan pengusaha kecil;
 - b. Meningkatkan pelayanan *lending/financing* dengan menambah *outlet* di kantor cabang dan cabang pembantu untuk meningkatkan *fee based income*;
 - c. Bank telah mempersiapkan pembukaan unit mikro *implant* di Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas dan *Payment Point* untuk meningkatkan kredit produktif;
 - d. Meningkatkan monitoring kredit secara *continue* untuk menjaga *performance* kredit;
 - e. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Dinas Teknis terkait dalam penyaluran kredit di sektor pertanian/peternakan/perikanan dan lainnya;
 - f. Meningkatkan pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat dan fokus pada
 - Membangun *Service Level Agreement* (SLA) untuk meningkatkan kecepatan proses pelayanan pengajuan Kredit Perumahan Rakyat;
 - Bekerja sama dengan asosiasi antara lain: REI, APERSI, Majelis Ekonomi, komunitas-komunitas profesional, koperasi pegawai serta ormas-ormas Islam;
 - g. Optimalisasi skema pembiayaan jangka panjang seperti proyek investasi dan jangka pendek seperti Pola Keppres dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
 - h. Melakukan supervisi dan pembinaan pada nasabah yang telah dibiayai dengan mekanisme kunjungan secara periodik sehingga berdampak pada:
 - Hubungan baik dengan nasabah;
 - Mengetahui perkembangan usaha yang telah dibiayai;
 - Menjaga NPL agar sesuai dengan target yang diharapkan;
 - i. Melakukan penghitungan yang tepat terhadap suku bunga kredit.
4. Terkait dengan *Service*
- a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan sesuai ketentuan;
 - b. Penguasaan terhadap produk, ketentuan *ALCO* dan penanganan pengaduan nasabah;
 - c. Kepedulian terhadap kebersihan *banking hall*, tempat ibadah, parkir dan toilet nasabah.
5. Pelaksanaan gugus kendali mutu pada setiap unit kerja untuk menambah informasi dan pengetahuan para staf minimal dua kali dalam seminggu.
6. Meminimalisir risiko kesalahan *input* dengan semangat “Zero Defect”.
7. Terkait dengan *Human Resource*:
- a. *Training* sesuai dengan kebutuhan bisnis untuk pejabat dan pegawai;
 - b. Melakukan evaluasi pemahaman terhadap produk;



- c. Membangun *teamwork* dan mengadakan bimbingan mental minimal sebulan sekali;
 - d. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan;
 - e. Menerapkan *Key Performance Indicator*.
8. Terkait dengan *Tools* dan IT:
Menyiapkan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan produk, pelayanan bank, *support* dan penyajian data produktivitas serta kontribusi bisnis cabang, yang meliputi:
- Memaksimalkan fungsi dan modul sistem Sigma;
 - Menyempurnakan manajemen informasi sistem bekerja sama dengan Divisi Teknologi Informasi untuk monitoring perkembangan bisnis.
9. Melaksanakan manajemen sumber daya manusia sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (G4-LA15).
 10. Untuk mengantisipasi adanya bencana alam maupun *force majeure*, bank telah menetapkan serangkaian prosedur baik itu sebagai langkah pencegahan, penanganan, maupun pemulihan terhadap gangguan yang terjadi sehingga bisnis perbankan serta pelayanan kepada nasabah tetap dapat dilaksanakan.
 11. Meningkatkan kesejahteraan pegawai untuk mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok.





02

KEBERLANJUTAN
KINERJA EKONOMI





Ekonomi

Dalam perspektif keberlanjutan, bank terus tumbuh dan berkembang untuk menjadi Bpd regional champion

Hal tersebut tercermin dari peningkatan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit

Pencapaian ini secara langsung maupun tidak langsung membawa manfaat yang besar Bagi para pemangku kepentingan

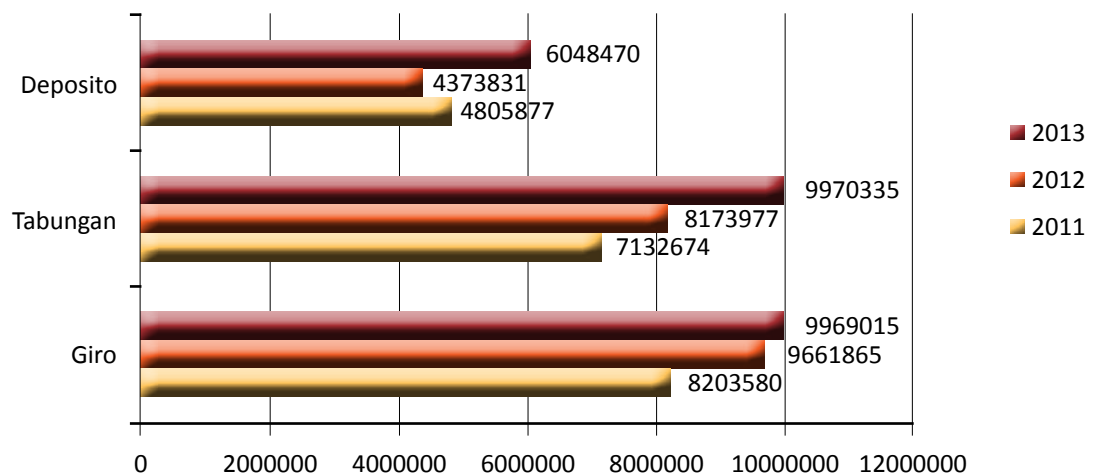


Kinerja Ekonomi

Secara umum bank berhasil mencapai kinerja bisnis yang lebih baik pada periode pelaporan. Hal tersebut terlihat dari peningkatan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit oleh bank. Berikut merupakan rinciannya (G4-44):

Dana pihak ketiga tahun 2011, 2012, 2013

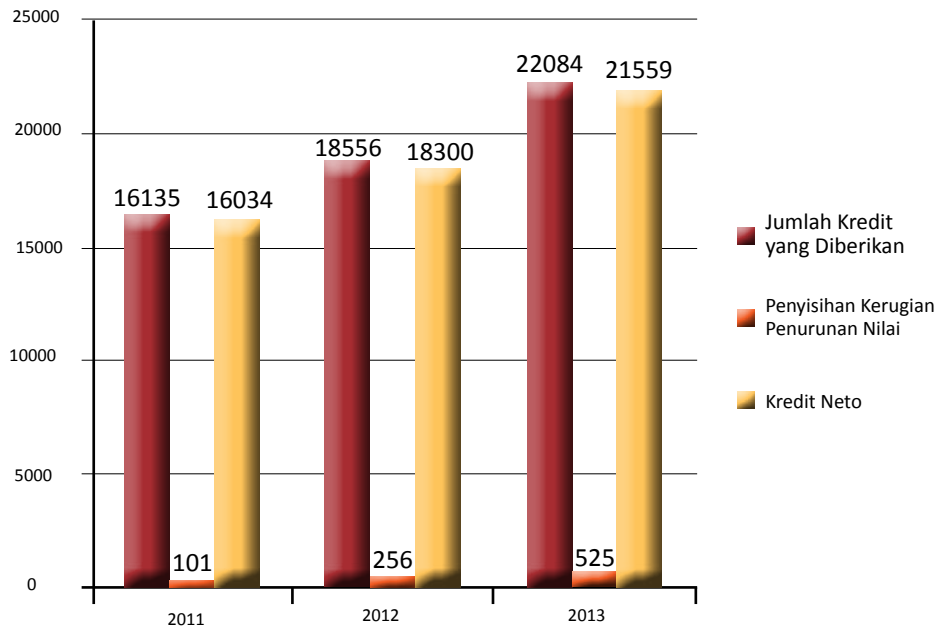
(dalam jutaan Rupiah)





Penyaluran kredit tahun 2011, 2012, 2013 (FS6).

(dalam miliar Rupiah)



NILAI EKONOMI YANG DIHASILKAN DAN DIDISTRIBUSIKAN

Bank terus tumbuh dan berkembang untuk mencapai cita-cita menjadi *BPD Regional Champion*. Pada tahun 2013, nilai ekonomi yang dihasilkan berasal dari kegiatan operasional maupun investasi bank dan tidak ada bantuan keuangan dari pemerintah (G4-EC4). Untuk nilai ekonomi yang didistribusikan, pengeluaran diperuntukkan untuk memenuhi semua kewajiban bank sebagai entitas, program tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kesejahteraan pegawai.

Nilai Ekonomi yang Diperoleh Bank Tahun 2013 (G4-EC1)

(dalam jutaan Rupiah)

NO	KOMPONEN	NILAI
1	Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan	3.790.178
a.	Pendapatan Bunga dan Syariah	3.385.537
b.	Pendapatan Operasional selain Bunga	361.218
c.	Pendapatan Non Operasional	43.423
2	Nilai Ekonomi yang Didistribusikan	3.573.874
a.	Biaya Operasional	1.141.281
b.	Biaya Tenaga Kerja	563.328
c.	Biaya Pendidikan dan Latihan	18.739
d.	Pembayaran kepada Pemangku Kepentingan	1.506.075
e.	Pengeluaran untuk Pajak (Beban Pajak Penghasilan Badan)	329.198
f.	Pengeluaran untuk Masyarakat (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)	15.253
3	Nilai Ekonomi yang Diperoleh (1-2)	216.304

**JUMLAH EKUITAS BANK TAHUN 2013 (G4-9)**

(dalam jutaan Rupiah)

Pos	2013	2012	Pertumbuhan(%)
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.729.421	3.729.421	0,00
Agio	509.368	509.368	0,00
Cadangan	655.562	523.678	25,18
Saldo Laba Tahun Lalu	-	-	-
Saldo Laba Tahun Berjalan	824.312	724.639	13,75
Jumlah Ekuitas	5.718.663	5.487.106	4,22

RENCANA BISNIS BANK TAHUN 2013 (G4-EC3)

Fokus utama bank pada tahun 2013 adalah meningkatkan kinerja bank dengan memperhatikan kualitas pelayanan serta kepuasan nasabah melalui peningkatan target penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 15%, penyaluran kredit sebesar 20%, serta menjaga NPL selalu di bawah 2%, meningkatkan fungsi intermediasi sehingga LDR menjadi 84,22% dan rasio BOPO sebesar 65,74%.

(dalam miliar Rupiah)

Indikator	RBB 2013	Per 31 Desember 2013	% Pencapaian
Dana Pihak Ketiga	27.322	25.987	95.11
- Giro	11.404	9.969	87.42
- Tabungan	8.448	9.970	118.02
- Deposito	7.470	6.048	80.96
Kredit yang Diberikan	23.010	22.084	95.98
Total Aset	34.524	33.047	95.72
Laba Sebelum Pajak	1.256	1.154	91.88
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	15	15,25	101.67

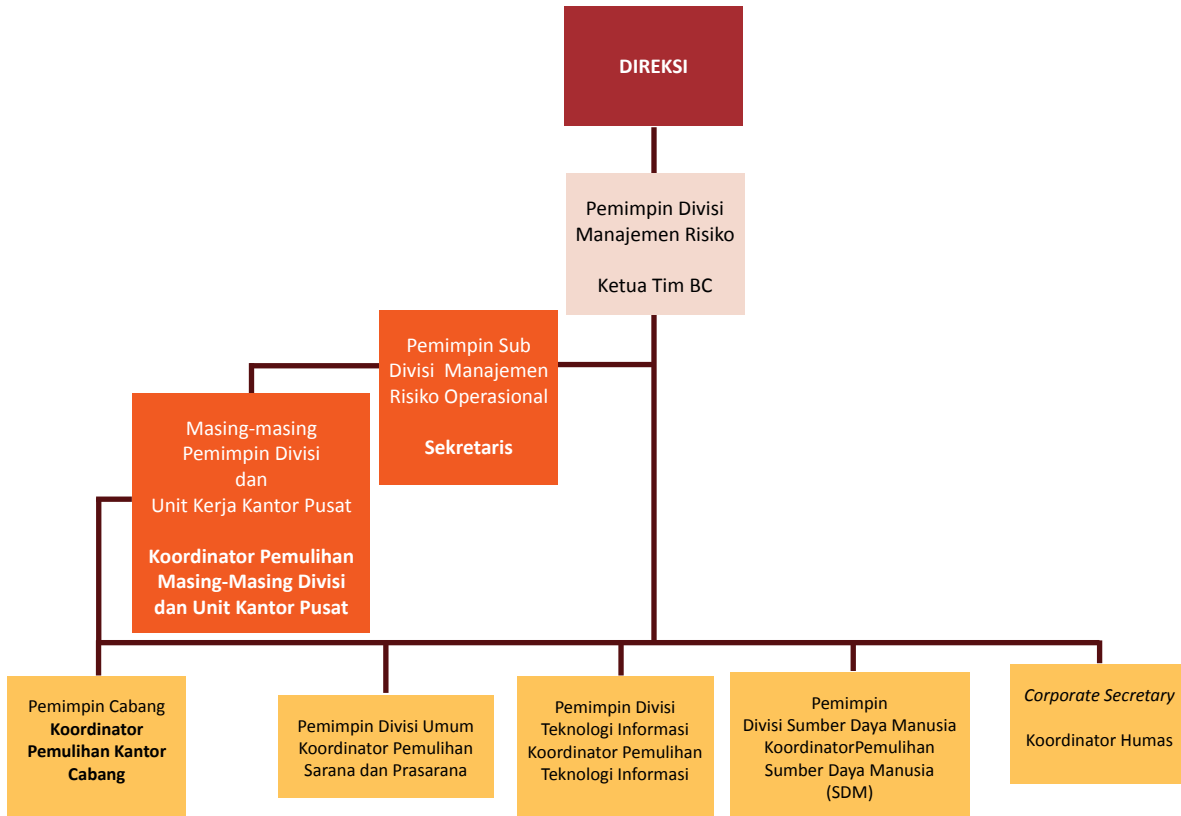
BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM) (G4-EC2)

Pembuatan *Business Continuity Management* adalah menyediakan sistem dan prosedur, serta kebijakan yang mendukung kemampuan cepat tanggap dari sumber daya yang ada terhadap adanya gangguan yang mengancam tidak berfungsinya sebagian atau seluruh operasional perusahaan. *Business Continuity Management* adalah proses manajemen secara keseluruhan yang mengidentifikasi dampak potensial yang mengancam organisasi dan menyediakan kerangka kerja (*framework*) kemampuan cepat tanggap (*resillience*) dan respon yang efektif untuk menyelamatkan kepentingan seluruh pihak terkait (*stakeholder*), reputasi, merk dan aktivitas yang menciptakan nilai.



Organisasi BCM

Susunan keanggotaan organisasi BCM sebagai berikut:



IDENTIFIKASI RISIKO KELANGSUNGAN BISNIS BANK (G4-2)

1. IDENTIFIKASI RISIKO BERSUMBER DARI BENCANA

Sumber Ancaman (G4-EN33)	Konsekuensi
Banjir air	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengakibatkan hilangnya utilitas (air, listrik, pendingin udara (<i>Air Conditioning/AC</i>), rusaknya struktur bangunan dan hilangnya staf/karyawan; b. Penggunaan peralatan dan data (fisik dan digital) yang terkena banjir dapat menyebabkan kesalahan pemrosesan; c. Hilangnya akses fisik ke kantor; d. Lumpuhnya aktivitas bisnis.
Banjir lumpur	<p>Meluasnya banjir lumpur di Sidoarjo atau munculnya semburan lumpur baru yang berada lebih dekat dengan kantor pusat atau cabang dan besarnya sebaran sangat luas.</p>
Angin puting beliung/badai	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat disertai dengan banjir yang luas, hilangnya utilitas, kerusakan struktur kantor, tumbang pohon-pohon besar; b. Penggunaan peralatan dan data (fisik dan <i>digital</i>) yang terkena banjir dapat menyebabkan kesalahan pemrosesan; c. Hilangnya akses fisik ke kantor; d. Lumpuhnya aktivitas bisnis.



<p>Gempa bumi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyebabkan rusaknya sebagian atau keseluruhan struktur bangunan kantor; b. Menyebabkan hilangnya utilitas publik (listrik, air, telekomunikasi) yang menyebabkan tidak adanya <i>supply</i> utilitas ke kantor; c. Rusaknya peralatan komputer dan perangkat keras pendukung.
<p>Letusan gunung berapi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menyebabkan rusaknya sebagian atau keseluruhan struktur bangunan kantor; b. Dapat menyebabkan hilangnya utilitas publik (listrik, air, telekomunikasi) yang menyebabkan tidak adanya <i>supply</i> utilitas ke kantor; c. Rusaknya peralatan komputer dan perangkat keras pendukung.
<p>Kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyebab faktor internal/staf perusahaan (kesalahan prosedur, kegagalan peralatan, ataupun sabotase) ataupun dari lingkungan sekitar atau sebagai akibat dari bencana alam; b. Rusaknya atau tidak dapat dipergunakannya fasilitas kantor untuk beberapa lama; c. Pemrosesan data/dokumen tidak dapat dilakukan untuk beberapa lama; d. Hilangnya aset dan catatan penting; e. Terganggunya bisnis perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial dan hukum; f. Hilangnya komunikasi suara/data; g. Hilangnya atau cederanya karyawan/staf penting.

Pada tahun 2013, beberapa Kantor Cabang bank di Pasuruan, Bojonegoro, Lumajang dan Situbondo mengalami banjir dan Capem Caruban terbakar.

Gunung Kelud meletus pada tahun 2014 sebelum laporan terbit.

2. IDENTIFIKASI RISIKO KEGAGALAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN SISTEM

Sumber Ancaman	Konsekuensi
<p>Kegagalan fungsi sistem sirkulasi udara (AC, Exhaust Fan, Ventilasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Temperatur dan kelembaban yang diperlukan untuk operasional dan efisiensi dari staf dan peralatan tidak terpenuhi; b. Peralatan dapat rusak jika temperatur dan kelembaban melebihi dari yang ditentukan; c. Tidak efektifnya <i>filter</i> dalam penanganan udara dapat menyebabkan asap dan partikel debu yang dapat merusak peralatan dan media magnetik;
<p>Kegagalan daya listrik</p>	<p>Kehilangan daya listrik dapat mengakibatkan kemampuan perusahaan untuk memproses pekerjaan terhambat serta memungkinkan kerusakan peralatan dan fasilitas yang ada. Tidak adanya daya listrik dari pihak PT PLN bisa diakibatkan terganggunya pasokan bahan bakar di PT PLN atau karena bencana dan fluktuasi tegangan listrik dapat diakibatkan oleh cuaca yang buruk/petir.</p>



Kegagalan akses ke data center

Sebagian atau keseluruhan kerusakan/kegagalan komunikasi data dapat diakibatkan rusaknya peralatan akibat bencana, cuaca buruk, kejadian mendadak ataupun sabotase.

Kegagalan komunikasi

Tidak berfungsinya sentral telepon (PABX) atau gagalnya sistem telekomunikasi dari pihak penyedia jasa komunikasi dapat menyebabkan lumpuhnya saluran komunikasi dari dan ke data center dan call center. Dapat diakibatkan karena adanya bencana alam atau sabotase.

Kegagalan fungsi utilitas air

- a. Hilangnya/tidak tersedianya suplai air dari PDAM daerah setempat atau terjadinya polusi terhadap suplai air dapat diakibatkan oleh adanya bencana alam;
- b. Hilangnya suplai air dapat meningkatkan lemahnya penanganan kebakaran;
- c. Hilangnya atau polusi terhadap suplai air dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas karyawan.

Kegagalan pemrosesan data

- a. Hilangnya/rusaknya peralatan komputer, sebagian atau seluruhnya, dapat diakibatkan karena ketiadaan daya listrik, kegagalan sistem sirkulasi udara;
- b. Kegagalan peralatan komputer;
- c. Hilangnya atau rusaknya data *digital*;
- d. Terputusnya atau kegagalan komunikasi baik internal ataupun dengan pihak eksternal (*host to host*);
- e. Ketiadaan atau hilangnya rancangan, perangkat lunak dan dokumentasi prosedur;
- f. Ketiadaan personal kunci;
- g. Dapat diakibatkan juga karena sabotase, *hacker*, lemahnya sistem keamanan komputer.

Sistem ESTIM pernah mengalami *black out* 2 kali pada bulan September dan November.

3. IDENTIFIKASI RISIKO BERSUMBER DARI KEGAGALAN LAINNYA

Sumber Ancaman	Konsekuensi
Bahan berbahaya/beracun atau sampah	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya bahan berbahaya dapat mengakibatkan hancurnya seluruh fasilitas/gedung kantor pusat; b. Penimbunan dan penyimpanan sampah di area intern kantor dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan staf/karyawan;
Terorisme/bom/konsentrasi massa yang besar	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya ancaman bom, terorisme, atau konsentrasi massa yang besar dapat mengakibatkan terganggunya/terhambatnya proses operasional perusahaan; b. Dapat mengakibatkan timbulnya <i>chaos/fraud</i> keseluruhan staf dan non staf yang ada di dalam gedung.
Pandemik (flu burung, demam berdarah, cikungunya)	Adanya wabah pandemik yang menular, dapat mengakibatkan hilangnya staf yang mengakibatkan terganggunya operasional kantor.

**Transportasi**

- a. Sebagian atau keseluruhan transportasi lumpuh, dikarenakan adanya pemogokan massal, bencana alam, kurangnya bahan bakar minyak, cuaca yang sangat buruk;
- b. Menyebabkan ketidakhadiran/ketiadaan karyawan/staf, terhambatnya suplai utilitas, surat dan pekerjaan karyawan.

Lingkungan fisik

Bangunan kantor dekat dengan bandara besar internasional.

Lain-Lain

Adanya persaingan bisnis yang tidak sehat antar bank yang menyebabkan tingginya risiko bisnis perusahaan.

MITIGASI RISIKO (G4-2)

Untuk mengurangi terjadinya risiko-risiko yang disebabkan karena kelalaian manusia, pihak Kantor Pusat/Cabang harus melakukan pengawasan atau pengendalian terhadap risiko-risiko operasional yang mungkin terjadi karena manusia, dengan menerapkan kendali pengamanan sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan, dan melaporkannya secara berkala kepada Pimsubdiv Sarana dan Prasarana di Kantor Pusat yaitu:

- a. Penerapan program pemeliharaan pencegahan (*preventive maintenance*) untuk infrastruktur perusahaan;
- b. Penerapan sistem pengendalian akses fisik ke ruang-ruang kritis perusahaan;
- c. Melakukan cek dan pembaharuan, jika diperlukan, sistem alarm kebakaran;
- d. Melakukan pemasangan kamera pengamanan (*Closed Circuit Television/CCTV*) untuk memperbaiki pengamanan gedung;
- e. Mengidentifikasi peralatan kritis dan barang-barang yang diperlukan dalam keadaan darurat dan disimpan di tempat yang mudah dijangkau.

STRATEGI KELANGSUNGAN BISNIS

Fase pemulihan dapat dibagi ke dalam jangka pendek dan jangka panjang.

- a. Jangka pendek
Prioritas utama dari fase pemulihan (mengembalikan fungsi dan mengoperasionalkan bisnis secara keseluruhan).
- b. Jangka panjang
Merupakan kelanjutan dari fase pemulihan, hal ini memerlukan waktu

yang cukup panjang, mungkin dalam hitungan bulan atau bahkan tahun untuk mengembalikan area dan operasional bisnis ke posisi semula.

Strategi pemulihan dibuat untuk memenuhi objektif pemulihan bisnis di dalam konteks operasional bisnis meliputi:

- Strategi pemindahan sementara area kerja;
- Kebutuhan pemrosesan;
- Penggantian peralatan;
- Pengadaan barang dalam keadaan darurat.

Strategi Pemulihan Teknologi Informasi

Alternatif-alternatif pemulihan Teknologi Informasi sesuai dengan identifikasi yang telah dilakukan oleh:

a. Core Banking

Untuk *Core Banking* karena keseluruhan sistem (perangkat keras dan lunak) berada di luar gedung, maka alternatif pemulihan yang diperlukan adalah:

1. Membangun/memperbaiki jaringan (pemulihan) *WAN* dari Kantor Pusat/Cabang ke *Data Center* di Serpong-Tangerang;
2. Menyediakan alternatif koneksi jaringan dari Kantor Pusat/Kantor Cabang ke *Data Center* di Serpong-Tangerang;
3. Pemulihan jaringan *LAN* untuk konektivitas lokal.

b. Non Core Banking dan Manajemen Dokumen Digital

Non Core Banking dan manajemen dokumen *digital* memiliki beberapa alternatif strategi antara lain:



STRATEGI PEMULIHAN KATEGORI LOKASI

Alternatif Pemulihan	Keterangan
On-Site	Dipilih jika situs produksi dapat diakses dan pemulihan sistem pasca bencana dapat dilakukan di sana umumnya lebih sederhana, lebih murah dan lebih kecil risikonya dibanding pemulihan <i>off-site</i>
Off-Site	Dipilih jika status produksi tidak dapat diakses dan pemulihan sistem pasca bencana tidak dapat dilakukan di situs produksi. Situs <i>off site</i> harus berada di luar <i>threat radius</i> dari skenario bencana

TABEL ALTERNATIF STRATEGI PEMULIHAN KATEGORI : KESIAPAN OPERASI

Alternatif Pemulihan	Keterangan
Cold Site	Situs berupa fasilitas TI yang belum diisi dengan peralatan komputer dan jaringan. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk pengadaan, <i>set up</i> dan instalasi peralatan
Warm Site	Fasilitas TI dengan sejumlah <i>hardware</i> , <i>software</i> serta <i>network</i> dan peralatan komunikasi terpasang. Pengaktifan situs memerlukan instalasi dan konfigurasi sistem aplikasi serta restorasi data aplikasi. Situs ini siap dalam waktu beberapa hari.
Hot Site	Situs yang dilengkapi dengan sistem komputer yang sudah diinstal dengan sistem operasi dan sistem aplikasi yang selalu <i>update</i> mengikuti konfigurasi sistem di <i>primary site</i> . Pengaktifan situs memerlukan restorasi data. Situs ini umumnya siap beroperasi dalam waktu beberapa jam.
Miccored Site	Situs alternatif dengan konfigurasi sistem yang identik dengan <i>primary site</i> dan data dalam keadaan sinkron dengan <i>primary site</i> . <i>Failover</i> dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit.

Strategi Pemulihan untuk 5 klasifikasi dampak bencana, untuk *non core banking* dan dokumen dalam bentuk *softcopy*:

Tipe	Klasifikasi Dampak Bencana	Strategi Pemulihan
A	Bencana menyebabkan hancurnya/tidak berfungsinya sebagian infrastruktur kritis perusahaan, namun ketersediaan sumber daya manusia masih mencukupi dan dapat akses ke dalam gedung perusahaan	<i>On site recovery</i>
B	Bencana menyebabkan hancurnya/tidak berfungsinya sebagian infrastruktur kritis perusahaan, namun ketersediaan sumber daya manusia yang masih mencukupi tidak dapat akses ke dalam gedung perusahaan	<i>Off site recovery</i>
C	Bencana menyebabkan tidak beroperasinya bisnis diakibatkan ketiadaan/ketidakcukupan sumber daya manusia, infrastruktur kritis perusahaan masih berfungsi	<i>On site recovery</i> dengan menggunakan <i>backup</i> , yang dilakukan oleh anggota organisasi BCM
D	Bencana menyebabkan hancurnya/tidak berfungsinya semua infrastruktur perusahaan dan hilangnya sebagian atau seluruh sumber daya manusia eskalasi melingkup kantor pusat/kantor cabang setempat	<i>Off site recovery</i>
E	Bencana menyebabkan tidak berfungsinya semua infrastruktur perusahaan dan hilangnya seluruh sumber daya manusia, eskalasi melingkupi seluruh kabupaten/kota	<i>Off site recovery</i>



Strategi Pemulihan Sistem Komunikasi dan WAN/Internet

Pemulihan jaringan komunikasi

- Jika jaringan komunikasi rusak, namun *primary site* masih dapat digunakan untuk operasi, menggunakan strategi perjanjian kontrak dengan *vendor* untuk menyediakan *mobile back up telecommunication system* dengan jumlah *lines* tertentu untuk keperluan pemulihan;
- Tetap menggunakan nomor telepon lama sebagai nomor kontak Pemulihan jaringan WAN;
- Pemulihan melalui (*pre-established*) *backup WAN connection* jika mungkin
- Mengeksekusi kontrak perjanjian dengan penyedia komunikasi untuk pemasangan jaringan WAN sementara (*temporary WAN*) di lokasi pemulihan *on-site*;
- Jika strategi-strategi tersebut tidak berjalan, tim pemulihan teknologi informasi akan melakukan pemulihan di *off-site*.

Strategi Pemulihan Fasilitas/Infrastruktur Kritis Non-TI

Tipe	Klasifikasi Dampak Bencana	Strategi Pemulihan
A	Bencana menyebabkan hancurnya/tidak berfungsinya sebagian infratraktur kritis perusahaan, namun ketersediaan sumber daya manusia masih mencukupi dan dapat akses ke dalam gedung perusahaan.	Jika masih dapat diperbaiki, mengadakan perjanjian/kontrak dengan penyedia jasa, jika tidak memungkinkan maka dilakukan pengadaan darurat.
B	Bencana menyebabkan hancurnya/tidak berfungsinya sebagian infrastruktur kritis perusahaan, namun ketersediaan sumber daya manusia yang masih mencukupi tidak dapat akses ke dalam gedung perusahaan.	Jika masih dapat diperbaiki, mengadakan perjanjian/kontrak dengan penyedia jasa, jika tidak memungkinkan maka dilakukan pengadaan darurat.
C	Bencana menyebabkan tidak beroperasinya bisnis diakibatkan ketiadaan/ketidakcukupan sumber daya manusia, infratraktur kritis perusahaan masih berfungsi.	Tidak diperlukan pemulihan infratraktur.
D	Bencana menyebabkan hancurnya/tidak berfungsinya semua infratraktur perusahaan dan hilangnya sebagian atau seluruh sumber daya manusia eskalasi melingkup kantor pusat/kantor cabang setempat.	Pembangunan infratraktur yang baru.
E	Bencana menyebabkan tidak berfungsinya semua infratraktur perusahaan dan hilangnya seluruh sumber daya manusia, eskalasi melingkupi seluruh kabupaten/kota.	Pembangunan infratraktur yang baru.

Strategi Pemulihan Dokumen Kritis

Tipe	Klasifikasi Dampak Bencana	Strategi Pemulihan
A	Bencana menyebabkan hancurnya/tidak berfungsinya sebagian infratraktur kritis perusahaan, namun ketersediaan sumber daya manusia masih mencukupi dan dapat akses ke dalam gedung perusahaan.	Penelusuran terhadap kehilangan dokumen diperbandingkan dengan dokumen yang berada di luar gedung atau melakukan kontrak dengan pemasok.



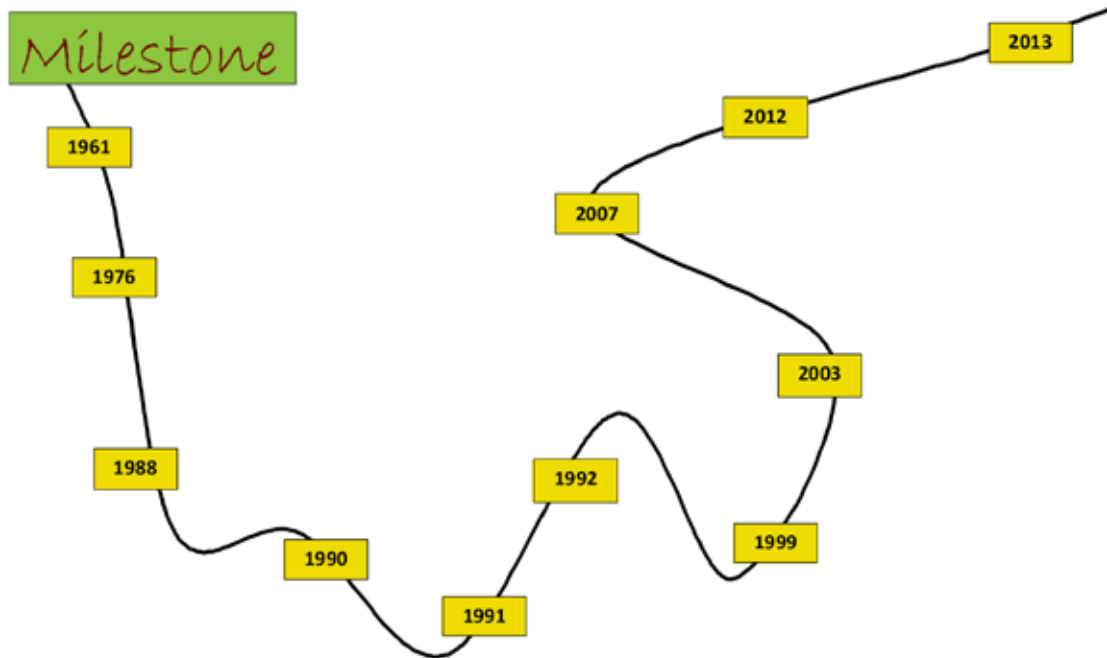
B	Bencana menyebabkan hancurnya/tidak berfungsinya sebagian infrastruktur kritis perusahaan, namun ketersediaan sumber daya manusia yang masih mencukupi tidak dapat akses ke dalam gedung perusahaan.	Penelusuran terhadap kehilangan dokumen diperbandingkan dengan dokumen yang berada di luar gedung atau melakukan kontrak dengan pemasok.
C	Bencana menyebabkan tidak beroperasinya bisnis diakibatkan ketiadaan/ketidakcukupan sumber daya manusia, infrastruktur kritis perusahaan masih berfungsi.	Tidak diperlukan pemulihan infrastruktur.
D	Bencana menyebabkan hancurnya/tidak berfungsinya semua infratraktur perusahaan dan hilangnya sebagian atau seluruh sumber daya manusia eskalasi melingkup Kantor Pusat/Kantor Cabang setempat.	Pencetakan ulang jika memungkinkan adanya data tersimpan di komputer <i>back up off-site</i> , dan melakukan pembicaraan dengan <i>stakeholder</i> terkait.
E	Bencana menyebabkan tidak berfungsinya semua infratraktur perusahaan dan hilangnya seluruh sumber daya manusia, eskalasi melingkupi seluruh kabupaten/kota.	Pencetakan ulang jika memungkinkan adanya data tersimpan di komputer <i>back up off-site</i> , dan melakukan pembicaraan dengan <i>stakeholder</i> terkait.

Strategi Pemulihan Operasional Divisi/Unit/Organisasi

Tipe	Klasifikasi Dampak Bencana	Strategi Pemulihan
A	Bencana menyebabkan hancurnya/tidak berfungsinya sebagian infratraktur kritis perusahaan, namun ketersediaan sumber daya manusia masih mencukupi dan dapat akses ke dalam gedung perusahaan.	Memulihkan dan memindahkan pusat operasi ke bagian lain di dalam atau sekitar gedung.
B	Bencana menyebabkan hancurnya/tidak berfungsinya sebagian infrastruktur kritis perusahaan, namun ketersediaan sumber daya manusia yang masih mencukupi tidak dapat akses ke dalam gedung perusahaan.	Memindahkan pusat operasi ke tempat yang lebih aman.
C	Bencana menyebabkan tidak beroperasinya bisnis diakibatkan ketiadaan/ketidakcukupan sumber daya manusia, infrastruktur kritis perusahaan masih berfungsi.	Rotasi/mutasi antar Kantor Pusat/Kantor Cabang atau melakukan pelatihan terhadap karyawan lama
D	Bencana menyebabkan hancurnya/tidak berfungsinya semua infratraktur perusahaan dan hilangnya sebagian atau seluruh sumber daya manusia eskalasi melingkup Kantor Pusat/Kantor Cabang setempat.	Memindahkan untuk sementara pusat operasi ke tempat yang aman.
E	Bencana menyebabkan tidak berfungsinya semua infratraktur perusahaan dan hilangnya seluruh sumber daya manusia, eskalasi melingkupi seluruh kabupaten/kota.	Memindahkan untuk sementara pusat operasi ke kota/kabupaten terdekat.



Sejarah Singkat Bank



1961 : Tanggal 17 Agustus 1961, bank didirikan oleh Gubernur Jawa Timur, R. Soewondo Ranoewidjojo dan R. Harsono Gondowijoto selaku Direktur bank pertama.

1976 : Berubah status dari bentuk Perseroan Terbatas menjadi Badan Usaha Milik Daerah.

1988 : Melaksanakan obligasi pertama kalinya sebesar Rp25 miliar

1990 : Bank meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa.

1991 : Melaksanakan obligasi keduanya sebesar Rp50 miliar.

1992 : Mengubah struktur permodalan/ kepemilikan dengan diizinkan modal saham dari pihak ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

1999 : Perubahan status dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perseroan Terbatas.

2003 : Melaksanakan obligasi ketiga dengan nilai sebesar Rp400 miliar.

2007 : Mendirikan Unit Usaha Syariah bank.

2012 : 12 Juli 2012, bank mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan *ticker* "BJTM".

2013 :

- Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pertama kalinya sebagai perusahaan terbuka.
- Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan keputusan pergantian susunan Pengurus.

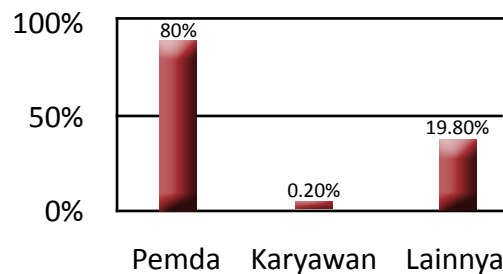


Peta Operasional Perusahaan dan Pangsa Pasar

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BANK (G4-7,G4-9)

Komposisi kepemilikan saham bank per 31 Desember 2013 sebagai berikut:

Persentase Kepemilikan Saham



Komposisi Pemegang Saham Per 31 Desember 2013

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan (%)
DALAM NEGERI			
Perorangan Indonesia	4,122	1,078,357,272	7.23
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	80.00
Karyawan	1,988	29,690,500	0.20
Koperasi	2	12,028,000	0.08
Yayasan	8	4,896,500	0.03
Dana Pensiun	32	68,953,500	0.46
Asuransi	7	132,442,500	0.89
Perseroan Terbatas	34	148,393,726	0.99
Reksadana	8	207,828,000	1.39
Sub Total	6,240	13,616,737,930	91.27
LUAR NEGERI			
Perorangan Asing	7	665,000	0.01
Badan Usaha Asing	63	1,300,282,002	8.72
Sub Total	70	1,300,947,002	8.73
TOTAL	6,310	14.917.684.932	100,00



Pemegang Saham Tercatat yang Memiliki Lebih dari 5% Saham per 31 Desember 2013

Nama	Jumlah Saham	Persentase
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7,676,913,648	51,46%

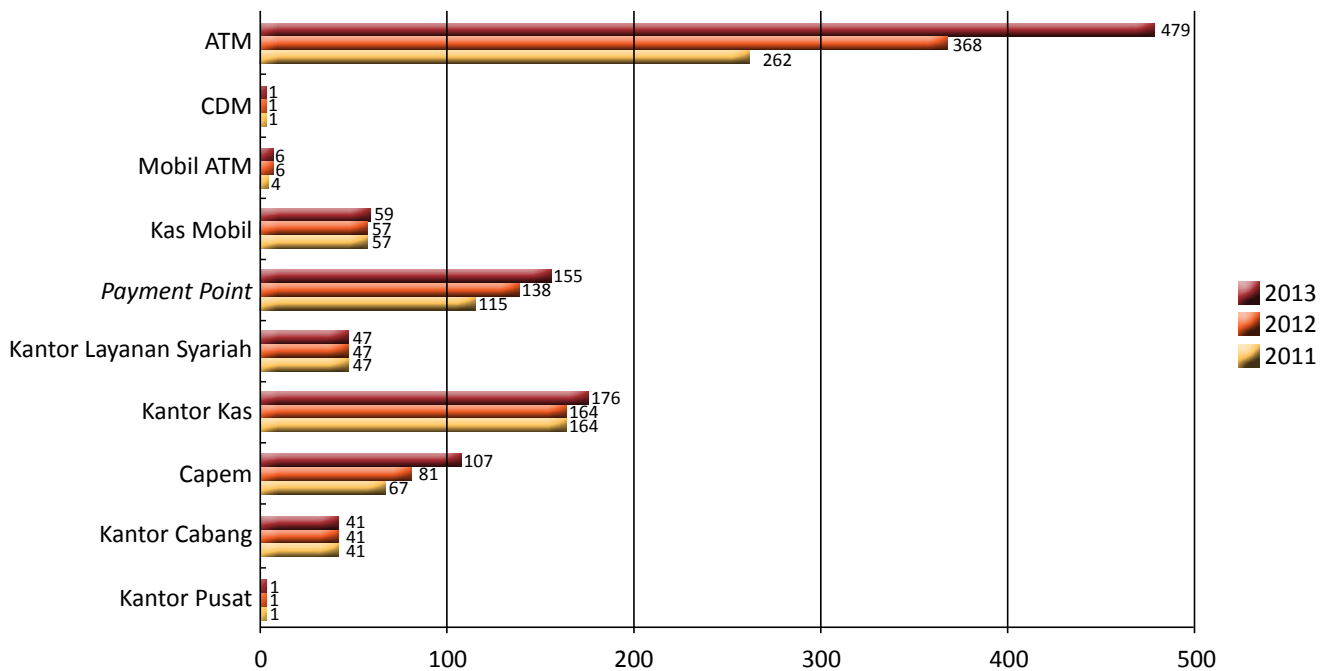
Pada tahun 2013, tidak terjadi perubahan kepemilikan saham bank dibandingkan kepemilikan saham pada tahun sebelumnya (G4-13).

PETA OPERASIONAL PERUSAHAAN DAN PANGSA PASAR (G4-8)



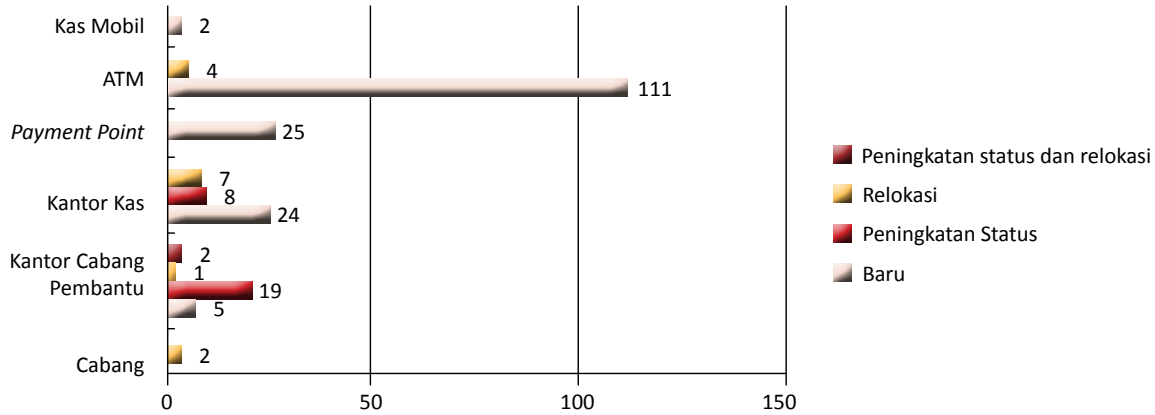
Melalui kehadiran bank di wilayah tersebut, dapat membantu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat sehingga menghasilkan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat (FS13).

Bank memiliki 1 kantor pusat yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad 98-104 Surabaya (G4-5). Pertumbuhan jaringan kantor bank selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:





Bank berkomitmen untuk memperluas layanan perbankan bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2013, bank melakukan ekspansi, relokasi dan peningkatan status untuk beberapa Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point*, ATM dan Kas Mobil sebagai berikut:



Pangsa Pasar Bank (G4-8)

Bank menyalurkan pinjaman untuk beberapa sektor perekonomian yang meliputi:

1. Rumah tangga
2. Perdagangan besar dan eceran
3. Konstruksi
4. Pertanian, perburuan dan kehutanan
5. Listrik, gas dan air
6. Jasa masyarakat dan sosial budaya
7. Industri pengolahan
8. *Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan
9. Jasa pendidikan
10. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
11. Transportasi, pergudangan dan komunikasi
12. Perantara keuangan
13. Akomodasi makanan dan minuman
14. Administrasi pemerintahan
15. Perikanan
16. Pertambangan dan penggalian
17. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
18. Lain-lain





Produk dan Layanan

Pengelolaan produk dana/jasa bank dilakukan oleh Divisi Dana/ Jasa & Luar Negeri serta Divisi Usaha Syariah. Untuk kredit dikelola oleh Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel, Divisi Kredit Menengah & Korporasi serta Divisi Usaha Syariah. Bank tidak melakukan usaha yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta tidak melakukan usaha yang berdampak signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pegawai (G4-PR1). Tidak ada kejadian yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan terkait dengan produk dan layanan bank (G4-PR2). Untuk layanan pengaduan nasabah dikelola oleh *Corporate Secretary* (G4-12).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bank memberikan produk dan layanan yang terdiri dari:

1. Dana meliputi tabungan, deposito berjangka dan giro;
2. Kredit baik yang bersifat produktif dan konsumtif;
3. Layanan jasa perbankan meliputi Anjungan Tunai Mandiri (ATM), e-SAMSAT Jatim, Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), Jatim *Electronic Transfer System* (JETS), BPD *Net Online*, layanan transaksi devisa, kiriman uang dan jasa perbankan lainnya.



PRODUK KONVENSIONAL (G4-4, G4-9)

DANA	PRODUK DANA	KETERANGAN
Tabungan	SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah)	Tabungan yang telah <i>on-line real time</i> di seluruh cabang bank, bunganya dihitung harian, memberi banyak kemudahan dan manfaat dengan biaya ringan, hadiah berupa uang tunai dan barang yang diundi 3 (tiga) kali dalam setahun.
	SIKLUS (Tradisi Keluarga Sejahtera)	Salah satu produk bank untuk menumbuhkembangkan tradisi menabung sebagai wujud awal menuju keluarga sejahtera dengan bunga yang kompetitif.
	Tabunganku	Simpanan perorangan dengan persyaratan mudah yang diterbitkan secara bersama oleh bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan.
	Tabungan Haji	Produk tabungan yang meringankan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menuju tanah suci Mekkah <i>Al Mukarromah</i> .
Deposito Berjangka	Deposito Berjangka Rupiah Deposito Berjangka Valas	Jenis simpanan yang mempunyai spesifikasi yang tidak dimiliki oleh produk simpanan lainnya, memberikan keuntungan suku bunga yang kompetitif dan jangka waktu yang sesuai dengan pilihan untuk perorangan maupun badan usaha, bagi pemilik deposito berjangka otomatis (<i>ARO</i>) tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu deposito apabila jatuh tempo.
Giro	Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan warkat, yang banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam setiap transaksi keuangan.



KREDIT	PRODUK KREDIT	KETERANGAN
Surat Dukungan Dana		Surat yang dikeluarkan oleh bank, yang menerangkan bahwa orang/perusahaan yang mengajukan adalah nasabah dan bank akan membantu untuk memberikan pinjaman apabila nasabah tersebut memenangkan <i>tender</i> .
Bank Garansi	Bank Garansi Penawaran (Jaminan <i>Tender</i>), Bank Garansi Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan), Bank Garansi Uang Muka (Jaminan Uang Muka), Bank Garansi Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan), Bank Garansi Pembayaran (Jaminan Pembayaran), Bank Garansi Sanggahan Banding, Bank Garansi untuk Penyalur/Agen/ <i>Dealer/Depot Holder</i> (swasta yang <i>bonafide</i>).	Warkat yang diterbitkan oleh bank yang berisi kewajiban bank untuk membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (<i>wanprestasi/default</i>).
Kredit Konstruksi Properti		Merupakan fasilitas kredit modal kerja yang disediakan oleh bank kepada nasabah (<i>pengembang/developer</i>) yang sedang atau akan mengerjakan proyek <i>properti</i> .
Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C)		Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
Kredit Modal Kerja Pola Keppres		Fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak kerja yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD/BUMN/BUMD dan/atau swasta <i>bonafide</i> .
Kredit Modal Kerja <i>Stand by Loan</i>		Fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor termasuk grup usahanya dengan <i>plafond</i> tertentu yang dapat dicairkan secara <i>revolving</i> per proyek/kontrak kerja (konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya), yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD/BUMN/BUMD dan/atau swasta <i>bonafide</i> .



<p>Kredit Investasi</p>		<p>Kredit yang diberikan kepada debitur untuk pembelian barang modal (mesin, pembangunan gedung, renovasi gedung, dan lain-lain) yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai dengan jangka waktu menengah/panjang.</p>
<p>Anjak Piutang</p>		<p>Kredit yang diberikan kepada pemilik piutang/tagihan yang pengembaliannya jelas dan dapat dipastikan dengan tujuan untuk membantu nasabah/calon nasabah yang membutuhkan modal kerja karena piutang/tagihannya masih belum waktunya untuk ditagihkan/dicairkan.</p>
<p>Kredit kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</p>		<p>Kredit yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p>
<p>Kredit Multiguna</p>		<p>Pemberian kredit di sektor konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya antara lain Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, pegawai dan Capeg BUMN/ BUMD, anggota dan pensiunan TNI/POLRI, anggota legislatif, pegawai swasta <i>bonafide</i>, yayasan, koperasi yang gajinya dibayarkan melalui bank maupun tidak melalui bank (telah ada MOU dengan bank).</p>



Kredit Pundi Kencana		Kredit modal kerja dan/atau investasi di sektor produktif yang diberikan untuk pembinaan usaha keluarga sejahtera mandiri yang cekatan berusaha dan menabung kepada pengusaha mikro dan kecil.
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Umum		Kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank untuk membiayai pemilikan rumah dari pengembang maupun dari non pengembang, pembangunan rumah tanah milik sendiri (KPR Swadaya) dan perbaikan/rehab rumah milik sendiri termasuk KPR/RS Mikro dan pemilikan rumah toko (Ruko).
Kredit <i>Linkage</i> Program BPR		Fasilitas kredit yang diberikan bank kepada pengusaha mikro dan kecil melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik yang sudah menjadi anggota APEX maupun belum menjadi anggota APEX.
Kredit Mikro Laguna (Langsung Berguna)		Kredit yang diberikan kepada usaha mikro guna pengembangan usahanya sehingga dapat meningkat menjadi usaha kecil dan menengah secara langsung kepada perorangan atau kelompok usaha.
Kredit Usaha Rakyat (KUR)		Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum <i>bankable</i> dengan <i>plafond</i> kredit sampai dengan Rp500 juta yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)		Kredit yang diberikan bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah. Yang dimaksud pelaku usaha pembibitan sapi adalah perusahaan peternakan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi.



<p>Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)</p>		<p>Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Energi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.</p>
<p>Kredit Resi Gudang</p>	<p>Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dan Kredit Resi Gudang Non Subsidi.</p>	<p>Kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja yang sifatnya mendesak dan sumber pembayaran kembalinya jelas dan dapat dipastikan, baik dari hasil usaha maupun penjualan barang yang pemilikannya dibuktikan dengan resi gudang dan dijadikan jaminan di bank.</p> <p>Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) diberikan kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi.</p> <p>Kredit Resi Gudang Non Subsidi diberikan kepada perorangan dan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p>
<p>KUMK SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)</p>		<p>Kredit yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan produksi dan/atau pengendalian polusi yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil.</p>
<p>Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah</p>		<p>Kredit yang diberikan bank kepada pengusaha mikro dan kecil secara kelompok/koperasi/badan usaha atau perorangan yang penggunaannya untuk meningkatkan hak atas tanah yang bukti kepemilikan tanahnya secara hukum tidak ada masalah/sengketa.</p>
<p>Kredit Talangan Al-Mabrur</p>		<p>Kredit talangan yang diberikan oleh bank kepada perorangan dan penyelenggara ibadah haji khusus untuk keperluan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) agar memperoleh porsi sebagai jamaah haji.</p>



LAYANAN JASA	JENIS LAYANAN JASA	KETERANGAN
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)		Melalui layanan ATM bank 24 jam, nasabah dapat memperoleh kemudahan antara lain: bebas biaya tarik tunai di ATM berlogo PRIMA dan ATM Bersama, dapat digunakan untuk transaksi tarik tunai, transfer, cek saldo, dan pembayaran Telkom, PBB, HP, SPP, dan pembelian pulsa, dapat digunakan untuk berbelanja di <i>merchant-merchant</i> yang berlogo PRIMA DEBIT atau DEBIT BCA. ATM bank juga dapat dipakai untuk melakukan penarikan tunai di negara Malaysia di seluruh terminal ATM Bank-bank yang tergabung dalam MEPS dan berlogo BANKCARD.
e-SAMSAT JATIM		Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) melalui <i>e-Channel</i> bank yaitu: ATM, Teller, PPOB, Mobile Banking dan Internet Banking.
Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)		KPE juga berfungsi sebagai kartu ATM yang memiliki layanan: Informasi Saldo, penarikan uang tunai dari rekening tabungan melalui ATM bank, ATM Bersama, ATM Prima, transfer uang antar rekening bank, transaksi pembayaran tagihan (<i>e-payment</i>) dan alat pembayaran di <i>merchant-merchant</i> yang berlogo Prima Debit.
Jatim Electronic Transfer System (JETS)		Layanan transfer nasabah melalui BPR secara aman yang didukung pengakuan secara hukum bagi BPR untuk ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. JETS disediakan oleh bank untuk anggota APEX BPR bank dalam hal pertukaran Data Keuangan Elektronik (DKE) tanpa disertai penyampaian fisik warkat (<i>paperless</i>) antar sesama BPR dan atau BPR dengan bank umum peserta SKNBI yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu sesuai siklus yang ditetapkan.



BPD Net Online		Fasilitas transfer antar BPD seluruh Indonesia yang tergabung dalam ATM Bersama secara <i>Real Time</i> .
Layanan Transaksi Devisa		Layanan transaksi devisa bank meliputi jasa valas, deposito valas, giro valas, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), L/C (<i>Letter of Credit</i>), pajak impor.
Kiriman Uang/ <i>Western Union</i>		Layanan pengiriman uang keluar negeri di 250.000 lokasi yang tersebar lebih dari 200 negara.
Jasa Perbankan Lainnya	Referensi Bank	Merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan bank, yang menerangkan bahwa seseorang/perusahaan yang mengajukan adalah benar-benar nasabah bank. Referensi tersebut dapat digunakan oleh nasabah untuk mengikuti pelelangan proyek tertentu.
	Kliring	Kliring meliputi RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>) dan SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia). Sistem transfer dana berbasis RTGS memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran/transfer dana secara elektronik dalam waktu seketika/ <i>online</i> dan penyelesaian transaksi (<i>settlement</i>) secara terpadu. SKNBI merupakan transfer dana kredit antar bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat yang dapat digunakan untuk melakukan transfer ke seluruh wilayah Indonesia.
	Inkaso	Penagihan yang dilakukan oleh bank/nasabah dalam hal ini nasabah cukup menyerahkan amanatnya kepada bank untuk menagihkan kepada pihak lain/bank lain.
	Giralisasi	Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang dilakukan secara otomatis oleh bank dengan melakukan pendebitan rekening giro/tabungan nasabah sesuai dengan surat perintah pendebitan yang telah ditandatangani oleh nasabah.



	Layanan Pajak	Salah satu jenis layanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah berkaitan dengan status bank sebagai bank operasional V (BO V) atau sebagai bank persepsi dan bank wajib pungut (WAPU). Layanan pajak yang diberikan berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
	Gaji Kolektif	Layanan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau instansi yang menjadi nasabah giro maupun tabungan berupa kemudahan pembayaran gaji kepada perusahaan tersebut. Layanan gaji ini dapat dilakukan dengan membayar semua gaji secara keseluruhan maupun dapat dilewatkan ke rekening masing-masing pegawai pada perusahaan tersebut.
	<i>Safe Deposit Box</i>	Layanan jasa perbankan untuk menyimpan barang-barang, surat-surat berharga maupun dokumen penting
	<i>SMS Banking 3388*)</i>	Layanan jasa untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dan memperoleh informasi melalui <i>handphone</i> .
	Info Bank Jatim (<i>Call Center</i>)	Info Bank Jatim adalah <i>Call Center</i> bank dengan dial 14044 untuk memperoleh informasi produk bank dan kemudahan bertransaksi.

*) Per Desember 2013 menjadi SMS Banking 3366



PRODUK SYARIAH (G4-4, G4-9)

DANA	PRODUK DANA	KETERANGAN
Tabungan	Tabungan Barokah	Simpanan dengan prinsip bagi hasil (<i>mudharabah</i>) antara bank dengan nasabah sesuai <i>nisbah</i> yang telah disepakati, yang penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu.
	Tabungan Haji Amanah	Simpanan menggunakan prinsip bagi hasil (<i>mudharabah</i>) untuk mewujudkan niat dan langkah nasabah menuju <i>Baitullah</i> .
	Tabunganku iB	Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan prinsip <i>Wadiah Yad Adh Dhamanah</i> dimana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
Giro	Giro Amanah	Sarana penyimpanan dana dengan menggunakan prinsip <i>Wadiah Yad Adh Dhamanah</i> , yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro.
	Giro Maxi	Fasilitas giro yang dirancang khusus untuk nasabah dengan bagi hasil yang setara dengan tabungan.
Deposito	Deposito Barokah	Produk investasi berjangka waktu tertentu dengan prinsip bagi hasil (<i>mudharabah</i>) yang aman, menentramkan dan <i>Insha Allah barokah</i> .
DANA	PRODUK PEMBIAYAAN	KETERANGAN
Pembiayaan multiguna syariah		<p>Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada karyawan pemerintah atau swasta yang bekerja sama dengan bank syariah.</p> <p>Menggunakan prinsip <i>Murabahah</i> dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.</p>



KPR iB Griya Barokah		Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumtif), baik baru maupun bekas, di lingkungan <i>developer</i> maupun <i>non developer</i> , dengan sistem <i>murabahah</i> .
KPR Angsuran Bebas (KAB)		Merupakan pengembangan dari produk KPR iB <i>Barokah</i> yang ditujukan untuk nasabah yang berpenghasilan tetap dimana angsuran fleksibel disesuaikan dengan rencana pendapatan.
Talangan Haji " <i>Al Mabruur</i> "		Pinjaman talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana guna mendapatkan nomor porsi untuk berangkat haji, berdasarkan prinsip <i>Qardh</i> dimana bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
Pemilikan Kendaraan		Pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan proses mudah dan cepat berdasarkan syariah.
Emas iB Barokah		Fasilitas pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya bank memberikan surat gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank.
Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah		Pembiayaan yang diberikan untuk kepemilikan emas dengan prinsip <i>Murabahah</i> .
Pembiayaan Modal Kerja		Pembiayaan untuk modal kerja produktif berupa pengadaan bahan baku, barang dagangan/persediaan, kebutuhan operasional dan ekspansi usaha lainnya, dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.



Pembiayaan Investasi		Fasilitas pembiayaan untuk investasi usaha produktif berupa pembelian properti, kendaraan, mesin, alat-alat berat dan barang-barang investasi lainnya, dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.
LAYANAN JASA	JENIS LAYANAN JASA	KETERANGAN
Bank Garansi/ <i>Kafalah</i>	<p>Bank Garansi Penawaran (Jaminan Tender)</p> <p>Bank Garansi Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan)</p> <p>Bank Garansi Uang Muka (Jaminan Uang Muka)</p> <p>Bank Garansi Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan)</p> <p>Bank Garansi Pembayaran (Jaminan Pembayaran)</p> <p>Bank Garansi untuk Penyalur/<i>Agen/Dealer/Depot Holder</i> (swasta <i>bonafide</i>)</p>	Jaminan yang diberikan bank kepada pihak ketiga (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, atas pemenuhan kewajiban nasabah (yang dijamin) kepada pihak ketiga dimaksud.
Surat Dukungan		Surat keterangan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk kepentingan persyaratan dalam mengikuti <i>tender</i> proyek pemerintah ataupun swasta.
Surat Referensi Bank		Surat keterangan yang diterbitkan bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu sebagai pernyataan bahwa nasabah tersebut adalah benar-benar nasabah bank.
RTGS		Jasa transfer uang valuta Rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara <i>real time</i> . Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.
SKN		Jasa pemindahan dana antar bank dalam wilayah nasional (untuk transfer) dan satu wilayah kliring lokal (untuk kliring debit menggunakan sarana cek, bilyet giro dan nota debit).
<i>Western Union</i>		Jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara tepat (<i>real time on line</i>) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara.



Bersama Membangun Masyarakat (FS15)

Bank melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap sektor mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM) selain menyalurkan pinjaman.

Pada tahun 2013, bank memberikan alat penunjang usaha kepada UMKM yang menjadi nasabah minimal sejak 2 tahun dengan kolektibilitas kredit lancar.

Jenis UMKM	Pemilik	Alat Usaha yang Diberikan	Lokasi
Industri aluminium	Hendri Susianto	1 unit mesin potong aluminium dan 2 unit alat bor	Blitar
Bengkel las karbit, listrik dan bubut	Imam Supardi	1 unit alat bor <i>press</i>	Bojonegoro
Penggilingan daging	Nursaid	1 unit mesin penggilingan daging	Surabaya
Produksi knalpot racing merk BRAT	Rata Purwanto	Seperangkat peralatan las	Kepanjen, Kabupaten Malang
Pembuatan roti gapit	Sulasmini	2 unit alat pemanggang roti gapit	Madiun
Laundry	Tyas Yuliasuti	1 unit mesin cuci dan alat pengering	Ngawi
Pembuatan batu permata	Suparjianto	1 unit mesin pemotong batu	Pacitan
Perkebunan apel	M.Raharjo	1 unit <i>Engine Honda Gx-160</i> , 1 unit <i>Power Sprayer Indokoyo Sc-30</i> , 1 unit <i>Jet Pump Pedrollo Jswm 1-Cx</i> dan 10 <i>Roll selang high pressure Tanaka</i>	Pasuruan
Produksi keripik	Herman Felani	Mesin <i>continous sealer</i> dan <i>oven gas</i>	Kraksaan



UMKM penerima bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan:

1. Industri aluminium Putra Prima



Industri aluminium Putra Prima milik Hendri Susianto berlokasi di Jalan Bengawan Solo, Kota Blitar. Usaha tersebut telah berjalan selama 3 tahun. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang tersebut mengawali usaha pembuatan rak piring dan lemari dengan bahan dasar aluminium yang diperoleh dari Surabaya, Jakarta, Semarang dan Madiun. Konsumennya berasal dari Blitar, Kediri dan Trenggalek.

Pengusaha yang berusia 39 tahun tersebut memperoleh Kredit Pundi Kencana dari bank yang sangat membantu kemajuan usahanya. Bank memberikan mesin potong aluminium dan alat bor sebagai bentuk apresiasi dan pemberdayaan terhadap UMKM tersebut.

Pada saat ini, usaha milik Hendri Susianto beromzet sekitar Rp350 juta/bulan serta direncanakan akan dibuka cabang baru.

2. Perkebunan apel



Perkebunan apel milik M.Rahardjo berlokasi di Jalan Andonasari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan. Bapak dari tiga anak tersebut memilih jenis apel *rome beauty* dan manalagi untuk bisnisnya karena cocok dengan iklim dan pangsa pasarnya bagus. Usaha turun-temurun tersebut dikelola M.Rahardjo sejak tahun 1991 pada luas lahan sekitar 10 hektar. Panen apel dilakukan 2 kali dalam setahun yang sangat dipengaruhi oleh cuaca.

Alumnus Fakultas Hukum tersebut mendapatkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank yang sangat bermanfaat untuk usahanya. Selain itu, bank juga memberikan peralatan penyemprot hama, mesin pompa serta selang sebagai bentuk apresiasi dan pemberdayaan UMKM.



Interaksi dengan Komunitas Setempat

Interaksi bank dengan komunitas setempat dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat di sekitar operasional perusahaan. Untuk pelaksanaan rekrutmen, bank berkomitmen untuk membuka peluang dan kesempatan yang sama bagi putra-putri Indonesia untuk dapat berkarir di bank. Demikian juga dalam proses pengembangan karir maupun penempatan posisi eksekutif tanpa membedakan jenis kelamin maupun agama, ras dan golongan (**G4-EC6**).



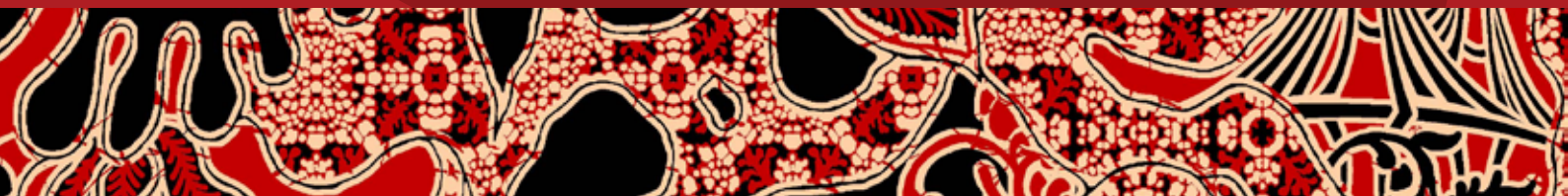


Halaman ini Sengaja dikosongkan



03

KEBERLANJUTAN
KINERJA SOSIAL





Sosial

Bank berperan aktif dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial

Salah satu wujud keberlanjutan kinerja sosial bank adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang beruntung



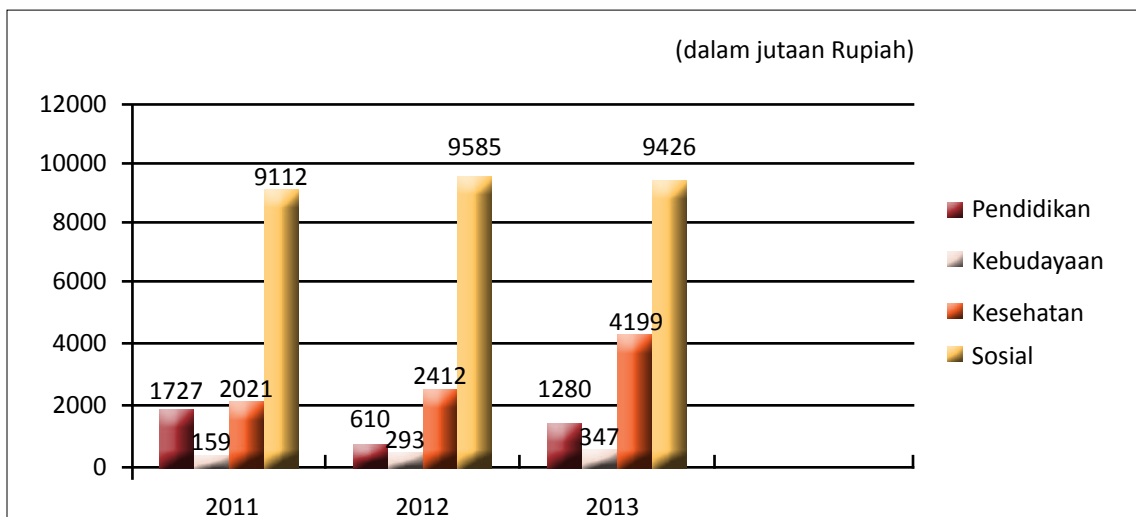


Aspek Kemasyarakatan

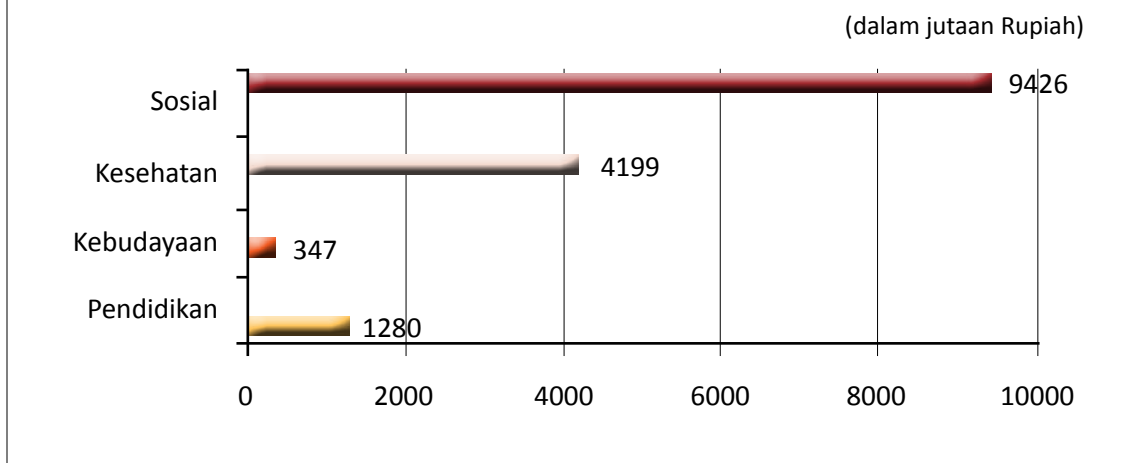
Bank mengedepankan aspek kemasyarakatan dengan menghormati hak-hak masyarakat dalam menjalankan bisnisnya. Masyarakat merupakan faktor pendukung bisnis dan berpengaruh positif terhadap perkembangan bisnis bank. Selama tahun 2013, tidak ada pelaporan mengenai kemasyarakatan yang terkait dengan usaha bank (G4-SO11).

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu wujud kepedulian bank terhadap masyarakat dan lingkungan terutama di sekitar wilayah operasional (G4-SO1). Pada tahun 2013, bank melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar Rp15,25 miliar. Pemberian bantuan tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai berikut:



Pada tahun 2013, penyaluran tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan sosial sebagai berikut:





Pembangunan Infrastruktur Sosial (G4-EC7)

Pada tahun 2013, bank melaksanakan pembangunan infratraktur sosial yang berfungsi sebagai sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah, rumah tinggal dan infrastruktur lainnya yang bersifat sosial. Pembangunan infrastruktur tersebut berfungsi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan

Pada tahun 2013, bank melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan di bidang pendidikan dalam bentuk pemberian sarana dan pembangunan prasarana sekolah sebesar Rp1,28 miliar.

Aktivitas CSR bank di bidang pendidikan antara lain:

NO.	BENTUK AKTIVITAS	LOKASI
1.	Pemberian 750 paket peralatan sekolah	Kabupaten Bondowoso
2.	Pemberian 250 paket peralatan sekolah	Kabupaten Lumajang
3.	Bantuan perpustakaan dan rumah pintar	Kota Madiun
4.	Pemberian 1000 paket seragam dan peralatan sekolah	Kabupaten Banyuwangi
5.	Pembangunan SD Islam Hidayatul	Kabupaten Magetan
6.	Pemberian beasiswa mahasiswa STIKES Muhammadiyah	Kabupaten Lamongan
7.	Pemberian beasiswa mahasiswa Universitas Nusantara PGRI	Kediri
8.	Pemberian buku bacaan	Perpustakaan Pemerintah Kota Surabaya
9.	Pemberian beasiswa mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma	Kota Surabaya
10.	Pemberian beasiswa mahasiswa STIE Perbanas	Kota Surabaya
11.	Pemberian bus sekolah	Kabupaten Gresik



Bantuan CSR untuk perbaikan gedung SD Islam Hidayatul di Kabupaten Magetan



Bantuan CSR berupa bus sekolah untuk Kabupaten Gresik



Kebudayaan

Pada tahun 2013, bank melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan di bidang kebudayaan dalam bentuk pemberian bantuan olahraga dan pelestarian kebudayaan sebesar Rp347,10 juta.

Aktivitas CSR bank di bidang kebudayaan antara lain:

NO.	BENTUK AKTIVITAS	LOKASI
1.	Pemberian beasiswa untuk atlet voli	Kota Surabaya
2.	Pemberian matras lapangan olahraga bola voli	Kabupaten Lamongan
3.	Pemberian bantuan penyelenggaraan festival reyog	Kabupaten Ponorogo
4.	Pemberian alat musik hadrah	Pondok Pesantren Jam'iyatul Hadrah Nurul Iman Kotakan dan Pondok Pesantren Jam'iyatul Hadrah Al-Muhibin
5.	Pemberian alat musik samroh	SDN Simomulyo 1 Surabaya

Kesehatan

Pada tahun 2013, bank melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan di bidang kesehatan dalam bentuk pemberian sarana kesehatan dan bantuan medis sebesar Rp4,20 miliar. Aktivitas CSR bank di bidang kesehatan antara lain:

NO.	BENTUK AKTIVITAS	LOKASI
1.	Jambanisasi dalam rangka ODF (<i>Open Defecation Free</i>)	Kabupaten Kediri Kota Batu Kabupaten Pamekasan Kabupaten Ngawi
2.	Bantuan tempat tidur pasien	RSUD dr. M. Soewandhie
3.	Bantuan 1 unit <i>ambulance</i>	Kabupaten Tulungagung RSUD dr. Soedono Madiun Kabupaten Sumenep Kota Batu Kabupaten Situbondo Kabupaten Trenggalek Kota Kediri Kota Surabaya RSUD dr. M. Soewandhie RSUD Caruban Kabupaten Jombang Kabupaten Jember
4.	Pemberian alat-alat kesehatan	RSU Haji Surabaya
5.	Penyelenggaraan khitanan massal	Kota Surabaya
6.	Pemberian 1 set alat AABR	Kota Surabaya
7.	Pemberian seperangkat alat kesehatan gigi	Kota Surabaya
8.	Bantuan operasi kepada penderita cacat bawaan	Kabupaten Probolinggo
9.	Pemberian biskuit dan susu untuk balita	Kota Probolinggo
10.	Pemberian biskuit kepada balita	Kabupaten Ngawi
11.	Pemberian 30 kursi roda	Kabupaten Trenggalek



Pemberian biskuit untuk balita sebagai bentuk perbaikan gizi buruk di Kabupaten Ngawi



Pemberian CSR berupa alat AABR (*Automated Auditory Brainstem Response*) kepada RSUD Dr. Soetomo



Khitanan massal 1250 anak kurang mampu di Surabaya



Sosial

Pada tahun 2013, bank melaksanakan pembangunan infrastuktur sosial, pemberian sembako dan perbaikan lingkungan dengan jumlah sebesar Rp9,43 miliar.

Aktivitas CSR Bank di bidang sosial antara lain:

1. Perbaikan rumah tidak layak huni sebagai berikut:

NO.	BENTUK AKTIVITAS	JUMLAH UNIT	LOKASI
1.	Perbaikan rumah tidak layak huni	25	Kabupaten Lumajang
2.	Plesterisasi	250	Kabupaten Bondowoso
3.	Perbaikan rumah tidak layak huni	100	Kabupaten Madiun
4.	Perbaikan rumah tidak layak huni	50	Kabupaten Pacitan
5.	Perbaikan rumah tidak layak huni	100	Kabupaten Sampang
6.	Perbaikan rumah tidak layak huni	100	Kabupaten Jember
7.	Perbaikan rumah tidak layak huni	50	Kabupaten Ngawi
8.	Perbaikan rumah tidak layak huni	60	Kabupaten Mojokerto
9.	Perbaikan rumah tidak layak huni	50	Kabupaten Magetan
10.	Perbaikan rumah tidak layak huni	50	Kabupaten Lamongan
11.	Perbaikan rumah tidak layak huni	88	Kabupaten Tuban
12.	Perbaikan rumah tidak layak huni	100	Kabupaten Sidoarjo
13.	Perbaikan rumah tidak layak huni	97	Kabupaten Tuban



Rumah tidak layak huni di Kelurahan Karang Dalem Kabupaten Sampang



50% keadaan rumah setelah perbaikan rumah



100% keadaan rumah setelah perbaikan rumah





1. Pemberian sarana berdagang bagi para pedagang kaki lima sebagai berikut:

NO.	BENTUK AKTIVITAS	JUMLAH UNIT	LOKASI
1.	Pemberian tenda	80	Kabupaten Pasuruan
2.	Pemberian gerobak	50	Kota Blitar
3.	Pemberian tenda	50	Kabupaten Jember
4.	Pemberian gerobak	70	Kabupaten Kediri

2. Pemberian sembako kepada warga masyarakat yang kurang mampu sebagai berikut:

NO.	BENTUK AKTIVITAS	LOKASI
1.	Pemberian 500 paket sembako	Kabupaten Tuban
2.	Pemberian 1000 paket sembako	Kabupaten Banyuwangi
3.	Pemberian 1000 paket sembako	Kabupaten Tuban
4.	Pemberian 350 paket sembako	Kota Batu
5.	Pemberian 1000 paket sembako	Kota Batu
6.	Pemberian 300 paket sembako	Kabupaten Tuban
7.	Pemberian 700 paket sembako	Kabupaten Tuban
8.	Pemberian 500 paket sembako	Kabupaten Gresik
9.	Pemberian 1500 paket sembako	Kabupaten Malang dan Kabupaten Pamekasan
10.	Pemberian 400 paket sembako	Kabupaten Banyuwangi
11.	Pemberian 500 paket sembako	Kota Surabaya
12.	Pemberian 1000 paket sembako	Kabupaten Jember
13.	Pemberian 1500 paket sembako	Kabupaten Bojonegoro
14.	Pemberian 1000 paket sembako	Kabupaten Jember
15.	Pemberian 200 paket sembako	Bawean
16.	Pemberian 750 paket sembako	Kota Surabaya
17.	Pemberian 1575 paket sembako	Kabupaten Jombang
18.	Pemberian 240 paket sembako	Kabupaten Nganjuk
19.	Pemberian 500 paket sembako	Kabupaten Blitar

3. Keagamaan sebagai berikut:

NO.	BENTUK AKTIVITAS	LOKASI
1.	Pembangunan Musholah Nurul Qidam	Bawean
2.	Renovasi 25 unit masjid	Kabupaten Lumajang

4. Pembangunan sarana sosial sebagai berikut:

NO.	BENTUK AKTIVITAS	LOKASI
1.	Renovasi 32 warung dan pembuatan 2 toilet umum	Kabupaten Lumajang
2.	Perbaikan 40 unit toilet	Kabupaten Situbondo
3.	Pemeliharaan gedung gasibu	Kabupaten Pacitan
4.	Pembangunan sarana pendukung obyek wisata	Kabupaten Pacitan
5.	Pembangunan paving	Kabupaten Kediri



1. Perbaikan lingkungan sebagai berikut:

NO.	BENTUK AKTIVITAS	LOKASI
1.	Pemberian 1 unit mobil <i>skywalker</i>	Kota Surabaya
2.	Pemberian 10 tempat sampah basah dan kering	Kabupaten Trenggalek
3.	Pemberian 15 unit gerobak sampah dan 20 bak sampah	Kota Probolinggo
4.	Pemberian 200 batang pohon untuk penghijauan di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah	Kabupaten Sumenep
5.	Pembangunan jaringan air bersih	Kabupaten Lumajang
6.	Pemberian 50 unit bak sampah	Kota Pasuruan
7.	Pemberian tempat sampah <i>indoor</i> , <i>outdoor</i> dan asbak	Kabupaten Kediri
8.	Pemberian 1 unit mobil <i>dump truck</i>	Kota Surabaya
9.	Pemberian 50 unit gerobak sampah	Kabupaten Lamongan
10.	Pemberian gerobak dan pot bunga	Kabupaten Ponorogo

Pemberian CSR berupa *dump truck* untuk membuang limbah kotoran hewan di Kota Surabaya



Aspek Kepatuhan dan Kebijakan Publik

ASPEK KEBIJAKAN PUBLIK

Bank tidak memberikan kontribusi kepada partai politik, tidak menerima keuntungan finansial apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun **(G4-SO6)**.

ASPEK KEPATUHAN

Selama periode pelaporan, bank tidak dikenakan denda, tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum, peraturan terkait keadilan persaingan usaha, praktik monopoli, transparansi produk, periklanan atau promosi, pengadaan, penggunaan produk dan jasa **(G4-SO7, G4-SO8, G4-PR4, G4-PR7, G4-PR9)**. Terkait produk dan layanan jasa, bank tidak dalam sengketa atau telah memenuhi ketentuan persyaratan untuk peluncuran produk dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Aspek Ketenagakerjaan

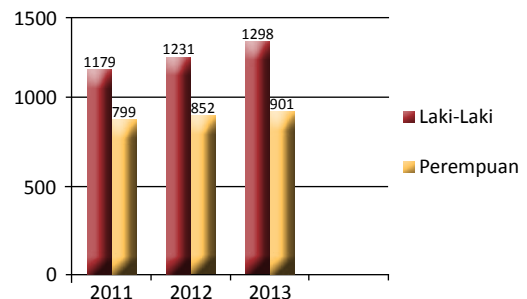
PEGAWAI SEBAGAI MITRA USAHA BANK

Sesuai dengan visi bank untuk “Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional”, bank berupaya menjadikan sumber daya manusia yang ada di perusahaan sebagai mitra usaha bank yang profesional. Melalui Divisi Sumber Daya Manusia yang berperan untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas operasional pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan penerapan dari kebijakan, perencanaan dan sistem sumber daya manusia yang dikembangkan serta mensinergikan seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dengan Divisi Perencanaan Strategis dalam kaitannya dengan pengembangan kebijakan, perencanaan dan sistem sumber daya manusia. Oleh karena itu, Divisi Sumber Daya Manusia yang memimpin pelaksanaan seluruh program kerja sumber daya manusia dan menetapkan strategi untuk aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan secara periodik melaksanakan tinjauan terhadap strategi dan rencana kerja tersebut dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas antara lain: rekrutmen, pelaksanaan evaluasi kerja, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan hubungan kepegawaian, pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian, pelaksanaan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia, pelaksanaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan manajemen karir, pelaksanaan manajemen remunerasi dan pelaksanaan terminasi pegawai.

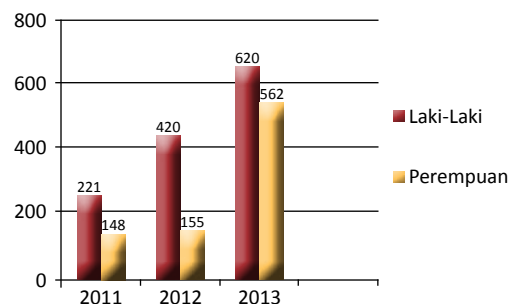
PROFIL PEGAWAI BANK (G4-10)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank didukung oleh keberadaan tenaga kerja baik pegawai tetap maupun tidak tetap. Jumlah pegawai terus meningkat pada 3 tahun terakhir sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui sumber daya manusia yang profesional. Jumlah pegawai bank pada tahun 2013 adalah 3381 orang terdiri dari pegawai tetap dan tidak tetap. (G4-9)

Peningkatan Jumlah Pegawai Tetap Selama 3 Tahun



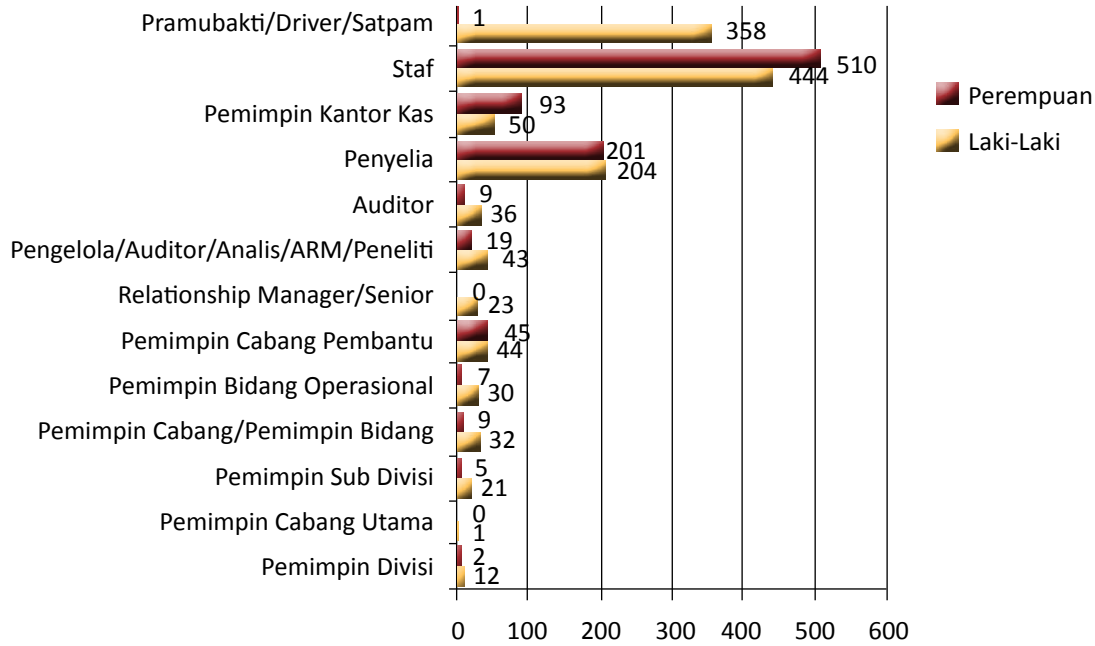
Peningkatan Jumlah Pegawai Tidak Tetap Selama 3 Tahun



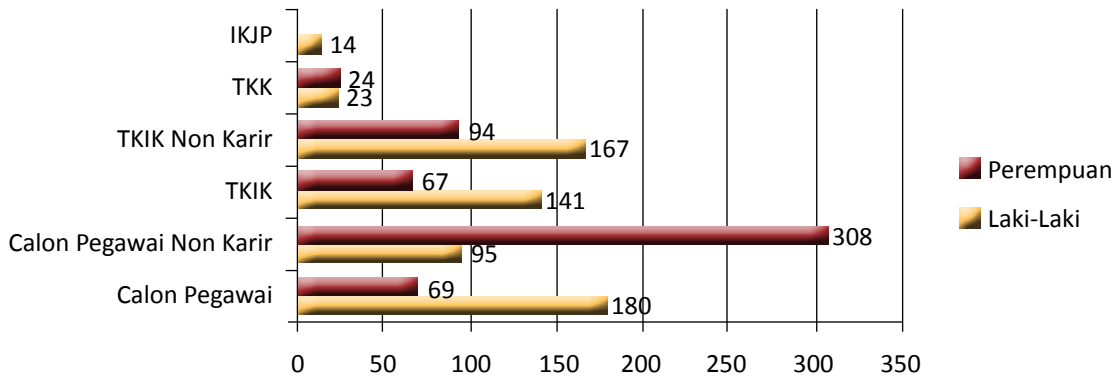


Komposisi dan Jumlah Pegawai Tahun 2013 Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin (G4-10, G4-LA12)

Pegawai Tetap:



Pegawai Tidak Tetap:





Komposisi dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja dan Jenis Kelamin (G4-10)

NO	DIVISI/CABANG	PEGAWAI TETAP		PEGAWAI KONTRAK	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Divisi Sumber Daya Manusia	12	18	4	4
2.	Divisi Akuntansi	4	6	1	2
3.	Divisi Audit Intern	20	2	3	0
4.	Divisi Teknologi Informasi	17	0	9	1
5.	Divisi Kepatuhan	4	7	1	1
6.	Divisi Manajemen Risiko	5	1	0	0
7.	Divisi Perencanaan	7	4	0	2
8.	Divisi Umum	78	7	7	7
9.	Divisi Dana Jasa & Luar Negeri	6	7	5	4
10.	Divisi Tresuri	7	7	0	2
11.	Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel	22	2	1	0
12.	Divisi Kredit Menengah & Korporasi	16	4	3	0
13.	Divisi Usaha Syariah	18	11	25	12
14.	<i>Corporate Secretary</i>	10	13	2	2
15.	Cabang Utama	67	78	46	61
16.	Cabang Batu	15	12	6	4
17.	Cabang Banyuwangi	36	21	20	32
18.	Cabang Bondowoso	16	14	12	8
19.	Cabang Bojonegoro	26	13	20	18
20.	Cabang Bangkalan	19	12	14	14
21.	Cabang Blitar	29	23	10	11
22.	Cabang Bawean	10	2	3	4
23.	Cabang Dr. Soetomo	16	39	16	18
24.	Cabang Gresik	30	23	14	11
25.	Cabang HR. Muhammad	10	6	1	2
26.	Cabang Jombang	26	23	8	12
27.	Cabang Jakarta	27	20	11	7
28.	Cabang Jember	44	31	18	12
29.	Cabang Kraksaan	19	9	9	6
30.	Cabang Kangean	10	1	5	3
31.	Cabang Kediri	35	23	26	19
32.	Cabang Kepanjen	13	14	3	3
33.	Cabang Lumajang	22	21	8	10
34.	Cabang Lamongan	35	22	19	22
35.	Cabang Malang	41	43	35	26
36.	Cabang Madiun	38	22	21	16
37.	Cabang Magetan	28	15	11	17
38.	Cabang Mojokerto	24	22	20	9
39.	Cabang Ngawi	28	28	20	9



40.	Cabang Nganjuk	24	24	7	11
41.	Cabang Pasuruan	28	26	12	17
42.	Cabang Pamekasan	23	9	11	7
43.	Cabang Pare	17	7	7	8
44.	Cabang Ponorogo	25	12	10	13
45.	Cabang Probolinggo	18	18	8	6
46.	Cabang Pacitan	18	12	8	9
47.	Cabang Perak	33	30	12	15
48.	Cabang Sumenep	22	9	13	3
49.	Cabang Sidoarjo	43	38	28	28
50.	Cabang Situbondo	29	12	9	8
51.	Cabang Sampang	21	11	10	7
52.	Cabang Syariah	24	13	5	7
53.	Cabang Trenggalek	21	15	13	10
54.	Cabang Tulungagung	23	18	14	10
55.	Cabang Tuban	24	18	16	12
56.	Yayasan Kesejahteraan Pegawai	2	3	0	0
57.	Dana Pensiun Pegawai	2	0	0	0
58.	Unit Penanganan Kredit Bermasalah	11	0	0	0
JUMLAH		1298	901	620	562

SERIKAT PEKERJA BANK (G4-10, G4-11)

Sampai dengan tahun 2013, bank belum memiliki Serikat Pekerja dan belum melakukan Perjanjian Kerja Bersama (G4-LA4, G4-LA8) kecuali pegawai kontrak karena pegawai tetap secara otomatis mengikuti peraturan yang ada. Bank belum memiliki badan khusus yang berfungsi sebagai pemantau untuk kesehatan dan keselamatan kerja pegawai (G4-LA5).

JUMLAH DAN TINGKAT PERPUTARAN PEGAWAI BANK (G4-LA1)

Pada tahun 2013, jumlah pegawai tetap bank yang memasuki masa pensiun adalah 55 orang, meninggal dunia 10 orang dan mengundurkan diri untuk pegawai tetap 18 orang dan pegawai kontrak 24 orang. Untuk memenuhi kesenjangan kapasitas seiring dengan adanya perubahan bisnis terkait dengan perubahan struktur organisasi, pegawai yang pensiun, meninggal, maupun mengundurkan diri, bank melaksanakan proses rekrutmen melalui berbagai metode dalam mencari dan menyeleksi calon pegawai yang memiliki kompetensi dan semangat untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan bank. Beberapa rekrutmen yang telah dilaksanakan bank selama tahun 2013 sebagai berikut:

NO	REKRUTMEN	POSISI YANG DITAWARKAN	JUMLAH YANG DITERIMA	PERIODE PELAKSANAAN PADA TAHUN 2013
1	Rekrutmen Pegawai Non Karir Tahap I	Non Karir	505	Januari
2	Rekrutmen Pegawai Non Karir Tahap I	Non Karir	142	Juni
3	Rekrutmen TKK Samsat	Kasir	49	April
4	Rekrutmen Pegawai Baru Tahap I	Analisis Kredit	16	September



	<i>Frontliner</i>	16	
	Audit Intern	16	
	Teknologi Informasi	7	
	Administrasi	69	
	Penaksir Gadai	0	
	Pembiayaan di Bidang Syariah	0	
	<i>Dealer Tresuri</i>	2	
	ACO (<i>Area Credit Officer</i>)	11	
	ARCO (<i>Area Relation and Collection Officer</i>)	4	
	AS (<i>Area Support</i>)	5	
	CO (<i>Credit Officer</i>)	44	
5	Rekrutmen Mikro		November sampai dengan Desember
	MAM (<i>Micro Area Manager</i>)	4	
	PIC (<i>Proses Internal Control</i>)	1	
	SO (<i>Sales Officer</i>)	17	
	RO (<i>Relation Officer</i>)	9	
	UH (<i>Unit Head</i>)	27	



Bank melaksanakan pelatihan orientasi internal untuk pegawai mikro setelah rekrutmen

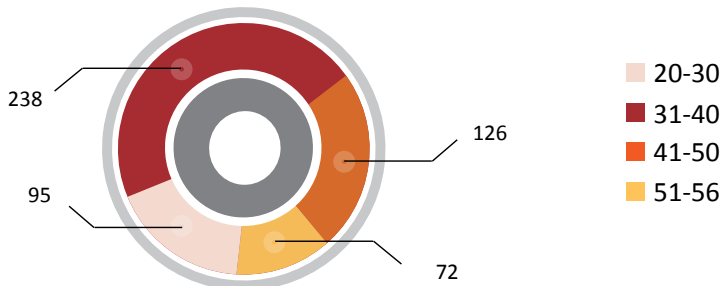


Pelatihan orientasi internal untuk pegawai baru



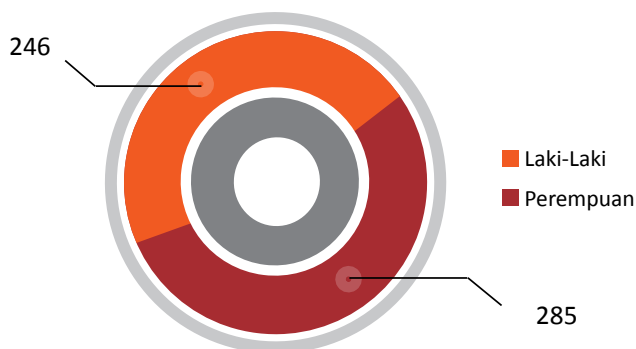
Selama tahun 2013 bank telah melakukan perpindahan terhadap pegawai sejumlah 531 orang dengan tujuan meningkatkan kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Jumlah dan tingkat perpindahan pegawai bank dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin dan wilayah operasional sebagai berikut:

Jumlah Perpindahan Pegawai Bank pada Tahun 2013 Berdasarkan Usia



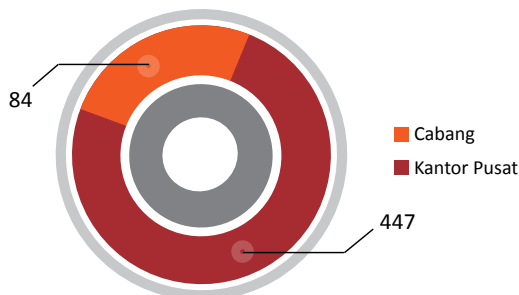
Tingkat perpindahan pegawai bank terbesar sejumlah 238 orang untuk pegawai berusia 31-40 tahun, kemudian pegawai berusia 41-50 tahun sejumlah 126 orang, pegawai dengan usia 20-30 tahun sejumlah 95 orang dan pegawai berusia 51-56 tahun sejumlah 72 orang.

Jumlah Perpindahan Pegawai Bank pada Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah perpindahan pegawai bank untuk pegawai perempuan adalah 285 orang dan pegawai laki-laki adalah 246 orang.

Jumlah Perpindahan Pegawai Bank Berdasarkan Wilayah Operasional



Berdasarkan wilayah operasional, jumlah perpindahan pegawai bank ke Kantor Cabang yaitu 447 orang dan pegawai Kantor Pusat sebesar 84 orang.

TINGKAT KECELAKAAN FISIK DAN JUMLAH KEMATIAN PENYAKIT KARENA PEKERJAAN (G4-LA6)

Selama tahun 2013 tidak terjadi kecelakaan fisik maupun kematian karena pekerjaan. Adapun unit kerja dan jenis pekerjaan dengan risiko kecelakaan atau risiko tinggi penyakit karena pekerjaan adalah tenaga keamanan, *driver*, bagian pemasaran dan analis kredit dengan tingkat mobilitas yang tinggi (G4-LA7).



IMBAL JASA PEKERJAAN (G4-LA13)

Pemberian imbal jasa pekerjaan tidak membedakan antara pegawai laki-laki dan perempuan. Perbandingannya adalah 1:1 (G4-LA13).

Komponen Imbal Jasa Pekerjaan Pegawai Laki-Laki dan Perempuan Bulan Januari sampai dengan Agustus 2013 meliputi:

KOMPONEN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Gaji Pokok	Ada	Ada
Tunjangan Jabatan	Ada	Ada
Tunjangan Transportasi	Ada	Ada
Tunjangan Fasilitas	Ada	Ada

Bank melaksanakan sistem *grading* dalam pemberian imbal jasa pekerjaan untuk pegawai laki-laki dan perempuan mulai bulan September 2013.

Adapun komponen imbal jasa pekerjaan pegawai laki-laki dan perempuan berubah menjadi:

KOMPONEN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
<i>Personal Grade</i> (Gaji Pokok)	Ada	Ada
<i>Job Grade</i> (Tunjangan Perumahan)	Ada	Ada

PROGRAM-PROGRAM KESEJAHTERAAN PEGAWAI (G4-LA2)

Bank memberikan beberapa manfaat melalui pemberian tunjangan tetap, pensiun pegawai dan asuransi dwiguna yang diberikan kepada pegawai yang telah pensiun dan/atau meninggal dunia sebagai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai.

PROGRAM-PROGRAM UNTUK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (G4-LA2)

Bank memberikan beberapa program pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja, antara lain:

PROGRAM	KETERANGAN
Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja)	Jaminan hak-hak pegawai dan perlindungan dasar terhadap kecelakaan kerja, kematian dan hari tua sehingga para pegawai dapat bekerja dengan rasa tenang dan nyaman
Penggantian Biaya Partus/Melahirkan	Penggantian biaya melahirkan diberikan kepada pegawai wanita dan istri pegawai
Penggantian Biaya Kacamata	Penggantian biaya kacamata diberikan kepada pegawai secara berkala
Bantuan Kesehatan Rawat Jalan	Fasilitas pengobatan secara rawat jalan diberikan kepada pegawai bank di poliklinik bank atau dokter yang bekerja sama dengan yayasan pegawai bank
Bantuan Kesehatan Rawat Inap	Fasilitas kelas rawat inap diberikan kepada pegawai sesuai dengan jabatan masing-masing pegawai
Donor Darah	Mengikutsertakan pegawai untuk kegiatan donor darah secara berkala yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia
General Check Up	Program pemeliharaan kesehatan pegawai dengan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada pegawai yang dilakukan secara berkala



MANAJEMEN KARIR (G4-LA11)

Program pengembangan kaderisasi terdiri dari 3 jalur karir yaitu program pengembangan jalur karir berjenjang, program pengembangan jalur karir reguler dan program pengembangan jalur karir jalur cepat.

Program Pengembangan Jalur Karir Berjenjang

PROGRAM PENGEMBANGAN JALUR KARIR BERJENJANG	KETERANGAN
EDP (Executive Development Program)	Program pengembangan jalur karir pegawai berjenjang dengan cara merekrut pegawai potensial dari level Pemimpin Bidang Operasional/Pemimpin Cabang Pembantu/ setingkat yang akan ditempatkan pada posisi jabatan sebagai Pemimpin Cabang/Pimpinan Sub Divisi/setingkat
MDP (Manager Development Program)	Program pengembangan jalur karir pegawai berjenjang dengan cara merekrut pegawai potensial dari level Penyelia/Pimkas/ setingkat yang akan ditempatkan pada posisi jabatan sebagai Pincapem/Pemimpin Bidang Operasional/setingkat
SDP (Staff Development Program)	Program pengembangan jalur karir pegawai berjenjang dengan cara merekrut pegawai potensial dari level staf yang akan ditempatkan pada posisi jabatan sebagai Pimkas/Penyelia/ setingkat



Pendidikan Klasikal SDP 5 gelombang 2



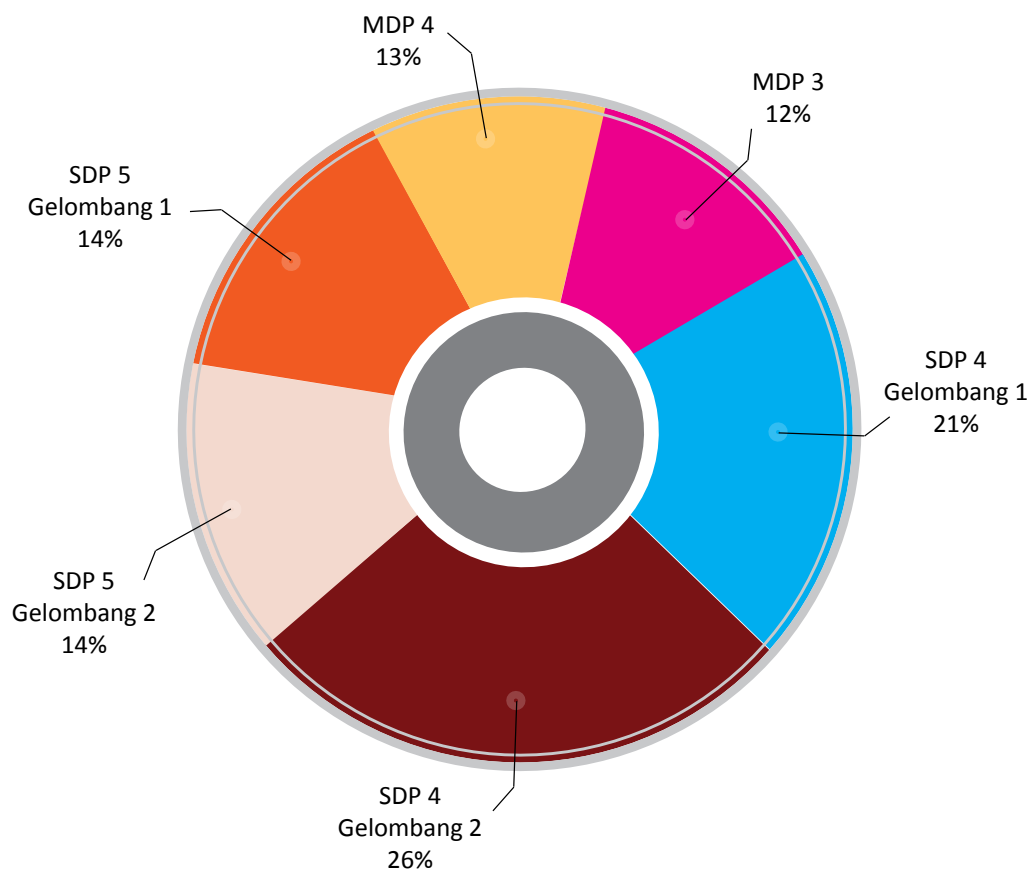
Program Pengembangan Jalur Karir Jalur Cepat disebut juga Program Pengembangan Jalur *Karir Fast Track* yaitu *Management Trainee*

Jumlah peserta program pengembangan karir pada tahun 2013 sebagai berikut:

NO	JENIS PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR	JUMLAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN		JUMLAH BERDASARKAN USIA					
		L	P	<30 TAHUN		30-50 TAHUN		>50 TAHUN	
				L	P	L	P	L	P
1	SDP 4 gelombang 1	30	38	0	0	30	38	0	0
2	SDP 4 gelombang 2	45	42	0	1	45	41	0	0
3	SDP 5 gelombang 1	19	26	4	4	15	22	0	0
4	SDP 5 gelombang 2	29	19	11	5	18	14	0	0
5	MDP 3	20	19	0	0	17	19	3	0
6	MDP 4	19	23	0	0	18	22	1	1
JUMLAH		162	167	15	10	143	156	4	1

Pada tahun 2013, persentase peserta laki-laki 49,24% dan perempuan 50,76% dari jumlah seluruh peserta program pengembangan karir (G4-LA11)

Berdasarkan jenis program pengembangan karir, persentase jumlah peserta sebagai berikut (G4-LA11):





PROGRAM PELATIHAN DAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI (G4-LA9)

Selama tahun 2013, bank telah mengadakan program pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh 2732 peserta dengan durasi waktu 356 hari. Program pendidikan dan pelatihan tersebut antara lain:

NO.	NAMA PELATIHAN
1.	<i>Workshop SKBDN</i>
2.	<i>Pelatihan Tax Planning</i>
3.	<i>Workshop Manajemen Pendanaan dan Kebersertaan Dana Pensiun</i>
4.	<i>Workshop Aktuaria Dana Pensiun dan Aplikasinya</i>
5.	<i>Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko</i>
6.	<i>Workshop Aspek Legal Kredit dan Jaminan</i>
7.	<i>Pelatihan APU/PPT</i>
8.	<i>Pelatihan Investasi Saham</i>
9.	<i>Pelatihan FKDKP</i>
10.	<i>Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun</i>
11.	<i>Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1,2,3</i>
12.	<i>Workshop Ketenagakerjaan</i>
13.	<i>Workshop Legal Drafting Perusahaan</i>
14.	<i>Workshop Kredit Korporasi dan Kredit Sindikasi</i>
15.	<i>Asset Liability Management</i>
16.	<i>Pelatihan Klasikal Manager Development Program (MDP)</i>
17.	<i>Pelatihan Penaksir Agunan Emas</i>
18.	<i>Pelatihan Program Leadership Training for Manager</i>
19.	<i>Workshop Kearsipan</i>
20.	<i>Pelatihan Training for Trainer</i>
21.	<i>Seminar Ketenagakerjaan</i>
22.	<i>Workshop Analisis Risiko Kredit dan Audit Kredit</i>
23.	<i>Pelatihan Outbond for Manager Development Program (MDP)</i>
24.	<i>Pelatihan Orientasi Internal</i>
25.	<i>Pelatihan Stress Testing on Banking Risk Exposure</i>
26.	<i>Training "Maximizing the Leadership Potentials"</i>
27.	<i>Pelatihan Sekolah Pasar Modal</i>
28.	<i>Ujian Level 1 sampai dengan 5 Sertifikasi Manajemen Risiko</i>
29.	<i>Pelatihan Purna Tugas</i>
30.	<i>Seminar Operation USD Direct Settlement</i>
31.	<i>Pelatihan PEP, CDD dan EDD bagi Petugas Frontliners</i>
32.	<i>Seminar Nasional Internal Audit</i>
33.	<i>Pelatihan Sistem Estim Syariah Bank Jatim</i>
34.	<i>Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko</i>
35.	<i>Great Coach Dream Team: Meningkatkan Kemampuan Memimpin</i>
36.	<i>Diskusi Terbuka Kepemimpinan Antar Pemimpin</i>
37.	<i>Balanced Scorecard Masterclass Training</i>
38.	<i>Pelatihan Kejahatan yang Menggunakan Media Perbankan</i>
39.	<i>Pelatihan Excellent Internal Auditor "Are You"</i>
40.	<i>Pelatihan E Channel Update & Trends 2013</i>
41.	<i>Office Management, Documentation and Electronic Filling System</i>



42. Pelatihan Hukum Pertanahan: Hak-Hak atas Tanah
43. Seminar Jaminan Kesehatan Karyawan Nasional
44. Seminar *Remittance*
45. *Training* Analisis Lingkungan Hidup
46. *How to Enhance Human Capital Management Practices in Our Organization*
47. *Workshop* Revisi Rencana Bisnis Bank
48. *Certified Human Capital Management*
49. Seminar *Whistleblowing System (G4-SO4)*
50. *Workshop ICAAP & STRESS Test*
51. *Workshop* Nasional Ketenagakerjaan
52. Pelatihan *Management Vendor*
53. Seminar Kepastian Hukum Eksekusi Hak Tanggungan
54. Pelatihan *Cobit Fundamental*
55. Pelatihan Analisa Pinjaman Kredit dan Strategi menghadapi Hutang
56. Sosialisasi Perpres 70/2012 (Revisi Perpres 54/2010)
57. Pelatihan Arbitrase Syariah
58. Pelatihan Pasar Modal
59. *Assessment Test*
60. *Workshop* RMG Menjembatani Perbedaan Radikal Atas KPPM
61. Pelatihan Kiat Sukses Menjadi MC Profesional
62. *Workshop Fraud Detection Active Data (G4-SO4)*
63. Pelatihan *Public Training*
64. *Creative Cash Flow Reporting*
65. Pelatihan *JETS*
66. *Workshop* Hapus Tagih Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi
67. *Hijab Class for Banker*
68. *Workshop* Praktis Investasi bagi Dana Pensiun
69. Pelatihan “Tiga Kesalahan Utama dan Solusi Lengkap Implementasi”
70. Seminar Peluang dan Tantangan Bank Khusus di Tengah Dominasi
71. *Workshop* Penyusunan Pedoman *ICAAP* Kuantifikasi Risiko
72. *Workshop* Kupas Tuntas Aspek Hukum Permenakertrans
73. Pelatihan Program *Investor Relation*
74. Pelatihan Analisis *Fraud & Money Laundering* serta Teknik Deteksi
75. Pelatihan Pajak untuk Non Divisi Pajak
76. Pelatihan Perpajakan PPH Pasal 21
77. *Workshop* Penilaian dan Perhitungan Kecukupan Modal Minimum
78. *Workshop* Teknik Jitu Dalam Pemeriksaan dan Pelaporan LBU
79. Seminar Nasional Kajian Hukum Yayasan Iyakkapi
80. *Workshop* Menghitung Modal Melalui *Internal Capital Adequacy Ratio*
81. *Workshop The New Strategic Sales Management*
82. Pelatihan Aspek Hukum Kredit Sindikasi Proyek Jalan Tol
83. *Workshop* Pembuatan Delik Hukum Pengadaan Barang/Jasa
84. *Workshop* Nasional tentang Pelaksanaan UU Yayasan
85. *World Class Executive Seminar With Philips Kotler*
86. *Business Process Outsourcing Indonesian Convention 2013*



- 87 Pelatihan Kepabeanan/EKSIM
- 88 *Training Unlimited Prospecting for Bankers Through Smart Calling*
- 89 *Performance Appraisal With Key Performance Indicator (KPI)*
- 90 *Public Relations Writing*
- 91 Mencegah dan Menangani Masalah Tanah dan Bangunan
- 92 *Self Assessment Good Corporate Governance (GCG)*
- 93 Seminar Jaminan Kesehatan Karyawan Dalam Era Jaminan Kesehatan
- 94 Pelatihan Kejahatan yang Menggunakan Media Perbankan
- 95 Peluang Investasi Semester II Tahun 2013
- 96 *Swift Training*
- 97 *Indonesia Training & Development (ITD) Summit*
- 98 *In House Training International Banking*
- 99 Pelatihan Kredit oleh Internal
- 100 Pelatihan *Risk Based Audit dan Whistleblowing System*
- 101 Ujian Modul 1 Program Belajar Jarak Jauh
- 102 *Audit/Assessment of IT Governance & ITSM Based On Cobit*
- 103 Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
- 104 Pelatihan *Letter of Credit* Berbasis Risiko
- 105 Sosialisasi tentang Penyakit Kanker
- 106 Pelatihan *Certified Fraud Examiner*
- 107 Workshop Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
- 108 Lokakarya *The Role and Function of Commissioners, Directors*
- 109 *Branchmark*
- 110 Pelatihan Tresuri Bank Syariah
- 111 Mengurai Benang Kusut Tumpang Tindih Fungsi SKAI, Fungsi Kepatuhan
- 112 *Risk Management* Dan Basel III
- 113 Seminar *Strengthening Financial Institutions*
- 114 *Human Relationship*
- 115 *Workshop* Nasional Lelang
- 116 *Branchless Banking Trend 2014*
- 117 Aspek Hukum ISBP 2013
- 118 Seminar Penerapan Program APU-PPT dan Implementasi Fatca
- 119 Seminar *Marketeers Dinner*
- 120 *Workshop* Penyusunan Perjanjian Kerja Kontrak & Outsourcing
- 121 *Workshop* Sistem Informasi Dana Pensiun
- 122 Seminar *Sustainability* Kelembagaan
- 123 *Salesmanship for Service People*
- 124 *Workshop Stress Testing & Scenario Analysis*
- 125 Pelatihan Strategi Audit Menghadapi Pengadaan Barang/Jasa (G4-SO4)
- 126 Pelatihan Penilaian Kinerja Berbasis *Balanced Scorecard*
- 127 *Workshop* Menghitung Biaya Pelatihan Dengan Model *Return On*
- 128 Pelatihan *RBA* Penerapan Program APU PPT
- 129 *Risk Management of Islamic Bank*
- 130 Seminar Perlindungan dan Pengamanan Arsip/Dokumen
- 131 *Workshop* Penerapan PSAK 24



PROGRAM PERSIAPAN MASA PURNA TUGAS PADA TAHUN 2013 (G4-LA 10)

Bank menyelenggarakan pelatihan purna tugas untuk membekali para pegawai yang akan memasuki masa tersebut. Pelatihan terdiri dari 2 angkatan yaitu:

NO	ANGKATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
1	Angkatan 9	28-30 Januari 2013	Hotel Surya Tretes	27
2	Angkatan 10	4-6 Februari 2013	Hotel Surya Tretes	24

Para peserta purna tugas dibekali dengan pelatihan persiapan pensiun dan kewirausahaan melalui kunjungan ke beberapa tempat usaha serta pendampingan bimbingan berwirausaha.

RASIO STANDAR GAJI TAHUN 2013 (G4-EC5)

NO	WILAYAH KERJA	GAJI PEGAWAI (dalam jutaan Rupiah)		UMK (dalam jutaan Rupiah)
		(Januari-Agustus)	(September-Desember)	
1	Kota Surabaya	2.836.888	2.850.000	1.740.000
2	Kabupaten Gresik	2.836.888	2.850.000	1.740.000
3	Kabupaten Pasuruan	2.836.888	2.850.000	1.720.000
4	Kabupaten Sidoarjo	2.836.888	2.850.000	1.720.000
5	Kabupaten Mojokerto	2.836.888	2.850.000	1.700.000
6	Kabupaten Malang	2.836.888	2.850.000	1.343.700
7	Kota Malang	2.836.888	2.850.000	1.340.300
8	Kota Batu	2.836.888	2.850.000	1.268.000
9	Kabupaten Jombang	2.836.888	2.850.000	1.200.000
10	Kabupaten Probolinggo	2.836.888	2.850.000	1.198.600
11	Kota Pasuruan	2.836.888	2.850.000	1.195.800
12	Kabupaten Tuban	2.836.888	2.850.000	1.144.400
13	Kota Kediri	2.836.888	2.850.000	1.128.400
14	Kabupaten Sampang	2.836.888	2.850.000	1.104.600
15	Kota Probolinggo	2.836.888	2.850.000	1.103.200
16	Kabupaten Jember	2.836.888	2.850.000	1.091.950
17	Kabupaten Kediri	2.836.888	2.850.000	1.089.950
18	Kabupaten Banyuwangi	2.836.888	2.850.000	1.086.400
19	Kabupaten Lamongan	2.836.888	2.850.000	1.075.700
20	Kabupaten Pamekasan	2.836.888	2.850.000	1.059.600
21	Kabupaten Situbondo	2.836.888	2.850.000	1.048.000
22	Kota Mojokerto	2.836.888	2.850.000	1.040.000
23	Kabupaten Bojonegoro	2.836.888	2.850.000	1.029.500
24	Kabupaten Lumajang	2.836.888	2.850.000	1.011.950
25	Kabupaten Tulungagung	2.836.888	2.850.000	1.007.900
26	Kabupaten Bangkalan	2.836.888	2.850.000	983.800
27	Kabupaten Sumenep	2.836.888	2.850.000	965.000
28	Kabupaten Madiun	2.836.888	2.850.000	960.750
29	Kabupaten Nganjuk	2.836.888	2.850.000	960.200
30	Kota Madiun	2.836.888	2.850.000	953.000



31	Kabupaten Blitar	2.836.888	2.850.000	946.850
32	Kabupaten Bondowoso	2.836.888	2.850.000	946.000
33	Kota Blitar	2.836.888	2.850.000	924.800
34	Kabupaten Ponorogo	2.836.888	2.850.000	924.000
35	Kabupaten Trenggalek	2.836.888	2.850.000	903.900
36	Kabupaten Ngawi	2.836.888	2.850.000	900.000
37	Kabupaten Pacitan	2.836.888	2.850.000	887.250
38	Kabupaten Magetan	2.836.888	2.850.000	866.250
39	DKI Jakarta	2.836.888	2.850.000	2.530.000

Menjaga Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Sosial

Bank memastikan setiap pegawai memiliki waktu yang cukup untuk keluarga dan kehidupan sosial. Selain cuti tahunan, pegawai wanita berhak untuk cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan dan pegawai laki-laki berhak untuk mengambil cuti selama 2 (dua) hari cuti untuk mendampingi istri yang melahirkan. Selama tahun 2013, sejumlah 70 pegawai wanita telah mengambil cuti melahirkan dan 100% dari mereka telah kembali bekerja. **(G4-LA3)**

Pengaduan Praktek Ketenagakerjaan (G4-LA16)

Selama tahun 2013, tidak ada pengaduan mengenai praktik ketenagakerjaan.

Aspek Penilaian Pemasok

Kegiatan usaha bank bergerak di bidang jasa perbankan sehingga tidak melakukan produksi.

Guna efektivitas waktu dan biaya terkait penggunaan material untuk pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari seperti kertas, tinta, air minum, alat tulis kantor dipenuhi oleh pemasok atau rekanan yang telah memenuhi kualifikasi kebutuhan bank **(G4-EC9)**.





Aspek Hak Asasi Manusia

Bank mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam melaksanakan kegiatan perbankan. Selama tahun 2013, tidak terdapat pengaduan mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (G4-HR12). Dalam melaksanakan kegiatan operasional, bank menghormati hak warga yang berada di wilayah sekitar wilayah kerja bank. Selama tahun 2013, tidak terdapat pengaduan terkait dengan hal tersebut. (G4-HR8)

Bank juga mengedepankan pemerataan kesempatan dalam melaksanakan rekrutmen dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap pegawai. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan terkait hal tersebut. (G4-HR3)

Perjanjian Investasi

Selama tahun 2013, belum ada perjanjian investasi yang secara khusus memuat klausul mengenai hak-hak asasi manusia. Walaupun demikian, bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap perjanjian investasi termasuk kepatuhan untuk melaksanakan nilai-nilai universal hak-hak asasi manusia (G4-HR1).

Pelatihan Hak Asasi Manusia

Pada tahun 2013, belum ada pegawai bank maupun tenaga keamanan yang mengikuti program pelatihan terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia (G4-HR2, G4-HR7).

ASPEK PEKERJA ANAK

Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen bank dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa Sekolah Menengah Atas/setingkat maupun mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, bank membuka program magang yang dapat diikuti dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas yang diberikan bukan pekerjaan sehari-hari yang merupakan tanggung jawab dari pegawai, tetapi membantu melaksanakan pekerjaan yang sifatnya administratif (G4-HR6). Penerimaan magang tersebut dilakukan dengan persyaratan, siswa telah mendapatkan surat/izin dari sekolah maupun universitas. Waktu pelaksanaan magang sesuai dengan permohonan dari sekolah atau universitas (tidak ditentukan oleh kebijakan bank) (G4-HR5).



Apresiasi untuk Nasabah

Transparansi Produk (G4-PR3)

Dengan makin berkembangnya produk dan jasa perbankan, maka nasabah dituntut untuk lebih memahami keuntungan dan kerugian produk/jasa yang ditawarkan oleh bank. Hal tersebut diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa “Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk bank dan bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).

Informasi mengenai karakteristik produk bank sekurang-kurangnya meliputi:

1. Nama produk bank;
2. Jenis produk bank;
3. Manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank;
4. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank;
5. Biaya-biaya yang melekat pada produk bank;
6. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan *margin* keuntungan;
7. Jangka waktu berlakunya produk bank;
8. Penerbit (*issuer/originator*) produk bank.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, tidak hanya mewajibkan bank untuk menyampaikan informasi yang

lengkap dan jelas kepada nasabah, namun juga mewajibkan bank untuk menjaga data nasabahnya.

Pelayanan Kepada Nasabah

Bank memberikan sarana untuk pelayanan nasabah melalui:

1. *Call Center* Bank (INFO BANK) dengan nomor akses 14044

Call Center merupakan salah satu bagian dalam organisasi bank yang memberikan pelayanan virtual kepada nasabah melalui media akses telepon. Bentuk pelayanan perbankan 24 jam dalam 7 hari seminggu yang bertujuan untuk memberikan pelayanan perbankan yang lebih mudah, cepat, aman dan nyaman melalui telepon. Adapun fasilitas yang dapat diperoleh dari *Call Center* 14044 adalah:

- Info produk tabungan/pinjaman baik konvensional/syariah
- Blokir kartu ATM
- Info saldo dan 5 transaksi terakhir keuangan melalui mesin IVR (*Interactive Voice Response*)

2. *SMS Banking*

SMS Banking adalah layanan perbankan elektronik untuk mengakses informasi rekening nasabah dan melakukan transaksi dengan menggunakan sarana *ponsel* atau *handphone* atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu layanan perbankan berbasis teknologi selular yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi



perbankan di mana dan kapan saja. Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah maka pada akhir tahun 2013, *SMS Banking 3388* berubah menjadi *SMS Banking 3366* dengan tambahan fitur yang lebih lengkap antara lain transfer rekening antar bank, pembayaran dan pembelian pulsa dengan penambahan beberapa *telco*.

1. *Payment Point Samsat*

Merupakan fasilitas pelayanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin yang dalam hal ini berupa pajak kendaraan bermotor. *Payment point* ini menyediakan layanan selama 6 hari kerja (Senin-Sabtu) dan untuk mempermudah nasabah, pembayaran dilakukan melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*)

2. Website www.bankjatim.co.id

Website memuat berita/informasi terkini yang merupakan serangkaian kegiatan bank. Informasi pada *website* meliputi perubahan suku bunga, simpanan, suku bunga dasar kredit yang selalu *diupdate* berdasarkan aturan yang diberlakukan.

Menu pada *website* bank sebagai berikut:



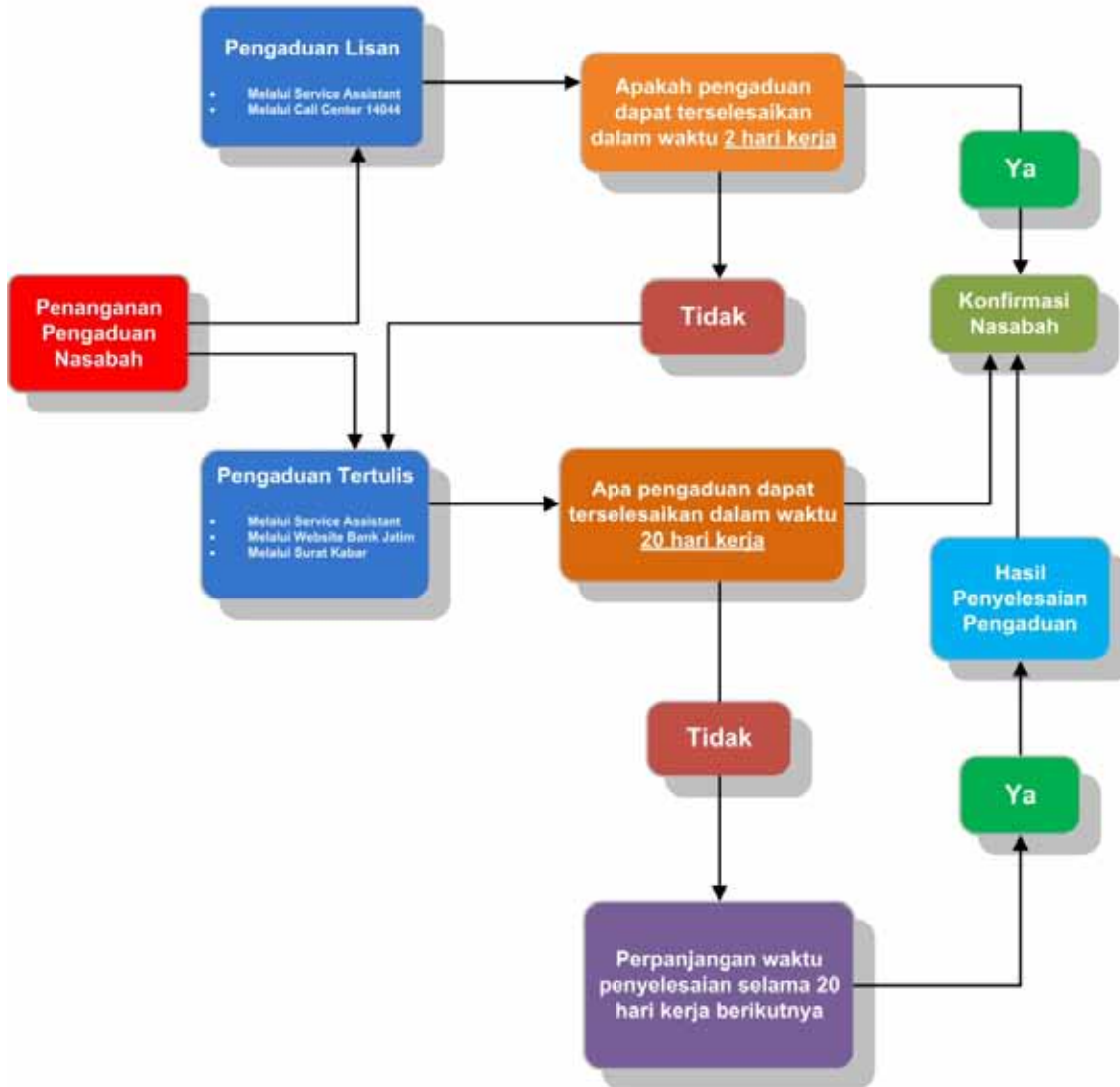
Menu Hubungi Kami merupakan sarana untuk mengakomodir saran, informasi dan pengaduan. Selain *website*, bank juga menggunakan media sosial *facebook* dengan alamat Bank Jatim dan *twitter* dengan alamat @bank_jatim.

3. Surat resmi yang ditujukan kepada bank yang dapat disampaikan melalui pos, *faximile* maupun dikirim secara langsung.



MEKANISME PENGADUAN NASABAH

Standar Penanganan Pengaduan Nasabah
PBI : 7/7PBI/2005/ & 10/10/PBI/2008



Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan

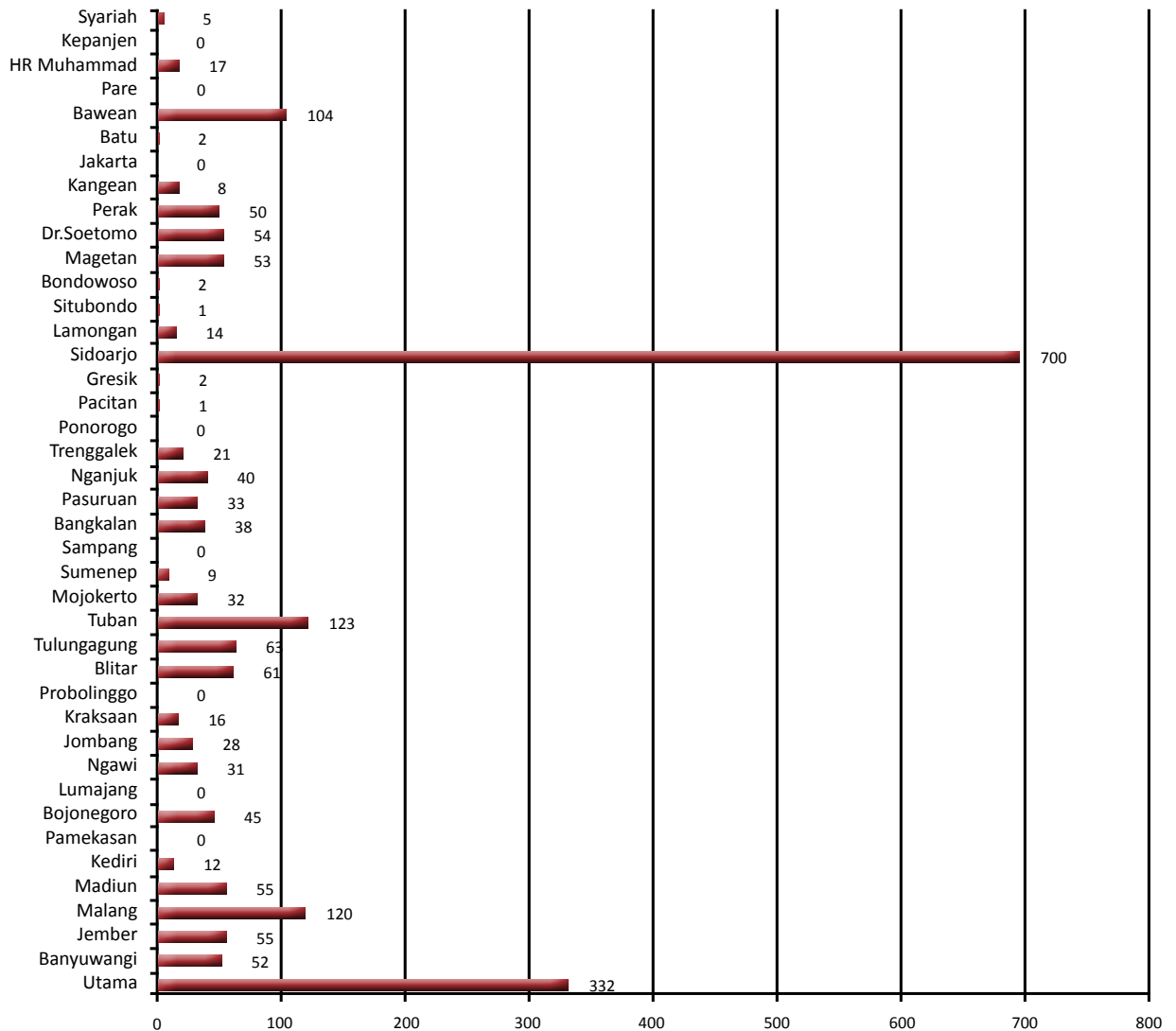
Adapun satuan kerja yang bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah adalah sebagai berikut:

- a. *Corporate Secretary*, terutama dalam pengadministrasian, penyampaian Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan secara triwulanan kepada Bank Indonesia; dan
- b. Pemimpin Bidang Operasional Kantor Cabang, terutama dalam hal penyelesaian pengaduan yang meliputi

pengaduan yang menyangkut tentang operasional Kantor Cabang dalam menjalankan kebijakan/ketentuan seluruh aktivitas fungsional bank yang ditetapkan manajemen, menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan secara bulanan ke *Corporate Secretary*, menerima dan menatausahakan penanganan pengaduan.

**JUMLAH PENGADUAN NASABAH SELAMA TAHUN 2013 (G4-PR8)**

Pengaduan nasabah terkait dengan tarik tunai, gagal transfer, pembelian pulsa, pembayaran PBB dan telepon, CDM, pembelanjaan EDC, kartu tertelan sebagai berikut:





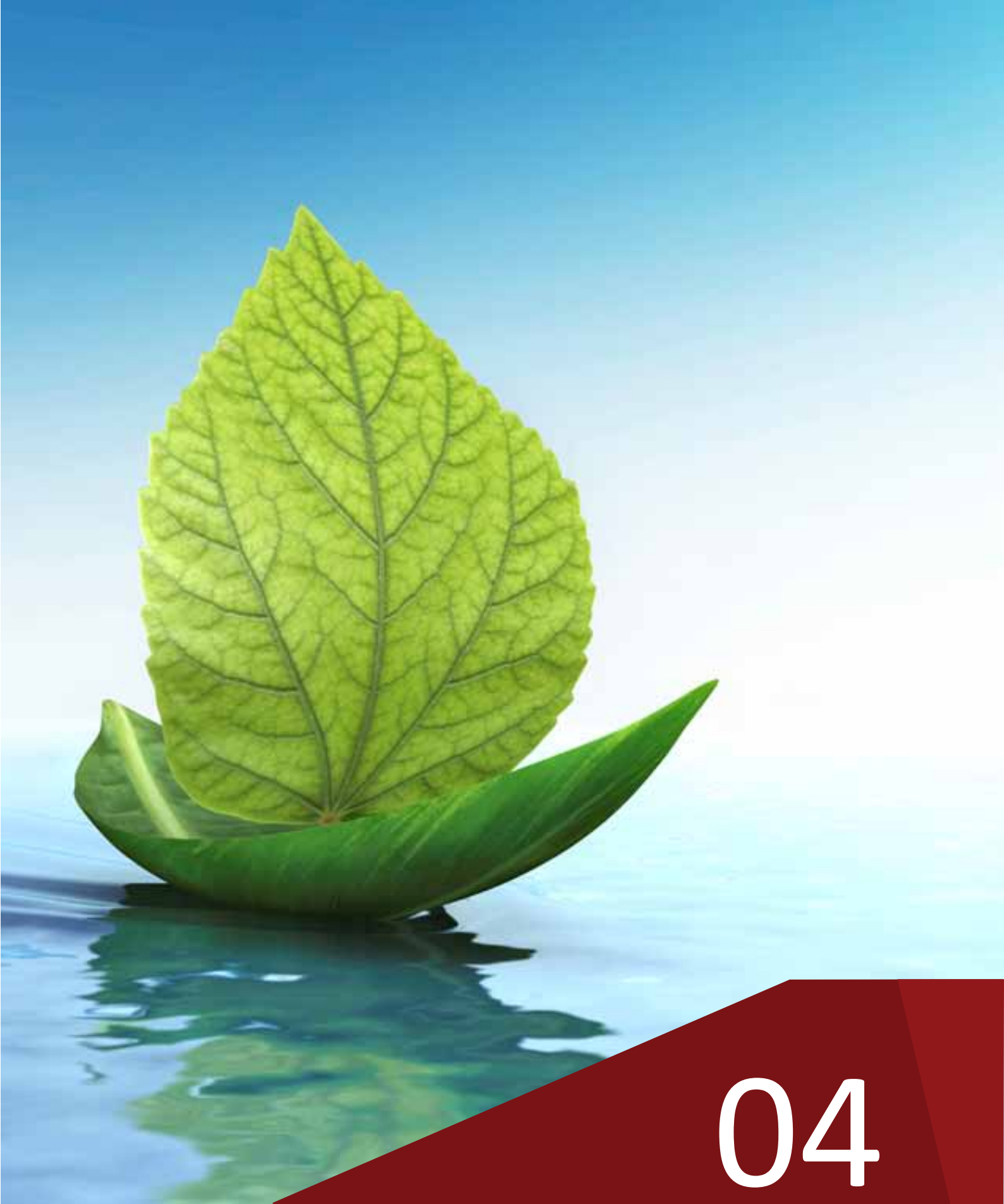
MEMASTIKAN KEPUASAN NASABAH (G4-PR5)

Bank melaksanakan survei kepuasan nasabah dengan parameter mengetahui atribut *performance* dan *positioning bank relative* terhadap pesaing-pesaingnya, mengetahui transaksi utama bank, *switching rate* dan ketertarikan untuk menggunakan produk bank, mengevaluasi kebiasaan dan perilaku nasabah yaitu frekuensi, waktu, dan tujuan dalam melakukan transaksi pada tahun 2013. Survei tersebut dilakukan oleh bank bekerja sama dengan PT Kompakindo Media Dewata (Innovate) untuk mengumpulkan informasi dari para nasabah sekaligus mengukur tingkat kepuasan mereka. Bank menggunakan informasi-informasi yang diperoleh dari survei ini untuk menggali kebutuhan, keinginan dan motivasi nasabah dalam menggunakan layanan bank berupa *value added service*, menganalisa tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah serta prioritas perbaikan layanan. Survei kepuasan nasabah dilakukan di seluruh cabang bank. Selain itu untuk menjaga konsistensi layanan yang diberikan kepada nasabah, bank secara rutin melaksanakan *Mystery Shopping* bekerjasama dengan Markplus

Insight dengan parameter mengukur layanan pada aspek *People* (*Service Assistant, Teller, Satpam* dan telepon) serta *Premises* (kenyamanan ruangan, peralatan *banking hall*, ATM, dan toilet).

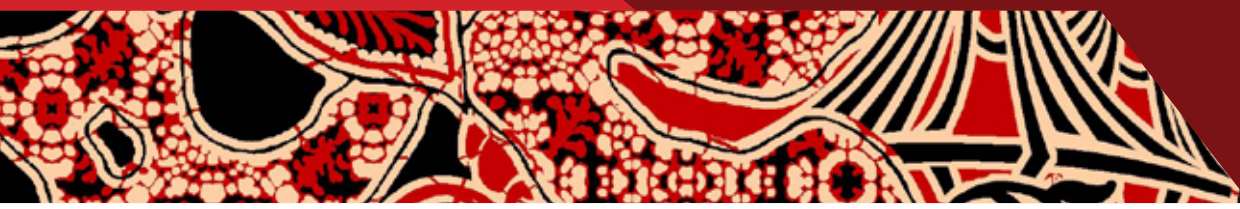
Penghargaan yang diperoleh terkait pelayanan kepada nasabah pada tahun 2013 antara lain:

- Surabaya *Service Excellence Award* 2013 (SSEA) pada kategori *Conventional Banking* (aset < 150 Triliun) oleh Markplus Insight.
- Peringkat II *Overall* pada *Indonesian Bank Loyalty Index* (IBLI) 2012-2013 yang diukur oleh Markplus Insight bekerja sama dengan INFO BANK.
- Peringkat I Dimensi *Transaction* pada *Indonesian Bank Loyalty Index* (IBLI) 2013 untuk *Regional Development Bank (Saving)*
- Peringkat I Dimensi *Customer Satisfaction* pada *Indonesian Bank Loyalty Index* (IBLI) 2013 untuk *Regional Development Bank (Saving)*
- *The Best of Indonesian Service to Care Champion* 2013.



04

**KEBERLANJUTAN
KINERJA LINGKUNGAN**





Lingkungan



Isu lingkungan hidup dan perubahan iklim sebagai fenomena *global warming* merupakan tantangan lingkungan terbesar yang dihadapi oleh dunia saat ini

Perubahan iklim yang dihadapi perlu disikapi dengan memperdalam pemahaman tentang proses kejadiannya secara alamiah, baik penyebab maupun dampaknya terhadap manusia maupun lingkungan

Penghematan energi pada aktivitas perusahaan merupakan bentuk mitigasi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan



Konsumsi Energi



INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN

Material

Material utama yang digunakan oleh bank sebagai perusahaan yang bergerak di sektor perbankan adalah kertas, alat tulis, tinta *printer*, tinta mesin fotokopi yang dipergunakan untuk operasional sehari-hari.

Konsumsi Energi

Penggunaan energi untuk aktivitas perusahaan antara lain energi listrik, air, *freon* dan bahan bakar minyak (G4-EN3). Perusahaan menggunakan energi listrik untuk kebutuhan operasional kantor dan balai diklat. Manajemen berkomitmen secara konsisten melakukan penghematan konsumsi energi dengan menginstruksikan melalui Surat Edaran Bank Nomor:046/019/SE/DIR/UM tanggal 7 Oktober 2008 perihal: Pelaksanaan Penghematan Energi & Air serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (G4-EN6, G4-EN7).

Limbah

Dari aktivitas perusahaan, limbah yang dihasilkan berupa:

NO	JENIS LIMBAH	METODE PEMBUANGAN
1	Limbah kertas, tinta <i>printer</i> , tinta mesin fotokopi dan alat tulis lainnya	Melalui jasa pengelolaan sampah oleh dinas kebersihan daerah
2	Limbah air kotor	Pengelolaan air kotor menggunakan sistem <i>septictank</i> yang kemudian akan dikelola menggunakan jasa pihak ketiga

Air

Penggunaan air di bank adalah untuk konsumsi seperti air minum dan operasional perusahaan dari PDAM seperti *toilet*, *fire hydrant* dan lain-lain.

Emisi Gas Rumah Kaca

Kenaikan konsentrasi gas CO₂ dan gas-gas lainnya di atmosfer menyebabkan efek rumah kaca. Bank menyadari bahwa penggunaan bahan bakar minyak untuk transportasi **sangat** berpotensi menimbulkan efek rumah kaca (G4-EN30).

Salah satu emisi bahan kimia yang merusak ozon adalah CFC yang biasanya digunakan sebagai media pendingin.

Emisi Gas NO_x dan SO_x

Pembakaran yang tidak sempurna dari kendaraan bermotor menimbulkan senyawa gas NO_x



Biodiversitas

Lokasi kantor bank tidak ada yang berdekatan dengan daerah yang dilindungi atau yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi (G4-EN11). Usaha bank tidak ada yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam sehingga dalam aktivitasnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi (G4-EN 12) maupun terhadap spesies dengan tingkat risiko tinggi kepunahan (G4-14). Meskipun usaha bank tidak terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, bank berkomitmen melakukan pemulihan dan perlindungan terhadap lingkungan dengan:

NO	KEGIATAN PEMULIHAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN (G4-EN13)	TEMPAT PELAKSANAAN	BIAYA YANG DIALOKASIKAN (dalam jutaan Rupiah) (G4-EN31)
1.	Pemberian 10 set tempat sampah basah dan kering	Kabupaten Trenggalek	6
2.	Pemberian 1 unit mobil <i>skywalker</i> untuk memotong daun dan ranting pohon	Kota Surabaya	847
3.	Pemberian 15 unit gerobak sampah dan 20 bak sampah	Kota Probolinggo	67,50
4.	Penanaman 200 batang pohon	Kabupaten Sumenep	10
5.	Pembangunan jaringan air bersih	Kabupaten Lumajang	185
6.	Pemberian 50 unit bak sampah pemilah	Kota Pasuruan	55
7.	Pemberian 30 tempat sampah <i>outdoor</i> , 20 buah tempat sampah <i>indoor</i> dan 10 buah asbak berdiri	Kabupaten Kediri	95,50
8.	Pemberian 1 unit mobil <i>dump truck</i> untuk pembuangan limbah kotoran hewab	Kota Surabaya	345
9.	Pemberian 50 unit gerobak sampah	Kabupaten Lamongan	132,55
10.	Pemberian 64 pot bunga	Kabupaten Ponorogo	22,40
JUMLAH BIAYA YANG DIALOKASIKAN			1765,95

Dampak Lingkungan Terkait Produk dan Jasa

Bank tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Baik produk maupun jasa perbankan tidak berdampak signifikan terhadap lingkungan (G4-EN27) sedangkan aktivitas terkait penggunaan air, energi dan bahan bakar yang berdampak terhadap lingkungan telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Konsumsi Energi, Air dan Emisi Gas Rumah Kaca

Keluhan Terhadap Dampak Lingkungan (G4-EN34)

Sampai saat ini, tidak terdapat pengaduan terkait dampak lingkungan karena aktivitas bank (G4-SO10).

Kepatuhan Terhadap Peraturan Lingkungan (G4-EN29)

Selama tahun 2013, bank tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan (G4-SO8).



05

TATA KELOLA PERUSAHAAN





Visi dan Misi Bank (G4-56)

Visi bank:

1. Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar
2. Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional

Misi bank:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah
2. Memperoleh laba optimal



Motto dan Slogan

Motto (G4-56)

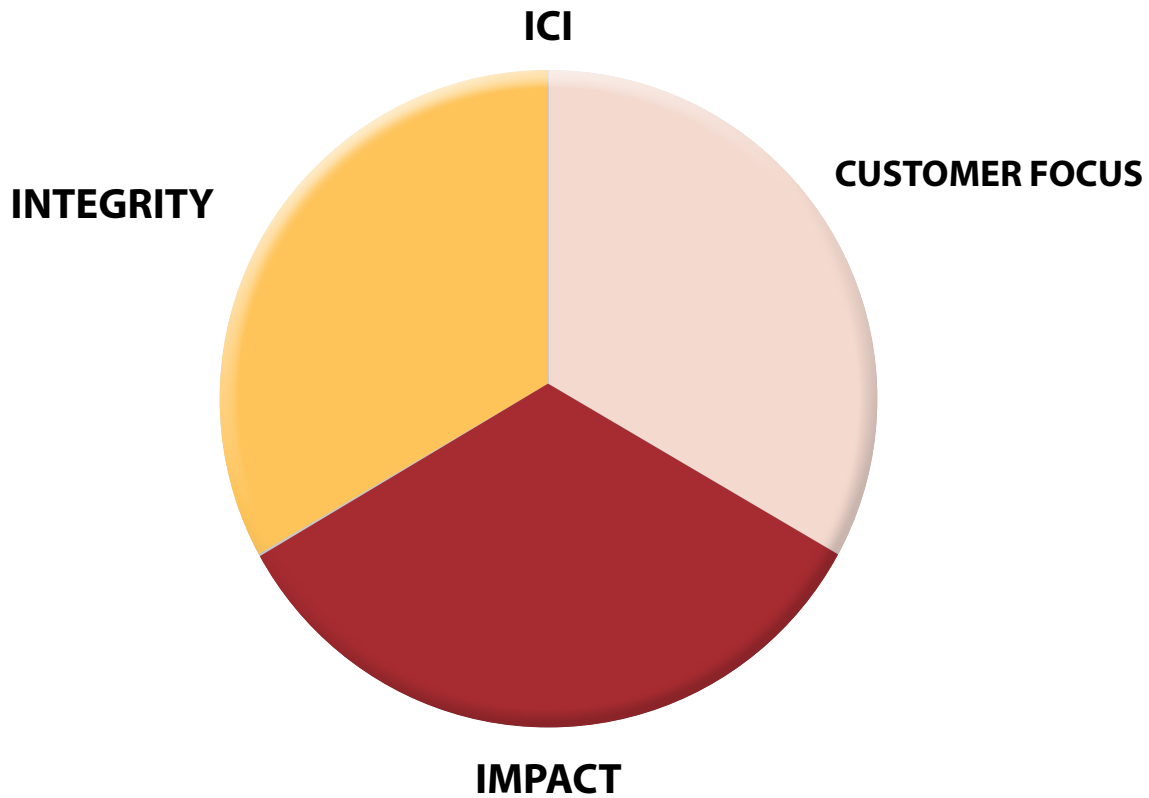
Bank memiliki motto "bersama kami berkembang pasti" yang memiliki pengertian dimana dalam rangka mengangkat kebersamaan antara nasabah dan bank untuk berkembang ke arah yang lebih baik diperlukan keharmonisan antara bank dengan nasabah, sehingga bank memberikan komitmen untuk membantu setiap nasabah yang mempercayakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan untuk berkembang menuju kehidupan yang lebih baik.

Slogan (G4-56)

"Bank Jatim Banknya Masyarakat Jawa Timur" artinya bank mempunyai niatan untuk menyejahterakan para pemilik, nasabah, seluruh karyawan dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya dengan disertai tanggung jawab, dedikasi, integritas, profesionalisme yang tinggi dari masing-masing personal.



Budaya Perusahaan (G4-56)



Integrity

1. Menunjukkan kejujuran.
2. Menjaga komitmen.
3. Berperilaku secara konsisten.

Customer Focus

1. Berusaha untuk memahami dan mendidik pelanggan.
2. Mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan pelanggan.
3. Membuat sistem umpan balik bagi pelanggan/hubungan yang kolaboratif.

Impact

1. Berpakaian yang pantas.
2. Menampilkan sikap profesional.
3. Berbicara penuh percaya diri.



Makna Logo (G4-56)



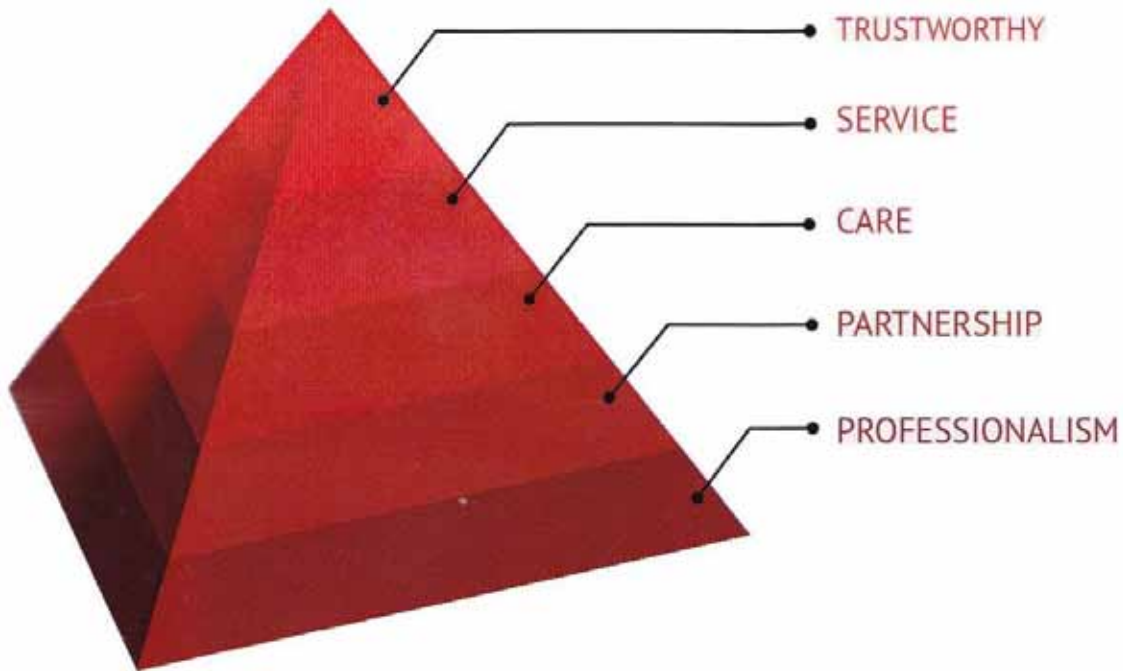
Inspirasi bentukan dari logo bank merupakan sayap Burung Garuda yang mengepak ke atas sebagai tanda siap terbang. Burung Garuda adalah lambang nasional Indonesia. Dalam mitologi Jawa, Burung Garuda adalah “*Bird of Life*” atau burung kehidupan yang membawa kemuliaan.

Sayap adalah anggota tubuh yang bersifat aerodinamis dan sebagai penyeimbang ketika hendak terbang. Fungsi inilah yang ingin dicerminkan dalam logo bank dengan harapan bank dapat terbang tinggi menuju *goal* yang diinginkan, serta terjadi keseimbangan perekonomian dana yang diperoleh dari *lending* yaitu dana pemerintah serta *funding* yaitu dana yang diperoleh dari publik sehingga tercipta perekonomian berazaskan kerakyatan.





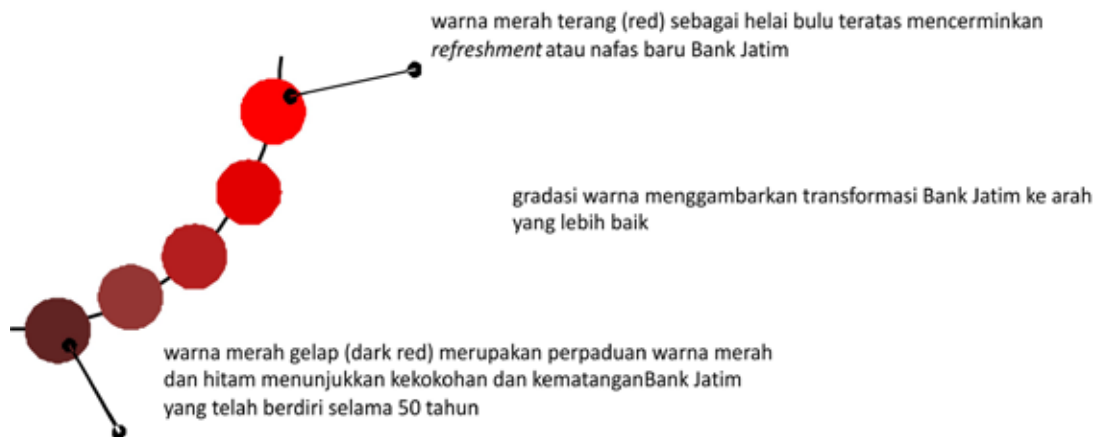
Strategi bank dalam mencapai *goal Regional Champion*



Bank berpegang pada kerjasama berbasis profesionalisme yang memahami dalam melayani, untuk meraih kepercayaan nasabah menuju predikat *regional champion bank*.

Merah adalah warna yang merepresentasikan keberanian hidup, kekuatan dan kepemimpinan. Warna merah juga menggambarkan energi, semangat perjuangan yang tiada henti.

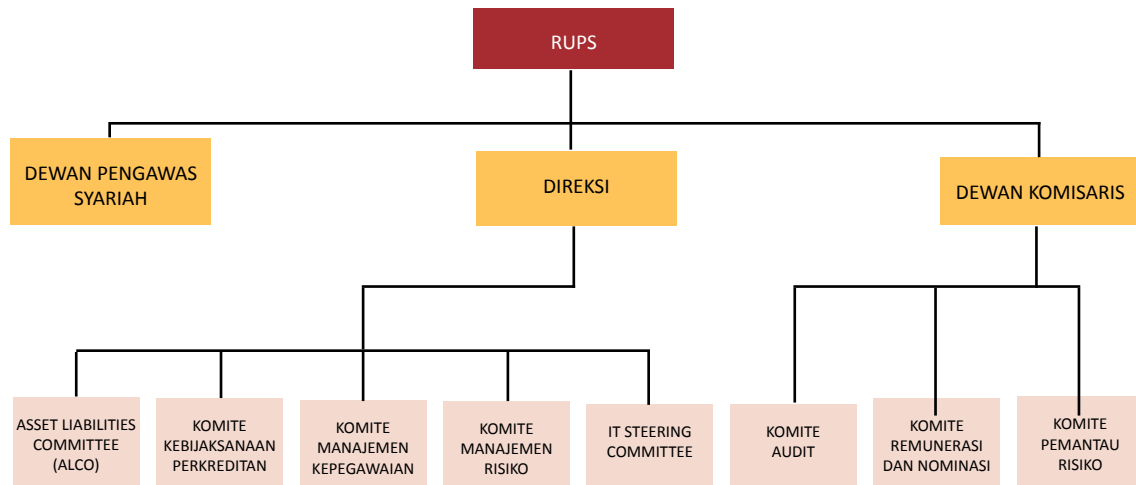
Merah adalah warna yang dominan di dalam spektrum warna sehingga terlihat menonjol bila dibandingkan dengan warna-warna lain, maknanya adalah menggambarkan bank sebagai bank unggulan.





Tata Kelola Perusahaan

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN (G4-34)



Rapat Umum Pemegang Saham (G4-40, G4-49):

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

Baik Direksi maupun Dewan Komisaris dipilih dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi (G4-40):

Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan.

Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi:

1. Persyaratan Umum:

Warga Negara Indonesia yang:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

- c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan tercela di bidang perbankan;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.

2. Persyaratan Khusus:

Bagi anggota Direksi yang diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rinci dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.

3. Persyaratan Lainnya:

- a. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
- b. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



Komite Direksi:

ASSET LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Beranggotakan Direksi dan Divisi. Divisi terkait yang diangkat dan diberhentikan melalui Surat Keputusan Direksi.

Wewenang dan tanggung jawab *ASSET LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)*:

1. Melakukan pengembangan, kaji ulang dan modifikasi strategi ALMA;
2. Melaksanakan evaluasi posisi risiko suku bunga bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga;
3. Melakukan kaji ulang penetapan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca bank sesuai dengan strategi ALMA;
4. Melakukan kaji ulang deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan Rencana Bisnis Bank;
5. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan

ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;

6. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap sistem, skenario dan asumsi yang mendasari kebijakan dan keputusan ALCO khususnya terhadap perubahan eksternal seperti ketentuan yang berlaku, kondisi pasar dan perilaku nasabah;
7. Memantau dan mengarahkan hubungan bisnis antara bank dengan nasabah terutama dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan harga, penetapan fasilitas kredit, mengkaji ulang dan menyempurnakan strategi dan program pemasaran;
8. Menetapkan tujuan, membuat kebijakan dan keputusan *Asset & Liabilities Management* bank berdasarkan hasil pertemuan rutin ALCO;
9. Memantau dan menelaah hasil pelaksanaan kebijakan *Asset & Liabilities Management* oleh unit-unit kerja terkait di dalam organisasi bank.

Selama tahun 2013, ALCO telah mengadakan 9 kali pertemuan dan melakukan pembahasan hal-hal berikut ini:

NO	BENTUK PEMBAHASAN (G4-50)
1	Analisa perekonomian dunia, ekonomi makro dan moneter Indonesia serta dampaknya terhadap sektor perbankan nasional khususnya terhadap kondisi (pencapaian kinerja, rencana bisnis, kondisi likuiditas) bank
2	Analisa kinerja keuangan bank tahun 2013 dibandingkan dengan kinerja di tahun sebelumnya
3	Merumuskan <i>action plan</i> perusahaan dalam rangka pencapaian target tahun 2013 serta sasaran rencana bisnis lainnya
4	Perubahan <i>List of Term & Condition</i> bank dan <i>me-repricing</i> suku bunga dana maupun kredit agar dapat bersaing di pasar perbankan nasional
5	<i>Strategic plan</i> yang menunjang bisnis bank untuk memenangkan persaingan dan menjadi BPD <i>Regional Champion</i>

Komite Kebijaksanaan Perkreditan

Komite Kebijaksanaan Perkreditan beranggotakan Direksi dan Divisi-Divisi terkait yang diangkat dan diberhentikan melalui Surat Keputusan Direksi.

Komite Kebijaksanaan Perkreditan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membuat strategi perkreditan;
2. Membuat langkah pengendalian perkreditan;
3. Mengadakan pertemuan untuk membahas bersama hal-hal yang ditemukan di lapangan guna menyempurnakannya termasuk mekanisme yang ada.



Wewenang dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan:

1. Mendukung kelancaran dan keamanan pemberian kredit yang sehat;
2. Menetapkan strategi, tujuan, membuat kebijakan dan keputusan Komite Kebijakan Perkreditan berdasarkan hasil pertemuan rutin Komite Kebijakan Perkreditan;
3. Memantau dan menelaah hasil pelaksanaan kebijakan Komite Kebijakan Perkreditan oleh unit-unit terkait di dalam organisasi bank;
4. Menetapkan langkah-langkah pengendalian intern yang memadai.

Selama tahun 2013, Komite Kebijakan Perkreditan tidak mengadakan kegiatan apapun (G4-50). Dalam perkembangan selanjutnya, dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang berlaku saat ini, maka semua aktivitas Komite Kebijakan Perkreditan yang berkaitan dengan perkreditan baik penambahan dan/atau perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan perkreditan diagendakan dalam Rapat Komite Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk mendapatkan keputusan dari Komite Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian beranggotakan seluruh Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan pada PBI.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Kepegawaian:

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direksi dalam rangka mengambil keputusan tentang kepegawaian yang sifatnya sangat penting dan menyeluruh bila diperlukan dalam rangka penyempurnaan manajemen sumber daya manusia. Adapun wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Direksi mengenai pengangkatan/mutasi Pemimpin Sub Divisi, Pemimpin/Wakil Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang

Pembantu yang termasuk dalam jalur utama (*line management*) yang diusulkan oleh Divisi Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebijakan manajemen karir yang telah ditetapkan;

2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang keadaan calon pegawai setelah melalui proses wawancara dalam hal penerimaan pegawai baru;
3. Memberikan masukan dan pendapat kepada Direksi atas usulan promosi jabatan dan mutasi jabatan, jika diminta oleh Direksi; dan
4. Mengkaji kembali setiap promosi jabatan. Selama tahun 2013, Komite Manajemen Kepegawaian mengadakan rapat 1 kali dengan pembahasan mengenai promosi jabatan dan mutasi pegawai (G4-50).

Komite Manajemen Risiko (G4-45)

Komite Manajemen Risiko beranggotakan Direksi beserta para Pemimpin Divisi terkait dan *Corporate Secretary* yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim dalam rangka meminimalisir risiko kerugian sejalan dengan berkembangnya usaha bank. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko:

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal tidak normal. Penyusunan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pemimpin Satuan Kerja Operasional dan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko;
2. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapannya;
3. Melakukan penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan



1. dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan. Justifikasi disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha tertentu dari bank.

Komite Manajemen Risiko juga mempunyai tugas yang terinci sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya termasuk *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal tidak normal;
2. Memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan penerapan manajemen risiko, baik secara berkala atau secara insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank;
3. Menetapkan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti:
 - a. Keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - b. Pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan sebelumnya;
4. Menetapkan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi pada setiap produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi serta kompleksitas usaha bank;

5. Menetapkan penggunaan metode pengukuran risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional bank;

6. Menetapkan pelaporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai pertimbangan pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan prinsip kehati-hatian bank;

7. Menetapkan limit dan toleransi risiko yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan bank;

8. Menetapkan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko bank;

9. Menetapkan sistem pengendalian intern untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku (*compliance risk*), dan tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional bank serta efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi bank;

10. Menetapkan penilaian peringkat risiko, sebagai dasar perbaikan produk, transaksi perbankan dan area aktivitas fungsional tertentu, serta evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko;

11. Menyusun rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal bank yang terburuk sehingga kelangsungan usaha bank dapat dipertahankan.





Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2013, Komite Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan di antaranya (G4-45, G4-50):

1	Memberikan persetujuan atas penyempurnaan BPP Pengadaan Barang/Jasa
2	Memberikan persetujuan mengenai usulan revisi kriteria nilai dan menyisipkan faktor pengurang pada BPP Kinerja Pegawai pada point: a. Kategori pencapaian BPP Kinerja Pegawai; b. Penambahan baris dibawah total nilai KPI terbobot sebagai faktor pengurang total nilai KPI terbobot bagi pegawai yang kena sanksi administratif, sehingga hasil akhir total nilai KPI terbobot yang dipakai sebagai dasar untuk mengusulkan imbalan hasil kinerja; c. Kategori faktor pengurang, pengurangan akan dilakukan setelah diterbitkannya dokumen yang dipakai sebagai dasar pengurangan nilai.
3	Memberikan persetujuan mengenai Draft SE Direksi tentang Alih Pos Anggaran Pembelian Barang Modal dan Pos Biaya
4	Memberikan persetujuan atas penyempurnaan BPP Kredit (Laguna, Kredit Pegawai Bank Jatim, Multiguna, Pundi Kencana, KUR, Multiguna Syariah, Kredit <i>Stanby Loan</i> dan Kredit Modal Kerja Pola Keppres, Kredit Produktif Mikro & Kecil "Kredit KPR Umum, KPR Swadaya (KPRS), KPR/KPRS Mikro")
5	Memberikan persetujuan mengenai revisi kriteria nilai dalam kategori penilaian pada BPP Kinerja Pegawai
6	Memberikan persetujuan mengenai revisi kriteria nasabah prima
7	Memberikan persetujuan atas penyempurnaan BPP KLE iB Barokah
8	Memberikan persetujuan atas penyempurnaan BPP Gadai iB Barokah
9	Memberikan persetujuan atas penyempurnaan BPP Penyelenggara Kliring Lokal Selain BI
10	Memberikan persetujuan mengenai draft SE Direksi tentang Alih Pos Anggaran.ft
11	Memberikan persetujuan mengenai draft BPP Pembiayaan Multiguna Syariah
12	Memberikan persetujuan mengenai pemberian fasilitas pembiayaan pola syariah kepada pegawai bank
13	Memberikan persetujuan mengenai penetapan <i>limit settlement</i> terhadap transaksi melalui estim untuk Pemimpin Cabang, Cabang Pembantu dan Pemimpin Bidang Operasional (PBO) syariah
14	Memberikan persetujuan mengenai pergantian buku antar cabang
15	Memberikan persetujuan mengenai ketentuan CEF jaminan
16	Memberikan persetujuan mengenai perubahan KPR iB Barokah
17	Memberikan persetujuan atas perubahan BPP Pembiayaan Konsumsi Talangan Haji
18	Memberikan persetujuan mengenai pengisian formulir KPI
19	Memberikan persetujuan mengenai penentuan batas waktu kelulusan sertifikasi manajemen risiko
20	Memberikan persetujuan mengenai penggantian biaya kacamata dan biaya partus
21	Memberikan persetujuan atas penyesuaian BPP SKNBI
22	Memberikan persetujuan atas revisi BPP ATM (terkait: <i>Card Management System</i> dan penyelesaian selisih ATM)
23	Memberikan persetujuan mengenai usulan perhitungan CKPN kredit sindikasi
24	Memberikan persetujuan mengenai usulan produk baru (<i>Umroh iB Maqbulah</i> dan <i>Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik</i>)
25	Memberikan persetujuan mengenai usulan perubahan uang makan
26	Memberikan persetujuan atas pembahasan pedoman kerja pelaksanaan ibadah haji
27	Memberikan persetujuan mengenai usulan tentang pemberian kewenangan limit pada Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi
28	Memberikan persetujuan mengenai pedoman <i>Loss Event Database</i>
29	Memberikan persetujuan atas usulan draft Buku Pedoman Pelaksanaan SMS Banking 3366

Frekuensi Rapat KOMENKO selama tahun 2013 adalah 8 kali



IT Steering Committee

IT Steering Committee bertugas memberikan masukan kepada Direksi dan manajemen mengenai strategi IT dan membantu manajemen dalam pelaksanaan strategi IT, mengawasi manajemen harian dan penyediaan layanan IT dan proyek IT. *IT Steering Committee* beranggotakan Direksi seluruh Pemimpin Divisi dengan Direktur Utama sebagai Ketua sekaligus merangkap Anggota, sedangkan Pemimpin Divisi Teknologi Informasi berperan sebagai Sekretaris sekaligus merangkap Anggota.

Wewenang dan Tanggung Jawab *IT Steering Committee*:

IT Steering Committee bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi mencakup:

1. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di bank;
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI;

4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*;
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha bank;
6. Memonitor status proyek dan memecahkan masalah sumber daya terkait IT;
7. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank;
8. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI;
9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara;
10. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki bank.

Pelaksanaan Kegiatan *IT Steering Committee*

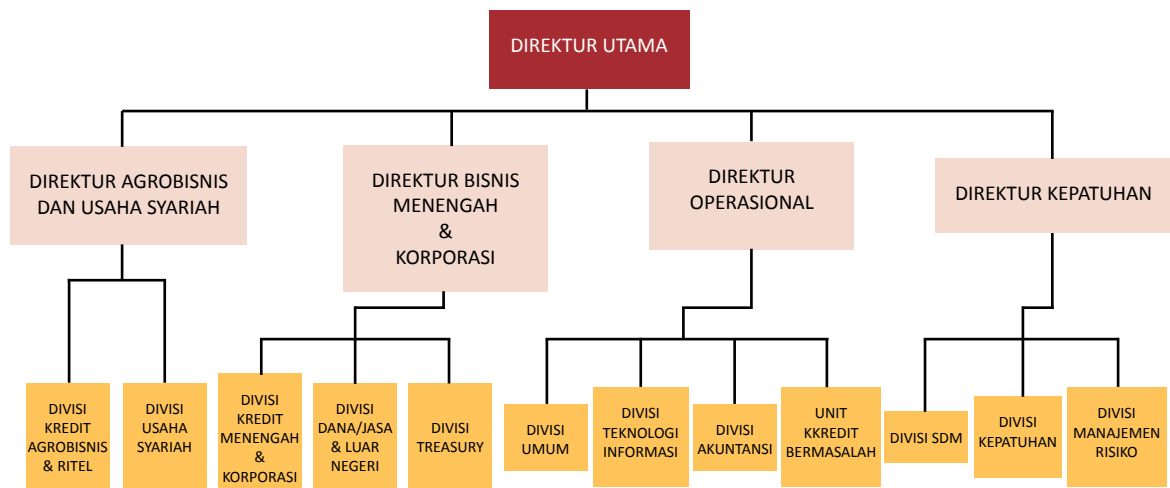
Pada tahun 2013, *IT Steering Committee* telah melakukan pembahasan di antaranya:

NO	BENTUK PEMBAHASAN (G4-50)
1	Laporan pengembangan dan operasional Teknologi Informasi
2	Rencana kerja teknologi informasi dan pencapaiannya selama tahun 2013
3	Upaya peningkatan IT Security dan pemenuhan IT Governance
4	Pengembangan aplikasi, seperti ALMA, <i>Internet Banking</i> dan SMS Banking
5	Kajian atas <i>Core Banking System</i>
6	Rencana Pengembangan Teknologi Informasi 2011-2013 yang meliputi <i>Core Banking System, Switching System, Internet Banking, SMS Banking, Loan Originating System, Host Computer</i> dan penyempurnaan kebijakan di bidang teknologi informasi

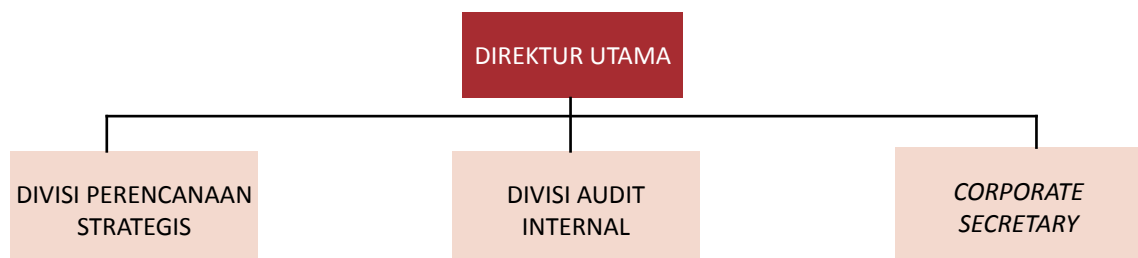
Frekuensi Rapat *IT Steering Committee* selama tahun 2013 adalah 3 kali.



Struktur Organisasi Direksi (G4-34):



Terdapat beberapa Divisi yang langsung dibawah oleh Direktur Utama yaitu:



Pada tanggal 3 September 2013, bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehingga terdapat perubahan pada komposisi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Komposisi Direksi Bank selama Tahun 2013 meliputi:(G4-LA12, G4-38)

Pada tanggal 3 September 2013, bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehingga terdapat perubahan pada komposisi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Komposisi Direksi Bank Jatim 1 Januari 2013-3 September 2013 meliputi:(G4-LA12, G4-38)

Nama/Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
Hadi Sukrianto Laki-Laki	Direktur Utama	Sarjana Muda Akuntansi Akademi Akuntansi YKPN Sarjana Ekonomi STIE Surabaya Magister Manajemen Universitas 17 Agustus Surabaya
Partono*) Laki-Laki	Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah	Strata 1 Jurusan Administrasi Magister Manajemen
Djoko Lesmono Laki-Laki	Direktur Bisnis Menengah & Korporasi	Sarjana Ekonomi STIE Satya Widya Surabaya Magister Manajemen Universitas Jember
Eko Antono Laki-Laki	Direktur Operasional	Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya Magister Manajemen Universitas 17 Agustus Surabaya
Suparlan*) Laki-Laki	Direktur Kepatuhan	Strata 1 Jurusan Ilmu Administrasi Magister Manajemen

*) Tidak lagi menjabat sejak tanggal 3 September 2013



Komposisi Direksi Bank Jatim 3 September 2013-31 Desember 2013 meliputi:(G4-LA12, G4-38)

Nama/Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
Hadi Sukrianto	Direktur Utama	Sarjana Muda Akuntansi Akademi Akuntansi YKPN
Laki-Laki		Sarjana Ekonomi STIE Surabaya
Tony Sudjiaryanto*)	Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah	Magister Manajemen Universitas 17 Agustus Surabaya
Laki-Laki		Sarjana Jurusan Teknik Sipil Institut Sepuluh November Surabaya
Djoko Lesmono	Direktur Bisnis Menengah & Korporasi	Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya
Laki-Laki		Sarjana Ekonomi STIE Satya Widya Surabaya
Eko Antono	Direktur Operasional	Magister Manajemen Universitas Jember
Laki-Laki		Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Rudie Hardiono*)	Direktur Kepatuhan	Magister Manajemen Universitas 17 Agustus Surabaya
Laki-Laki		Sarjana Ekonomi STIKI Surabaya
		Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya
		Short Course Organizational Finance & Budgeting di Australian National University

*) Efektif sebagai Direktur Kepatuhan dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*)

Direktur Utama memiliki peran untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi, memberikan pengarah, pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh unit kerja bank, baik Divisi maupun Kantor Cabang untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan mengacu pada arahan strategis yang telah disetujui Dewan Komisaris, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Divisi dan Kantor Cabang berdasarkan asas keseimbangan dan keserasian, mengorganisir, mengarahkan dan memastikan pengembangan fungsi Divisi Perencanaan Strategis, *Corporate Secretary* dan Divisi Audit Intern secara efektif dalam menjalankan fungsinya untuk turut mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan *target* bank. Direktur Utama membawahi Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Audit Intern dan *Corporate Secretary* (G4-35, G4-36).

1. Divisi Perencanaan Strategis

Divisi Perencanaan Strategis bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengembangan arahan strategis bank sehubungan dengan pernyataan visi dan misi bank untuk ditetapkan oleh Direksi sebagai arahan strategis bank secara berkala, mensinergikan penyusunan dan evaluasi dari rencana bisnis dan anggaran, pengembangan organisasi dan perencanaan sumber daya manusia agar selaras dengan arah dan perkembangan bisnis bank (G4-42).

2. Divisi Audit Intern

Divisi Audit Intern berperan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan, serta pengendalian aktivitas bank, dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan harta milik bank, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha serta mendorong dipatuhinya peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan manajemen yang berlaku, memberikan gambaran menyeluruh tentang



perkembangan usaha dan kondisi keuangan bank termasuk hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha bank kepada Manajemen

1. **Corporate Secretary**

Corporate Secretary berperan dalam mensinergikan dan mengintegrasikan proses pengelolaan komunikasi internal dan eksternal bank serta penerapan standar-standar *service excellence* secara menyeluruh, efektif dan efisien.

Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah memiliki peran jabatan memberikan arahan strategis seluruh kegiatan bisnis yang berada di bawah koordinasi Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah agar dapat berjalan dengan selaras sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan, menyetujui, mengkoordinir dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan operasional pemasaran perkreditan agrobisnis dan ritel serta pembiayaan syariah, menyetujui, mengkoordinir dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan operasional pemasaran dana/jasa syariah. Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah membawahi Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel dan Divisi Usaha Syariah (G4-35, G4-36).

1. **Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel**

Bertanggung jawab dalam mengelola pencapaian kinerja kredit agrobisnis, ritel dan *mortgage* dengan memperhatikan unsur-unsur risiko, mengusulkan rencana pengembangan produk perkreditan dan mengorganisir upaya pengembangan produk dan kebijakannya untuk kredit agrobisnis, ritel dan *mortgage* dengan berpedoman pada fungsi dan tujuan bank yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian pelaksanaan kegiatan operasional yang efektif dan efisien untuk memperoleh laba yang optimal serta penerapan misi bank sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah Jawa Timur dan pengembangan usaha mikro dan kecil, mengelola kegiatan monitoring

dan pelaporan kredit agrobisnis, ritel dan *mortgage* sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku, mengelola kegiatan pemasaran kredit agrobisnis, ritel dan *mortgage* serta pengembangan produk dalam rangka meningkatkan daya saing kredit agrobisnis, ritel dan *mortgage*, mengelola sumber daya dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian kinerja bisnis kredit agrobisnis, ritel dan *mortgage*, mengelola kinerja karyawan di bawah unit kredit agrobisnis dan ritel serta mengelola sistem dan prosedur di bawah unit kredit agrobisnis dan ritel.

2. **Divisi Usaha Syariah**

Berperan dalam mengontrol dan memonitor pelaksanaan kegiatan operasional produk pembiayaan, dana dan jasa syariah bank secara keseluruhan, baik di tingkat Divisi maupun kantor cabang syariah, dengan mengacu kepada kebijakan dan prosedur pembiayaan, dana dan jasa syariah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pembiayaan, dana dan jasa syariah yang dapat memberikan kontribusi finansial yang signifikan bagi bank, melakukan koordinasi dengan kantor pusat sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional perbankan syariah, memelihara hubungan dan kerjasama dengan pihak eksternal sebagai perpanjangan tangan Direksi.

Direktur Bisnis Menengah & Korporasi memiliki peran jabatan dalam memberikan arahan strategis seluruh kegiatan bisnis yang berada di bawah koordinasi Direktur Bisnis Menengah & Korporasi agar dapat berjalan selaras dengan kegiatan bank sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan, menyetujui, mengkoordinir dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan operasional perkreditan menengah & korporasi serta pendanaan konvensional untuk memperoleh laba yang optimal serta memantau pelaksanaan kegiatan operasional likuiditas bank.



Direktur Bisnis Menengah & Korporasi membawahi Divisi Kredit Menengah & Korporasi, Divisi Dana/Jasa & Luar Negeri dan Divisi *Treasury* (G4-35, G4-36).

1. Divisi Kredit Menengah & Korporasi

Melaksanakan kegiatan riset, analisa pasar dan promosi untuk menunjang kinerja kredit menengah & korporasi serta membina kerjasama kelembagaan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja kredit menengah & korporasi.

2. Divisi Dana/Jasa & Luar Negeri

Melaksanakan pengumpulan data atas pelaksanaan sistem dan prosedur produk dana jasa dan luar negeri, melaksanakan evaluasi dan revisi atas sistem dan prosedur produk dana jasa dan luar negeri dalam rangka menunjang *improvement* produk dana jasa dan luar negeri, melaksanakan pengajuan perancangan revisi sistem dan prosedur, serta melaksanakan pengarsipan atas dokumen revisi sistem dan prosedur.

3. Divisi *Treasury*

Mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi *treasury* dalam memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM dan PDN serta melakukan transaksi di pasar keuangan dan dengan nasabah komersil guna meningkatkan pendapatan bank melalui aktivitas transaksi Divisi *Treasury* di pasar keuangan.

Direktur Operasional memiliki peran jabatan menyetujui, mengkoordinir dan memantau pelaksanaan aktivitas pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan aktivitas bisnis secara optimal, menyetujui, mengkoordinir dan memantau pelaksanaan aktivitas pengadaan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan secara tepat waktu, harga, kualitas dan jumlah, menyetujui, mengkoordinir dan memantau pelaksanaan fungsi akuntansi dan perpajakan untuk memberikan informasi kondisi keuangan Bank secara akurat, komprehensif dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan, mengorganisir, mengarahkan

dan memastikan peningkatan kinerja kantor cabang. Direktur Operasional membawahi Divisi Umum, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi dan Unit Kredit Bermasalah (G4-35, G4-36).

1. Divisi Umum

Berperan dalam menintegrasikan seluruh aktivitas pendukung operasional bank yang mencakup urusan layanan umum dan pengadaan barang/jasa.

2. Divisi Teknologi Informasi

Berperan dalam mengintegrasikan dan mensinergikan kegiatan perencanaan, pengembangan, operasional dan pemantauan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka menyediakan layanan TI secara menyeluruh untuk mendukung aktivitas bank baik untuk keperluan bisnis maupun operasional internal secara optimal dan memenuhi standar perbankan dan patuh pada peraturan perundang-undangan.

3. Divisi Akuntansi

Bertanggung jawab terhadap keakuratan dan ketepatan waktu fungsi pelaporan keuangan bank dan pemenuhan tanggung jawab pelaporan pada pihak eksternal, bertanggung jawab atas monitoring dan pelaporan pajak dalam rangka memastikan keakuratan, ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, bertanggung jawab dalam memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan memberikan rekomendasi langkah-langkah yang harus diambil manajemen untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan dalam mendukung pencapaian *target*.

4. Unit Kredit Bermasalah

Berperan mengkoordinir aktivitas pemantauan, penyelamatan, penyelesaian kredit dan pembiayaan bermasalah, baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Unit Usaha Syariah, serta memantau penerapan penyelamatan dan penyelesaiannya dengan berpedoman pada kebijakan dan prosedur perkreditan dan pembiayaan yang telah ditetapkan sehingga dapat memitigasi risiko kerugian finansial bagi bank.



Direktur Kepatuhan memiliki peran jabatan untuk memimpin pelaksanaan fungsi kepatuhan seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh bank terhadap peraturan dan perundang-undangan, memimpin pelaksanaan upaya pengendalian risiko untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis bank tidak akan membahayakan

kelangsungan hidup serta memimpin upaya pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bank. Direktur Kepatuhan membawahi Divisi Sumber Daya Manusia, Kepatuhan dan Manajemen Risiko (G4-35, G4-36).

Komposisi Pemimpin Divisi Bank Per Tanggal 31 Desember 2013 (G4-38)

Nama/Jenis Kelamin	Jabatan	Keterangan
Bambang Rushadi Laki-Laki	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Pemimpin Divisi
Rudie Hardiono* Laki-Laki	<i>Corporate Secretary</i>	Pemimpin Divisi
Suheryanto Laki-Laki	Pemimpin Divisi Audit Intern	Pemimpin Divisi
Moch. Salosin Laki-Laki	Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel	Pemimpin Divisi
Lulu Avantino H Laki-Laki	Pemimpin Divisi Usaha Syariah	Pemimpin Divisi
Wonggo Prayitno Laki-Laki	Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi	Pemimpin Divisi
Revi Adiana Silawati Perempuan	Pemimpin Divisi Dana/Jasa & Luar Negeri	Pemimpin Divisi
Tony Sudjiaryanto* Laki-Laki	Pemimpin Divisi <i>Treasury</i>	Pemimpin Divisi
Gatot Widodo Laki-Laki	Pemimpin Divisi Umum	Pemimpin Divisi
Azhar Hafiz Nasution Laki-Laki	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	Pemimpin Divisi
Gati Muladi Widodo Laki-Laki	Pemimpin Divisi Akuntansi	Pemimpin Divisi
Harjuni Perempuan	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	Pemimpin Divisi
Basuki Budi Wuryanto Laki-Laki	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Pemimpin Divisi
Su'udi Laki-Laki	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Pemimpin Divisi

*) Diusulkan menjadi Direktur Kepatuhan dan Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah, dalam proses *Fit & Proper Test*



Dewan Komisaris:

Adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan organisasi. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.

Persyaratan Dewan Komisaris:

1. Persyaratan Umum:

Warga Negara Indonesia yang:

 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
2. Persyaratan Khusus:

Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rinci dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.
3. Persyaratan Lainnya:
 - a. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
 - b. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat

kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Komite Komisaris:

A. Komite Audit

Bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta melaksanakan tugasnya berdasarkan Pedoman Komite Audit dan *Internal Audit Charter*.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Audit:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan



- yang berkaitan dengan emiten atau Perusahaan Publik;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan;
 7. Membuat pedoman kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*);
 8. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 9. Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana nomor 8, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Intern;
 10. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Program kerja yang dilaksanakan oleh Komite Audit pada Tahun 2013:

NO	PROGRAM KERJA (G4-49)
1	Membahas dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Rencana Bisnis tahun 2013
2	Membahas dan melakukan kajian atas kecukupan perencanaan dan pelaksanaan audit oleh SKAI serta terpenuhinya jumlah dan kompetensi auditor yang memadai
3	Membahas usulan manajemen dalam rangka penyempurnaan struktur organisasi bank
4	Melakukan pemantauan terhadap pengembangan produk bank, pengembangan jaringan operasional Bank Jatim beserta fasilitas penunjangnya
5	Membahas isu-isu signifikan terhadap laporan keuangan dan menelaah efektivitas kinerja auditor eksternal (KAP)
6	Melakukan pemantauan dan mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan audit intern & ekstern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk keandalan pelaporan keuangan
7	Melakukan penelaahan atas informasi keuangan berupa laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya
8	Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
9	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS

Selama tahun 2013, Komite Audit melakukan rapat dengan frekuensi 8 kali.

Komite Remunerasi Dan Nominasi (G4-52)

Wewenang dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kualifikasi dan proses seleksi/pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan cara menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Melakukan seleksi dan nominasi calon anggota Komisaris dan/atau Direksi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Merancang, menyusun dan mengevaluasi kebijakan remunerasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (G4-37, G4-53);
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Kebijakan tersebut diatas disusun dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang bank;
5. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris.



Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2013 meliputi:

NO	PROGRAM KERJA (G4-49)
1	Pembahasan pengisian pejabat melalui multi level entry untuk mengejar kekosongan yang terjadi sesuai dengan standar profesi yang dibutuhkan bank
2	Mengevaluasi rencana penerapan kebijakan remunerasi pegawai menggunakan sistem <i>grading</i> yang berbasis kompetensi
3	Penempatan jabatan eksekutif di bawah Direksi serta percepatan pengisian kekosongan pejabat di unit kerja operasional untuk segera dipenuhi berdasarkan skala prioritas khususnya untuk kepentingan pengembangan struktur organisasi
4	Pembahasan perpanjangan masa kerja setingkat Pemimpin Divisi yang akan memasuki masa pensiun
5	Monitoring implementasi PBI mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pelaksanaan pekerjaan dan sumber daya manusia kepada pihak lain atau alih daya termasuk <i>outsourcing</i>
6	Melakukan verifikasi data dan rekomendasi atas usulan Direksi dalam rangka penetapan dan promosi pejabat eksekutif

Selama tahun 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 5 kali rapat.

Komite Pemantau Risiko (G4-46, G4-47)

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko. Sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko:

1. Evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Melakukan analisa pada berbagai risiko yang mungkin timbul dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengambil langkah yang diperlukan;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Pengendalian Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris.

Program Kerja Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2013:

NO	PROGRAM KERJA (G4-49)
1	Pemantauan potensi risiko didasarkan pada laporan Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko
2	Pemantauan strategi usaha, melalui laporan kinerja keuangan dan realisasi rencana bisnis
3	Peningkatan kualitas manajemen risiko termasuk membahas hal-hal terkait adanya PBI yang baru serta temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia terkait dengan manajemen risiko
4	Melakukan kajian terhadap hal-hal yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris



Aktivitas lain terkait dengan fokus kerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2013, di antaranya melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank Jatim sebagai berikut:

NO	PEMBAHASAN (G4-49)
1	Pembahasan perkembangan saham bank sebagai perusahaan yang sudah <i>go public</i>
2	Review hasil kajian pengajuan fasilitas kredit pihak terkait
3	Review hasil laporan kredit bermasalah terkait dengan kualitas NPL
4	Review laporan TKB bank, Profil Risiko dan laporan bulanan Direktur Kepatuhan
5	Penyempurnaan infrastruktur di bidang Teknologi Informasi untuk menunjang kelancaran dan mempercepat akses informasi data untuk kepentingan manajemen
6	Review terhadap laporan periodik dari unit kerja terkait termasuk laporan dari satuan kerja auditor internal terkait dengan penyelesaian/tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, mengingat dapat mempengaruhi nilai komposit

Selama tahun 2013, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat 9 kali.

Komposisi Dewan Komisaris (G4-LA12, G4-38)

Nama/Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
Muljanto*) Laki-Laki	Komisaris Utama	Sarjana Muda Jurusan Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya Strata 1 Jurusan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Magister Manajemen UPN Veteran Surabaya
Chairul Djaelani***) Laki-Laki	Komisaris	Sarjana Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Program <i>Post Graduate</i> Manajemen Pengelolaan & Pemeliharaan Jalan di John Hopkins University, USA Magister Manajemen Institut Teknologi Sepuluh November di Surabaya
Isnanto***) Laki-Laki	Komisaris Independen	Sarjana Strata 1 Jurusan Akuntansi Pascasarjana Teknik Industri
Wibisono*) Laki-Laki	Komisaris Independen	Sarjana Strata 1 Jurusan Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya S2 Jurusan Development Economics di Williams College, Massachusetts, USA

Keterangan:

- *) Efektif bertugas sejak tanggal 21 Juni 2011 sesuai dengan Surat Bank Indonesia Nomor 13/52/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 1 Juni 2011
- **) Sejak RUPS-LB tanggal 14 April 2011
- ***) Terhitung sejak tanggal 3 September 2013 tidak lagi menjabat sebagai komisaris bank



Komposisi Dewan Komisaris sesuai RUPS-LB tanggal 3 September 2013

Nama/Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
Muljanto *) Laki-Laki	Komisaris Utama	Sarjana Muda Jurusan Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya Strata 1 Jurusan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Magister Manajemen UPN Veteran Surabaya
Chairul Djaelani **) Laki-Laki	Komisaris	Sarjana Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Program Post Graduate Manajemen Pengelolaan & Pemeliharaan Jalan di John Hopkins University, USA Magister Manajemen Institut Teknologi Sepuluh November di Surabaya
Soebagyo ***) Laki-Laki	Komisaris Independen	Sarjana Strata 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya
Wibisono *) Laki-Laki	Komisaris Independen	Sarjana Strata 1 Jurusan Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya S2 Jurusan Development Economics di Williams College, Massachusetts, USA

Keterangan:

- *) Efektif bertugas sejak tanggal 21 Juni 2011 sesuai dengan surat Bank Indonesia Nomor 13/52/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 1 Juni 2011
- **) Sejak RUPS-LB tanggal 14 April 2011
- ***)Efektif sebagai Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Key Performance Indicators Dewan Komisaris (G4-44)

Terdapat pada target Anggaran Dewan Komisaris dan pelaksanaan Rencana Kerja. Sedangkan yang ditetapkan sebagai acuan kinerja Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif mencakup jumlah rapat, jumlah dan ketepatan waktu kajian oleh komite di bawah Dewan Komisaris serta jumlah kunjungan kerja.

2. Pengawasan pasif meliputi ketepatan waktu hasil *review* Laporan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern, Laporan Profil Risiko, Laporan Kepatuhan dan Hasil Penilaian *Self Assessment* GCG.
3. Aspek kinerja Perseroan yang mencakup rentabilitas yaitu pencapaian laba bersih dan *Ratio Return on Assets* (ROA), likuiditas bank yaitu penghimpunan dana pihak ketiga dan *ratio Loan to Deposit Ratio* (LDR) serta ekspansi kredit dan *ratio Non Performance Loan* (NPL).



Pelaksana Assessment Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil yang terdapat pada Rencana Kerja dan anggaran sesuai dengan *Key Performance Indicators* yang ada.

Dewan Pengawas Syariah

Diangkat melalui RUPS dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank syariah;
- c. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang meliputi:
 - 1) Meminta penjelasan dari pejabat bank syariah yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - 2) Memeriksa apakah akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia:
 - Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
 - 3) Mengkaji sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;
 - 4) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan;
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank syariah yang belum ada fatwanya;
- e. Melakukan kajian secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah;
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- g. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank syariah, yang meliputi:
 - 1) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah;
 - 2) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;
 - 3) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad *murabahah* sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli *murabahah*;
 - ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad *mudharabah/musyarakah*, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.



- 1) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai bank syariah dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas apabila diperlukan;
- 2) Melakukan kajian terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud;
- 3) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah;
- 4) Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - a. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Aktivitas Rapat Anggota Dewan Pengawas Syariah

Aktivitas rapat anggota Dewan Pengawas Syariah yang diikuti oleh pegawai bank syariah dan Divisi Usaha Syariah selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Periode	Agenda
Triwulan I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat pembahasan Pembiayaan Multijasa Umroh iB <i>Maqbula</i> 2. Rapat pembahasan Surat BI perihal Laporan DPS per Semester I tahun 2012 3. Rapat pembahasan Kerjasama dengan Amal Usaha <i>Muhammadiyah</i> 4. Rapat pembahasan Produk Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas (KLE) 5. Rapat penyusunan Laporan DPS untuk Semester II tahun 2013 6. Rapat penyusunan Laporan <i>Good Corporate Governance</i> tahun 2012
Triwulan II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat pembahasan Produk Giro <i>Maxi (autosave)</i> 2. Rapat pembahasan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
Triwulan III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat penyusunan Laporan DPS untuk Semester I tahun 2013 2. Rapat tentang perkembangan UUS bank dan kontrol akad-akad syariah serta rencana pertemuan dengan semua DPS
Triwulan IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pengarahan Dewan Pengawas Syariah 2. <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS ke IX


Komposisi Dewan Pengawas Syariah 1 Januari 2013-31 Desember 2013 (G4-LA12, G4-38)

Nama/Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
		Sarjana Jurusan Ilmu Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya
Moh. Ali Aziz **) Laki-Laki	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Malang Doktor Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus Surabaya
Nur Syam *) Laki-Laki	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Sarjana Jurusan Ilmu Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya Magister Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya
Thohir Luth **) Laki-Laki	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Sarjana Jurusan Ilmu Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya Magister Ilmu Agama Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Doktor Ilmu Agama Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*) Efektif bertugas sejak tanggal 29 Desember 2011

**) Efektif bertugas sejak tanggal 22 September 2011

Komposisi Komite 1 Januari 2013-31 Desember 2013 (G4-38)

Nama/Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
Herry Hendarto*) Laki-Laki	Anggota Komite Audit	Sarjana Jurusan Ekonomi Universitas Jember MBA di Jakarta Institute of Management Studies Magister Manajemen STIE ISM di Jakarta
Nurhadi **) Laki-Laki	Anggota Komite Pemantau Risiko	Sarjana Muda Jurusan Ekonomi Perusahaan IKIP Negeri Surabaya Sarjana Strata1 Jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Tulungagung Magister Manajemen Universitas Wijaya Putra Surabaya

*) Efektif bertugas sejak tanggal 30 Juni 2011

**) Efektif bertugas sejak tanggal 9 Desember 2011

Di samping menghadiri rapat internal, Dewan Komisaris juga menghadiri rapat eksternal dengan didampingi Komite Dewan Komisaris. Dewan Komisaris secara periodik juga menghadiri rapat evaluasi kerja caturwulan yang dihadiri seluruh Pemimpin Cabang dan Pemimpin Divisi.



REMUNERASI BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH YANG DITERIMA PADA TAHUN 2013 (G4-51)

Prosedur Penetapan Remunerasi (G4-52)

Komite Remunerasi & Nominasi



Dewan Komisaris



RUPS



**Remunerasi
Direksi dan Dewan Komisaris**

Sesuai dengan PBI No 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya, Komite Remunerasi & Nominasi merekomendasikan kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.

Membahas rekomendasi kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk diusulkan kepada RUPS. (G4-53)

Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indikator *Performance* Direksi (G4-44)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat (1), ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditentukan berdasarkan ketentuan RUPS dan Pasal 113 yang berbunyi ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota komisaris ditentukan berdasarkan ketentuan RUPS. Sehingga dalam hal ini prosedur untuk melaksanakan remunerasi telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, secara substansial indikator kinerja direksi diukur berdasarkan pencapaian *target* sesuai rencana bisnis yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris antara lain aspek keuangan dan pemasaran, operasional dan SDM serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolegiat dari seluruh anggota Direksi yang tercermin dalam satu kesatuan pada pencapaian/realisasi atas Rencana Bisnis Bank (RBB) secara tahunan.

Selain itu, keberhasilan kinerja Direksi dapat diukur melalui hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup aspek profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan bank. Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris, RUPS dan Bank Indonesia.

Remunerasi dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris (G4-51)

Pelaksanaan remunerasi dan pemberian fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Akta Berita Acara RUPS Tahun Buku 2007 No. 055 tanggal 17 April 2008 dan Surat Keterangan No. 058/IV/2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mekanisme remunerasi dan pemberian fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam Surat Keputusan Bank Jatim Nomor 046/04/SK/DK/BPD/2008 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pemberian serta Pembayaran Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris.



Adapun remunerasi dan pemberian fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris secara umum adalah sebagai berikut:

Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris (G4-51)

Jabatan	Besaran gaji/ honorarium Netto setiap bulan (dalam Rupiah)	Keterangan
Direktur Utama	50.000.000	-
Direktur	45.000.000	Gaji/Honorarium Direktur adalah 90% dari Gaji/Honorarium Direktur Utama
Komisaris Utama	40.000.000	Gaji/Honorarium Komisaris Utama adalah 80% dari Gaji/Honorarium Direktur Utama
Komisaris	32.000.000	Gaji/Honorarium Komisaris adalah 80% dari Gaji/Honorarium Komisaris Utama

Pada tahun 2013, paket remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut (G4-51):

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	dalam Rupiah	Orang	dalam Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	5	15.091.567.700	4	8.713.952.720
Fasilitas lain dalam bentuk natura (asuransi)	5	5.840.463.859,08	4	2.437.117.789,22

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2013 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2013	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 miliar	5	4
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

Paket Remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2013 sebagai berikut (G4-51):

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah yang Diterima dalam 1 tahun	
	Orang	Nominal (dalam Rupiah)
1. Remunerasi	3	330.988.000
2. Fasilitas lainnya *):		
a. yang dapat dimiliki	-	-
b. yang tidak dapat dimiliki		
Jumlah	3	330.988.000

*) dinilai dalam ekuivalen rupiah

RANGKAP JABATAN (G4-39)

Untuk menunjang kinerja perusahaan dan mencapai tata kelola perusahaan yang baik, tidak ada manajemen yang merangkap jabatan untuk posisi Pemimpin Divisi maupun *Corporate Secretary*.



INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS (G4-38)

Setiap tahun seluruh anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan sesuai dengan ketentuan GCG yang isinya antara lain menyatakan atau mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak merangkap jabatan, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:
 - Pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau
 - Yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank;
- b. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik secara vertikal maupun horizontal dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- c. Tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank;
- d. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS;
- e. Jumlah kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada bank maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Anggota Dewan Komisaris bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.

INDEPENDENSI DIREKSI (G4-38)

Direksi bank dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang

independen terhadap pemegang saham pengendali. Setiap tahun seluruh anggota Direksi bank membuat pernyataan yang isinya antara lain menyatakan:

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain di dalam luar negeri.
2. Hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali bank.
3. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
4. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
5. Selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, Direksi tidak memanfaatkan bank untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
6. Menerima remunerasi dan fasilitas lain berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

BENTURAN KEPENTINGAN

Pengaturan mengenai benturan kepentingan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya benturan kepentingan antara bank dengan anggota Direksi adalah (G4-41):

- a. Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- b. Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun pihak lainnya yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan;
- c. Direksi wajib membuat Surat Pernyataan yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain;
- d. Apabila anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan bank, maka wajib diungkapkan dan anggota



- a. Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakili oleh anggota Direksi lainnya;
- b. Apabila semua anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan bank, maka bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank; dan
- c. Apabila semua anggota Direksi atau semua anggota Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan dengan bank, maka bank dapat diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk RUPS.

PELATIHAN YANG DIKUTI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2013 (G4-43)

Pelatihan Direksi selama Tahun 2013

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN	LEMBAGA	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Hadi Sukrianto (Direktur Utama)	<i>Branchless Banking Trend 2014</i>	LPPi	27 September 2013
		Diskusi Terbuka Kepemimpinan Antar Pemimpin	ASBANDA	11-12 Januari 2013
		Seminar Peluang dan Tantangan Bank Khusus di Tengah Dominasi Asing	Info Bank	27 Februari 2013
2.	Eko Antono (Direktur Operasional)	Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif	BSMR	17 September 2013
		Seminar <i>Strengthening Financial Institutions to Anticipate The Impact of Economic Crisis</i>	LPPi	7 Oktober 2013
3.	Djoko Lesmono (Direktur Bisnis Menengah & Korporasi)	<i>Branchless Banking Trend 2014</i>	LPPi	27 September 2013
4	Suparlan*) (Direktur Kepatuhan periode 1 Januari - 3 September 2013)	Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	BSMR	23 Februari 2013
		Seminar dan Rapat Umum Anggota (RUA) FKDP	FKDP	16-17 Mei 2013

*) Terhitung sejak tanggal 3 September 2013 tidak lagi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan



Pelatihan Dewan Komisaris selama Tahun 2013

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN	LEMBAGA	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Muljanto (Komisaris Utama)	Seminar Kepemimpinan "Antar Pemimpin"	ASBANDA	11-12 Januari 2013
		Workshop "Hapus Tagih Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Penyusunan SOP"	ASBANDA	5-6 Februari 2013
		Seminar dan Rapat Kerja Wilayah Barat FKDKP	FKDKP	4-6 April 2013
		Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK/P-SI tahun 2013	FKDKP	26-27 September 2013
		Seminar "Peranan Bank Pembangunan Daerah dalam Mendukung Pengawasan oleh OJK"	ASBANDA	16 Desember 2013
2.	Chairul Djaelani (Komisaris)	Seminar "Risk Based Bank Rating (RBBR) & GCG bagi Pengurus dan Pejabat BPD"	ASBANDA	9 September 2013
		Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK/P BPD-SI	FKDKP	26-27 September 2013
		Seminar "Krisis Ekonomi Global dan Pengaruhnya terhadap Operasional Industri Keuangan dan Perbankan di Indonesia"	FKDKP	22-23 November 2013
		Seminar "Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Komisaris/Pengawas BPK-SI"	FKDKP	16 Desember 2013
		Seminar "Peranan Bank Pembangunan Daerah dalam Mendukung Pengawasan oleh OJK"	ASBANDA	16 Desember 2013
3.	Wibisono (Komisaris Independen)	Seminar Sosialisasi dan Tindak Lanjut Atas Hasil Putusan MK No.77/PUU-IX/2011	Info Bank	27-28 Februari 2013
		Seminar dan Rapat Kerja Wilayah Barat Forum Komunikasi Dewan Komisaris	FKDKP	4-6 April 2013
		Seminar "Dampak Ketersediaan Modal terhadap Kegiatan Usaha Bank Peluang dan Tantangan Kebijakan Hapus Tagih bagi Operasional BPD	FKDKP	24-26 April 2013
		Seminar Penerapan Program APU-PPT dan Implementasi FATCA: Respon dan Kesiapan Perbankan Indonesia ke Depan	FKDP	19 September 2013
		Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK/P BPD-SI	FKDKP	26-27 September 2013
		Seminar "Prospek Ekonomi dan Perbankan Nasional 2014"	DKP	28 November 2013
		Seminar Anti <i>Fraud Conference</i> (NAFC) 2013	ACFE	2-3 Desember 2013



4.	Soebagyo*) (Komisaris Independen)	Seminar “HUT ke 8 Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)”	LPS	22-23 September 2013
		Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK/P BPD-SI	FKDKP	26-27 September 2013
		Seminar “Pemahaman tentang Pengawasan Aktif Dewan Komisaris terkait Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai Peraturan Bank Indonesia”	RMI	7-8 November 2013

*) Efektif sebagai Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah untuk Pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2013 (G4-55)

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	= 10,53
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	= 1,11
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	= 1,25
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	= 1,67



Kebijakan Remunerasi Bagi Pemimpin Divisi/Setingkat

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI PEMIMPIN DIVISI/SETTINGKAT (G4-51, G4-52)

Prosedur Penetapan Kebijakan Remunerasi bagi Pemimpin Divisi/ setingkat:

Pelaksanaan remunerasi dan pemberian fasilitas bagi Pemimpin Divisi/setingkat diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yaitu berdasarkan Sistem *Grading* dan Pemberian Bantuan Untuk Pemeliharaan Rumah Bagi Pegawai Tetap dan Tunjangan Perumahan/Biaya Kontrak Rumah Dinas Bagi Pejabat.

Adapun paket remunerasi bagi Pemimpin Divisi/setingkat pada tahun 2013 meliputi:

1. Gaji/Honorarium Pemimpin Divisi/ setingkat;
2. Tunjangan Perumahan;
3. Biaya Kontrak Rumah Dinas;
4. Tambahan Penghasilan Lainnya meliputi: Tunjangan Penghasilan Uang Pendidikan; Tambahan Penghasilan Uang Cuti; Tambahan Penghasilan THR; Tambahan Penghasilan Jasa Produksi.

Data Remunerasi Pemimpin Divisi/Setingkat Tahun 2013

BULAN	GAJI (dalam Rupiah)	TUNJANGAN (dalam Rupiah)	JASA PRODUKSI (dalam Rupiah)
Januari	220.720.432	-	-
Februari	203.590.416	220.720.432	-
Maret	220.720.432	-	-
April	202.087.920	-	2.040.012.686
Mei	236.220.896	236.220.896	-
Juni	236.220.896	-	-
Juli	217.588.384	472.441.792,00	-
Agustus	236.220.896	-	-
September	379.380.064	-	-
Oktober	379.380.064	-	-
November	379.380.064	-	-
Desember	379.380.064	-	-
TOTAL	3.290.890.529	929.383.120	2.040.012.686

**Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah (G4-54)**

Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah bank pada tahun 2013 sebagai berikut:

NO	BULAN	GAJI	
		TERTINGGI (dalam Rupiah)	TERENDAH (dalam Rupiah)
1	Januari	18.632.512	2.836.888
2	Februari	18.632.512	2.836.888
3	Maret	18.632.512	2.836.888
4	April	18.632.512	2.836.888
5	Mei	18.632.512	2.836.888
6	Juni	18.632.512	2.836.888
7	Juli	18.632.512	2.836.888
8	Agustus	18.632.512	2.836.888
9	September (<i>berdasarkan Grading</i>)	30.000.000	2.850.000
10	Oktober (<i>berdasarkan Grading</i>)	30.000.000	2.850.000
11	November (<i>berdasarkan Grading</i>)	30.000.000	2.850.000
12	Desember (<i>berdasarkan Grading</i>)	30.000.000	2.850.000





Penerapan Manajemen Risiko

Implementasi Manajemen Risiko

Risk Management atau manajemen risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko melalui suatu proses untuk melakukan identifikasi, melakukan pengukuran, melakukan evaluasi dan melakukan monitoring terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan *risk management*, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dengan baik dan dapat diminimalisir.

Proses Evaluasi Risiko (G4-46)

Guna menumbuhkan budaya risiko di setiap jenjang, Dewan Komisaris dan Direksi melalui organisasi dan komite yang dibentuk (SKMR, KOMENKO, Komite Pemantau Risiko dan lain-lain) telah menciptakan mekanisme *risk self assessment* pada level Kantor Cabang, dimana alat yang dikembangkan untuk keperluan tersebut diharapkan mampu menangkap kondisi minor sedini mungkin di satuan kerja terkecil pada *risk taker* unit dan sedini mungkin dapat dilakukan langkah-langkah korektif dan mitigasi. Hasil *risk self assessment* setiap Kantor Cabang disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko sebagai bahan *monitoring* seluruh cabang dan evaluasi manajemen dalam penetapan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan persetujuan Direksi serta sebagai bahan *Risk Based Audit (RBA)* Divisi Audit Internal.

Divisi Manajemen Risiko membuat Laporan Evaluasi Risiko secara periodik yaitu bulanan dan 3 (tiga) bulanan serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (G4-47).

Langkah mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi kondisi minor antara lain (G4-2):

1. Mitigasi risiko kredit dilakukan dengan peningkatan pengawasan atas kredit yang

telah disalurkan, menerapkan prinsip kehati-hatian pada saat melakukan ekspansi kredit serta melakukan pengawasan sistem dan prosedur yang telah dimiliki;

2. Mitigasi risiko pasar antara lain dengan penetapan limit harian, limit penempatan pada bank-bank pemerintah yang *bonafide*;
3. Mitigasi risiko likuiditas antara lain dengan meningkatkan akses kepada sumber-sumber pendanaan, meningkatkan dan menjaga stabilitas dana pihak ketiga;
4. Mitigasi risiko operasional antara lain dengan meningkatkan kualitas dan proses kontrol internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar serta peningkatan layanan perbankan melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan;
5. Mitigasi risiko hukum antara lain dengan melakukan kajian yuridis terhadap kontrak dan perjanjian antara bank dengan pihak lain guna memeriksa kembali obyektifitas dan validitas hubungan dalam kontrak dan perjanjian tersebut. Langkah mitigasi tersebut bertujuan untuk menjaga hak bank apabila terjadi hal yang tidak diharapkan;
6. Mitigasi risiko strategi antara lain dengan menyusun dan menetapkan strategi bisnis bank dalam rencana korporasi dan rencana bisnis pada suatu analisa kajian yang komprehensif;
7. Mitigasi risiko kepatuhan antara lain dengan meningkatkan komitmen manajemen untuk menegakkan peraturan yang berlaku dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh pegawai maupun pejabat eksekutif; dan
8. Mitigasi risiko reputasi antara lain dengan selalu menjaga kredibilitas bank di hadapan *shareholder* dan *stakeholder*, tanggap dalam merespon segala keluhan dan pemberitaan negatif tentang bank dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku.



Sistem Pengendalian Internal

PRINSIP KEHATI-HATIAN

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, kegiatan operasional bank selama tahun 2013 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat tercermin dari 11 parameter (*benchmark*) yang ditetapkan Bank Indonesia per 31 Desember 2013 yaitu **(G4-14)**:

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bank sebesar 23,72%;
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif sebesar 2,38%;
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif sebesar 2,95%;
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset keuangan terhadap aset produktif sebesar 1,87%;
5. *Non Performing Loan* (NPL) Gross sebesar 3,44%;
6. *Non Performing Loan* (NPL) Net sebesar 1,30%;
7. *Return On Asset* (ROA) sebesar 3,82%;
8. *Return On Equity* (ROE) sebesar 19,04%;
9. *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 7,14%;
10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 70,28%;
11. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 84,98%;

Dari 11 parameter (*benchmark*) yang ditetapkan Bank Indonesia, rata-rata rasio tingkat kesehatan bank tahun 2013 menunjukkan tingkat rasio bank yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU dan PPT) (G4-14)

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di bank sesuai dengan PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, serta dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, telah dilakukan beberapa aktivitas antara lain:

1. Penyediaan *software Anti Money Laundering* (AML Program)

Program ini merupakan program *stand alone* yang terhubung dengan *Core Banking System* Bank Jatim (ESTIM) sehingga menghasilkan:

- a. Daftar Transaksi Di Luar Kebiasaan (*Unusual Transaction*)

Daftar ini memuat transaksi-transaksi yang potensial menjadi transaksi keuangan mencurigakan dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi dimaksud memenuhi kriteria sebagai transaksi keuangan mencurigakan

- b. Daftar Transaksi Tunai Berpotensi Dilaporkan (*Potential Cash Transaction Report*)

Daftar ini memuat transaksi-transaksi tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK



- Melakukan pelatihan dan evaluasi tentang kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi petugas Unit Kerja Khusus (UKK) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebagai berikut:

NO.	JENIS PELATIHAN/SOSIALISASI TYPE OF	PERIODE PELAKSANAAN IMPLEMENTATION PERIOD
1.	Pelatihan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD), <i>Enhanced Due Dilligence</i> (EDD) dan <i>Politically Exposed Person</i> (PEP)	April 2013
2.	Pelatihan LKTM (<i>Suspicious Transaction Report</i> /STR) dan LTKT (<i>Cash Transaction Report</i> /CTR)	Juli 2013
3.	Sosialisasi PBI 14/27/PBI/2012	September 2013

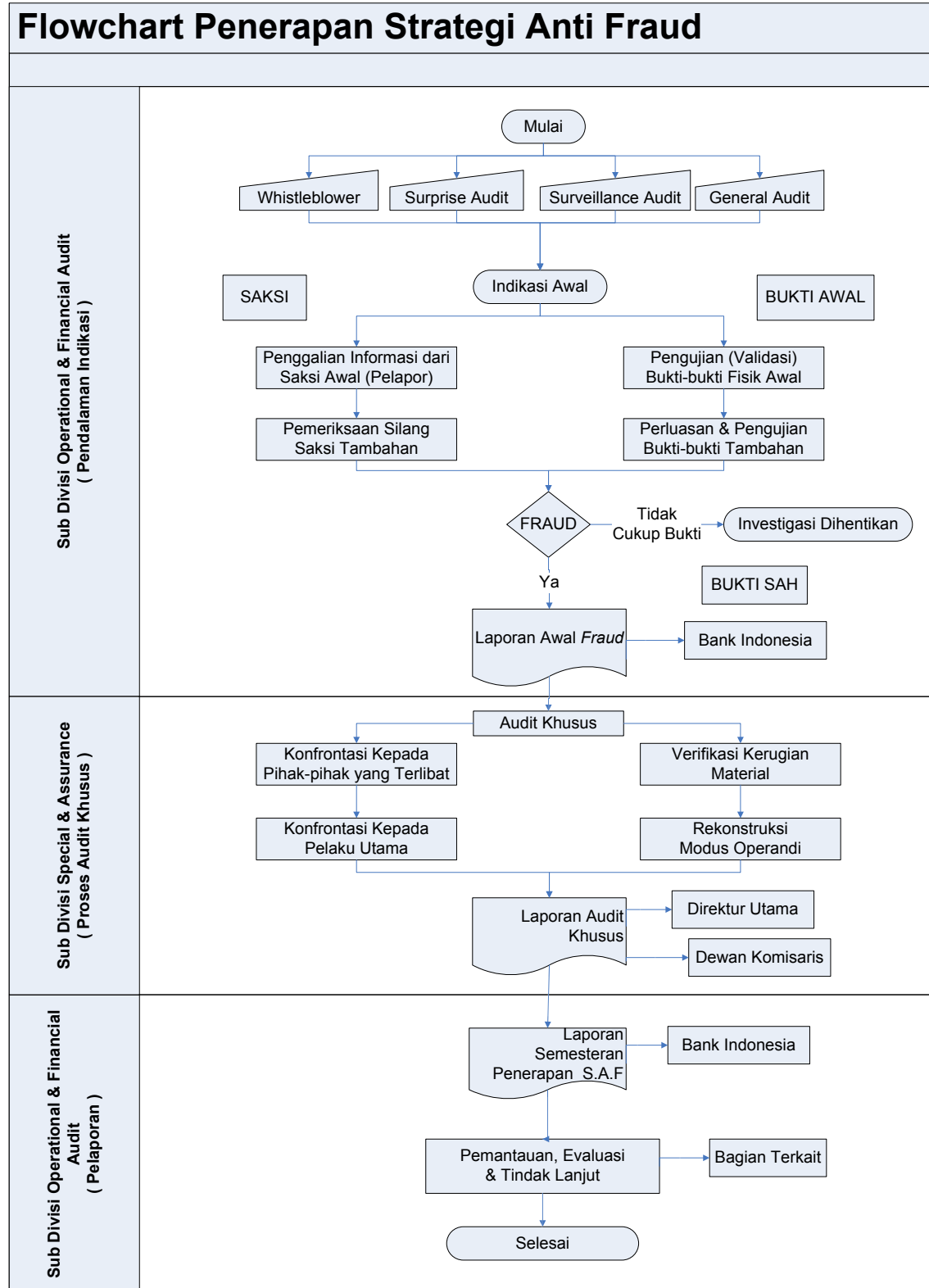
- Melakukan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Report*) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta
Jumlah laporan untuk tahun 2013 sebagai berikut:
 - Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) sejumlah 62 laporan;
 - Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sejumlah 5067 laporan.
- Pemenuhan data keuangan nasabah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:
 - Ke PPATK sejumlah 8 data;
 - Ke KPK sejumlah 25 data.
- Monitoring dan komparasi data nasabah bank terhadap data teroris yang diterbitkan oleh PBB.
- Melakukan pengelompokan seluruh data nasabah Bank Jatim melalui pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach/RBA*) yang terbagi menjadi:
 - Nasabah berisiko tinggi (*high risk customer*) termasuk *Politically Exposed Person* (PEP);
 - Nasabah berisiko menengah (*medium risk customer*); dan
 - Nasabah berisiko rendah (*low risk customer*).
- Dan dilakukan pengkinian data nasabah sesuai dengan risiko yang melekat pada nasabah tersebut.





SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan operasional pada bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank maka diperlukan suatu peningkatan efektifitas pengendalian internal dengan cara menerapkan strategi anti *fraud* (G4-14). Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *fraud* telah dilaksanakan dengan menerapkan manajemen risiko khususnya sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.





KOMITMEN MANAJEMEN DALAM PENGENDALIAN FRAUD

Komitmen Manajemen dalam pengendalian *fraud* diwujudkan dalam “Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*” dengan tujuan mengarahkan bank guna pengendalian *fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang sifatnya integral dalam mengendalikan *fraud*.

Dalam rangka mengendalikan *fraud*, upaya-upaya yang dilakukan meliputi:

4 PILAR PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD			
PENCEGAHAN	DETEKSI	INVESTIGASI, PELAPORAN DAN SANKSI	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Pilar Pencegahan memuat perangkat-perangkat kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud*, yang mencakup kebijakan *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.

Pilar Deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* yang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.

Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi memuat perangkat-perangkat bank yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian *fraud*, yang mencakup investigasi, pelaporan dan pengenaan sanksi.

Pilar Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindak lanjut sesuai dengan SE BI No 13/28/DPnP perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

Terdapat 2 langkah dalam investigasi pada strategi anti *fraud* yaitu Kebijakan Investigasi dan Penanganan Investigasi (G4-58).

Kebijakan investigasi, bank terkait penerapan strategi anti *fraud* diatur sebagai berikut :

1. Pengaduan yang masuk dari *whistleblower* akan diproses sesuai mekanisme pengaduan *fraud*.
2. Semua pengaduan yang masuk akan dilakukan identifikasi sesuai dengan prioritas *whistleblower* dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan bukti awal yang cukup memadai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya ditemukan tidak cukup bukti untuk dilakukan investigasi.
3. Bank wajib mengumpulkan bukti-bukti lainnya yang dianggap masih kurang dan belum memadai.
4. Setiap indikasi dari tindakan *fraud* yang terdeteksi akan diproses sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Audit Intern.
5. Pihak yang berwenang melakukan investigasi adalah Sub Divisi *Special & Assurance Audit*, dengan memperhatikan independensi dan kompetensi terhadap *fraud* yang ditangani.
6. Pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.
7. Untuk memudahkan pemeriksaan atau investigasi dan menjaga terjadinya penghilangan, pengaburan dan perusakan barang bukti serta melakukan tindakan yang menimbulkan berkembangnya *fraud*, maka pihak yang diduga terlibat untuk sementara tidak ditempatkan pada tempat kejadian perkara.
8. Status pihak yang diduga terlibat ternyata tidak cukup bukti untuk dinyatakan bersalah maka akan dilakukan rehabilitasi (termasuk hak-haknya).
9. Setiap *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, bank akan melaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat



1. 3 (tiga) hari kerja setelah bank mengetahui terjadinya tindakan yang berpotensi serta mengarah pada suatu *fraud*.

Penanganan Investigasi, dalam hal mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga tindakan merupakan *fraud* terdiri atas beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

1. Lakukan penelaahan informasi yang masuk baik dari *whistleblower* maupun dari hasil pemeriksaan tim Audit Intern bank dengan mengumpulkan bukti awal yang kuat dan pengumpulan keterangan dari para saksi terkait serta jenis penyimpangan yang terjadi (*what*)
2. Kumpulkan informasi lainnya seperti penjelasan mengenai indikasi awal dengan menunjukkan bukti fisik, informasi tempat kejadian, orang yang terindikasi melakukan kejahatan dan informasi lainnya.
3. Lakukan persiapan pemeriksaan dengan verifikasi bukti dan informasi apakah dapat diyakini kebenarannya, apabila tidak dapat diyakini kebenarannya maka bukti dan informasi tersebut dijadikan sebagai dokumentasi/arsip dan proses dihentikan.
4. Jika verifikasi dapat diyakini kebenarannya maka lakukan proses investigasi.
5. Investigasi apakah modus yang sama terjadi pada bagian atau unit kerja lainnya yang saling berkaitan atau berdekatan dengan si pelaku.
6. Amankan bukti fisik, lokasi dan informasi yang diperoleh dengan melakukan pengarsipan yang baik dan terjaga aman.
7. Lakukan wawancara persuasi dengan para saksi maupun *whistleblower* untuk lebih memperinci dimana kejadian terjadi dan yakinkan bahwa apa yang mereka lakukan bank berkomitmen menjaga kerahasiaan mereka.
8. Lakukan wawancara konfrontir untuk pelaku maupun saksi yang tidak mau bekerjasama (kooperatif).
9. Lakukan tahapan berikutnya yaitu kemungkinan-kemungkinan yang mengakibatkan tindakan *fraud* itu terjadi apakah karena kelemahan sistem prosedur, kelemahan sistem teknologi atau yang lainnya.
10. Tahapan berikutnya pemeriksaan atas kronologis yang terjadi.
11. Hitung perkiraan kerugian (*financial loss*) yang terjadi dari tindakan *fraud* tersebut.
12. Antisipasi kelanjutan dari investigasi ke arah proses litigasi dengan menjaga bukti agar tidak mudah dihilangkan.

Hasil Kebijakan *Whistleblowing System* (G4-57)

Selama tahun 2013, terdapat 2 pelaporan yang disampaikan melalui mekanisme *whistleblowing*, setelah diinvestigasi, pelaporan tersebut tidak cukup bukti dan nilainya tidak signifikan.

Jenis usaha yang memiliki risiko korupsi pada perbankan sebagai berikut (G4-SO3):

1. Bagian Kredit
2. Bagian Umum
3. Bagian Pelayanan Nasabah



PELATIHAN ANTI KORUPSI BAGI PEGAWAI BANK JATIM PADA TAHUN 2013 (G4-SO4)

NO	NAMA PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	TEMPAT PELATIHAN	INSTRUKTUR
1.	Pelatihan <i>Customer Due Diligent, Enhance Due Diligent dan Politically Exposed Person</i>	24 April 2013	39	Kantor Pusat	Divisi Kepatuhan
		26 April 2013	40		
		29 April 2013	42		
2.	Pelatihan <i>Suspicious Transaction Report & Cash Transaction Report</i>	3 Juli 2013	40	Kantor Pusat	Divisi Kepatuhan
		4 Juli 2013	40		
		5 Juli 2013	40		
3.	Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	9 September-10 September 2013	45	Kantor Pusat	Tiga Sekawan
		11 September-12 September 2013	46		
		16 November-17 November 2013	45		
		30 November-1 Desember 2013	101		
		7 Desember-8 Desember 2013	43		
		14 Desember-15 Desember 2013	97		
21 Desember-22 Desember 2013	90				

Internal Fraud

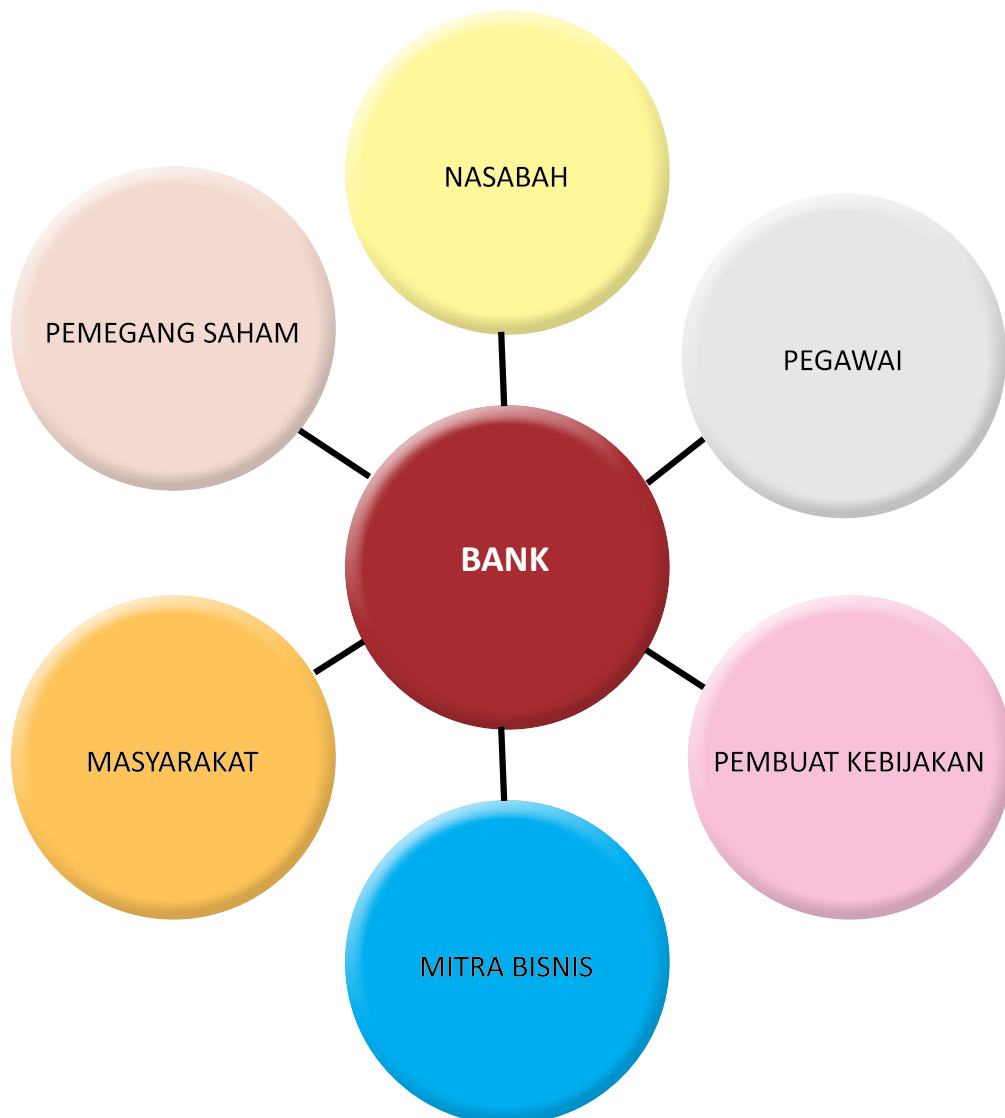
Adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan/ atau pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan.

Internal Fraud dalam Satu Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Total Fraud	-	-	36	42	1	1
Telah diselesaikan	-	-	27	5	1	1
Dalam proses internal	-	-	5	37	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	4	-	-	-



Pelibatan Pemangku Kepentingan

PETA PEMANGKU KEPENTINGAN BANK





Pelibatan dan identifikasi terhadap pemangku kepentingan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menunjang keberlanjutan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Upaya tersebut dilakukan melalui proses interaksi yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam bentuk:

DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN BANK JATIM (G4-24)	PROSES INTERAKSI (G4-26)	FREKUENSI PELAKSANAAN PADA TAHUN 2013 (G4-26)	MATERI PEMBAHASAN (G4-27)
Nasabah	<p>Terbagi dalam 2 kategori yaitu Layanan Informasi Nasabah dan Layanan Pengaduan Nasabah yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan <i>Call Center</i> 14044 (24 jam) - SMS Banking 3388 (24 jam) - Layanan <i>email</i> resmi pengaduan (humas@bankjatim.co.id) dan website resmi www.bankjatim.co.id - Survei Kepuasan Nasabah 	<p>2179 pengaduan nasabah yang ditujukan ke bank</p> <p>1 kali pada tahun 2013</p>	<p>Berisikan pengaduan terkait keluhan, masukan dan saran baik produk maupun layanan bank</p> <p>Mengidentifikasi kepuasan nasabah dan aspek peningkatan yang diperlukan</p>
Pegawai	Rapat ALCO	9 kali	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa perekonomian dunia, ekonomi makro dan moneter Indonesia serta dampaknya (pencapaian kinerja, rencana bisnis, kondisi likuiditas) bank - Analisa kinerja keuangan bank tahun 2013 - Merumuskan <i>action plan</i> perusahaan dalam rangka pencapaian target tahun 2013 - Perubahan <i>List of Term & Condition</i> bank dan <i>me-repricing</i> suku bunga dana maupun kredit agar dapat bersaing di pasar perbankan nasional - <i>Strategic plan</i> yang menunjang bisnis bank
	Portal SDM		Mensosialisasikan kebijakan dan strategi mengenai pegawai



Pegawai	Rapat Komenko	8 kali	Pembahasan <i>draft</i> baru ataupun perubahan peraturan internal
	Rapat Penyusunan Rencana Bisnis terdiri dari: Rapat Revisi Renbis 2013, Rapat Persiapan Penyusunan Renbis 2014, Rapat Usulan Renbis 2014, Rapat Revisi Usulan Renbis 2014 dan Finalisasi Usulan Renbis 2014	5 kali	Rapat Revisi Rencana Bisnis 2013 membahas hal-hal yang menyangkut revisi pada Rencana Bisnis 2013. Rapat Persiapan Penyusunan Renbis 2014, Rapat Usulan Renbis 2014, Rapat Revisi Usulan Renbis 2014 dan Finalisasi Usulan Renbis 2014 membahas mengenai Rencana Bisnis bank untuk tahun 2014.
	Rapat Kaji Ulang	3 kali	Kinerja bank pada umumnya, secara khusus mengkaji/mengevaluasi kinerja seluruh cabang bank pada caturwulan tersebut.
	IT Steering Committee	3 kali	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pengembangan dan operasional Teknologi Informasi - Rencana kerja teknologi informasi dan pencapaiannya selama tahun 2013 - Upaya peningkatan IT <i>Security</i> dan pemenuhan IT <i>Governance</i> - Pengembangan aplikasi seperti <i>ALMA</i>, <i>Intenet Banking</i> dan <i>SMS Banking</i> - Kajian atas <i>Core Banking System</i> - Rencana pengembangan Teknologi Informasi 2011-2013 yang meliputi <i>Core Banking System</i>, <i>Switching System</i>, <i>Intenet Banking</i>, <i>SMS Banking</i>, <i>Loan Originating System</i>, <i>Host Computer</i> dan penyempurnaan kebijakan di bidang teknologi informasi
	Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	1 kali	Promosi jabatan dan mutasi pegawai



<p>Pegawai</p>	<p>Rapat Remunerasi dan Nominasi Komite</p>	<p>5 kali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pengisian pejabat melalui <i>multi level entry</i> - Mengevaluasi penerapan kebijakan remunerasi pegawai menggunakan sistem <i>grading</i> yang berbasis kompetensi - Penempatan jabatan eksekutif di bawah Direksi serta percepatan pengisian kekosongan pejabat di unit kerja operasional untuk segera dipenuhi berdasarkan skala prioritas khususnya untuk kepentingan pengembangan struktur organisasi - Pembahasan perpanjangan masa kerja setingkat Pemimpin Divisi yang akan memasuki masa pensiun - Monitoring implementasi PBI mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pelaksanaan pekerjaan dan sumber daya manusia kepada pihak lain - Melakukan verifikasi data dan rekomendasi atas usulan Direksi dalam rangka penetapan dan promosi pejabat eksekutif
-----------------------	---	---------------	--



Pegawai	Sosialisasi peraturan dan kebijakan internal terbaru	Setiap ada peraturan dan kebijakan baru	Pengenalan peraturan internal baru
	Majalah Komunikasi Internal Bank Jatim	1 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> - Ulasan aktivitas dan kegiatan bank - Pembahasan strategi dan pencapaian kinerja Cabang
	Mekanisme <i>morning briefing, sharing moment</i>	Setiap hari	Pengoptimalan kinerja, kendala yang dihadapi pada saat bekerja dan pemecahannya
Pembuat Kebijakan	Sosialisasi terhadap adanya kebijakan yang baru dan perubahan kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> - Program Kerja bank Terkait Implementasi LSMK dilaksanakan pada tanggal 16 April 2013; - <i>Workshop</i> LSMK Integrasi Sistem Pelaporan Bank ke Bank Indonesia dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2013 mengenai Integrasi Sistem Pelaporan Bank ke Bank Indonesia - <i>Coaching clinic one on one</i> terkait dengan LSMK pada tanggal 2 Juli 2013, berdasarkan hasil diskusi dengan Bank Indonesia terkait p e n g e m b a n g a n sistem pelaporan LSMK dilaporkan dalam format XBRL (<i>Extensible Business Reporting Language</i>)



<p>Pemegang Saham</p>	<p>RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)</p>	<p>1 kali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda I Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2012 termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2012 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 - Agenda II Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2012 termasuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris - Agenda III Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 - Agenda IV Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Program MESOP yang telah disetujui RUPS Tahun 2012 - Agenda V Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana pada Tahun 2012 (G4-37)
<p>Pemegang Saham</p>	<p>RUPS Luar Biasa</p>	<p>1 kali</p>	<p>Pergantian Direktur Kepatuhan, Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah serta Komisaris Independen (G4-37)</p>



Pemegang Saham	Laporan Triwulan	Publikasi	4 kali	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Posisi Keuangan - Laporan Laba Rugi Komprehensif - Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum - Laporan Komitmen dan <i>Kontijensi</i> - Laporan Rasio Keuangan - Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Derivatif</i> - Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya - Laporan Arus Kas - Cadangan Penyisihan Kerugian - Pengurus bank - Pemegang Saham - Informasi Segment Unit Usaha Syariah - Neraca - Laba Rugi - Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya - Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Zis</i> - Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Qardh</i> - Distribusi Bagi Hasil - Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat (<i>Mudharabah Muqayyadah</i>) - Komitmen dan <i>Kontijensi</i>
	Rapat dengan Analis		4 kali	Pembahasan kinerja keuangan triwulan
	Rapat dengan Investor dan Analis (<i>One on One</i>)		12 kali	Pembahasan kinerja keuangan
	Kunjungan Investor		6 kali	Kunjungan investor ke kantor bank
	Pemaparan Publik		2 kali	Pemaparan kinerja bank kepada publik
	<i>Non Deal Roadshow</i>		1 kali	Promosi kinerja bank kepada calon investor potensial di luar negeri



Mitra Bisnis	Rapat koordinasi	setiap kali sebelum m e l a k s a n a k a n perjanjian	
	Perjanjian kerjasama	93 perjanjian yang telah ditandatangani	
Masyarakat	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan		Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan sosial

Dasar yang digunakan dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan adalah pengaruh yang diberikan oleh pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan (G4-25).

Kegiatan Hubungan dengan *Investor* selama Tahun 2013:

Pelaporan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dahulu Bapepam-LK	153
Pelaporan kepada BEI	153
Temu Analis	3
Temu Analis/ <i>Investor (One on One)</i>	12
Pertemuan dengan <i>Investor</i>	1
<i>Conferences Call</i>	4
Kunjungan <i>Investor</i>	5
Studi Banding	2
RUPS	2
Pemaparan Publik	2
<i>Non Deal Roadshow</i>	1
Pameran	2
Buletin IR	12
Sosialisasi pasar modal ke karyawan	2
Laporan transaksi saham (<i>website</i>)	12
Laporan 10 besar pemegang saham publik (<i>website</i>)	12
Laporan Pemegang Saham dan Struktur Kepemilikan (<i>website</i>)	12
Total Kegiatan	390

bankjatim

bersama kami, berkembang pasti



06

INDIKATOR TAMBAHAN
SEKTOR JASA KEUANGAN





Mengelola Risiko Sosial dan Lingkungan

Pengelolaan risiko yang efektif merupakan aspek paling mendasar bagi bank untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Salah satu sumber ancaman pada identifikasi risiko adalah lingkungan. Selain itu terdapat juga risiko yang berasal dari pemberian kredit kepada nasabah.

Bank menyadari bahwa pengelolaan risiko yang bersumber dari lingkungan dan sosial mungkin ditimbulkan dari kegiatan usaha para nasabah dan apabila pelaksanaannya tidak baik akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap usaha, reputasi dan lingkungan.

Pengelolaan risiko lingkungan dan sosial merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan proses kredit. Analis Kredit telah dibekali dengan pelatihan dan kebijakan yang menyatakan bahwa bank tidak memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan atau proyek yang memiliki potensi perusakan lingkungan dan/atau memiliki catatan *performa* lingkungan yang tidak baik. Selain itu, dalam proses analisa kredit, salah satu persyaratan utama adalah AMDAL untuk menilai risiko lingkungan dan sosial (FS4).

Analis Kredit bekerja sama dengan tim ahli independen untuk memastikan Kebijakan Lingkungan dan Sosial serta standar dan peraturan lain yang relevan, telah seluruhnya dipatuhi.

Bagi nasabah, bank mewajibkan mereka untuk mematuhi standar PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai salah satu persyaratan wajib dalam proses

pemberian pinjaman. Standar PROPER bertujuan meningkatkan pengelolaan lingkungan perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (FS1).

Penilaian Awal (FS2)

Pengajuan kredit ditinjau berdasarkan kebijakan kredit dan risiko bank yang mengacu kepada peraturan yang berlaku. Dalam proses ini, AMDAL dan PROPER merupakan kriteria penilaian terhadap nasabah.

Kredit yang terkait dengan lingkungan disyaratkan harus ada AMDAL atau perijinan terkait dampak lingkungan. Kriteria dampak lingkungan dimasukkan di dalam penilaian analisa kredit.

Analisa

Analisa dilakukan terhadap berkas pengajuan dokumen kredit dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Persetujuan

Semua pengajuan fasilitas kredit harus memperoleh persetujuan yang disesuaikan dengan peraturan mengenai kewenangan limit.

Pengawasan (FS3)

Apabila diperlukan, persyaratan terkait pengelolaan lingkungan dan sosial dapat dicantumkan pada perjanjian kredit. Dalam hal pembiayaan/investasi, bank bertanggung jawab memastikan kepatuhan klien terhadap kesepakatan perjanjian kredit serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (FS5).



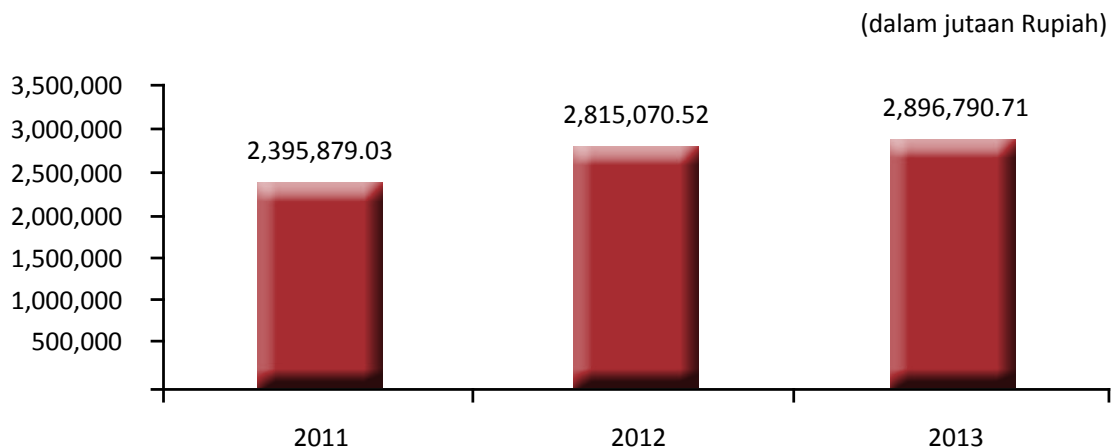
Penyaluran Kredit Produktif Segmen Agrobisnis dan Ritel

Seuai dengan salah satu misi bank yakni “Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta ikut mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah”, maka bank berfokus dalam memberikan kredit kepada segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sinergi antara bank dengan pelaku UMKM serta pemerintah memperkuat struktur bisnis bank khususnya pada sektor UMKM.

Penyaluran kredit ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan perekonomian Jawa Timur yang menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Posisi akhir Desember 2013, penyaluran kredit produktif di segmen agrobisnis dan ritel sebesar Rp2,896.79 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,90% dari tahun 2012.

Penyaluran Kredit Produktif di Segmen Agrobisnis dan Ritel selama 3 tahun terakhir



Bank berkomitmen untuk meningkatkan volume dalam penyaluran pinjaman bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (FS14).

Skim kredit untuk penyaluran pinjaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain (FS7):

1. Kredit Pundi Kencana

Kredit modal kerja dan/atau investasi di sektor produktif yang diberikan untuk

pembinaan usaha keluarga sejahtera mandiri yang cekatan berusaha dan menabung kepada pengusaha mikro dan kecil.

2. Kredit Mikro Laguna

Kredit yang diberikan kepada usaha mikro guna pengembangan usahanya sehingga dapat meningkat menjadi usaha kecil dan menengah secara langsung kepada perorangan atau kelompok usaha.



3. Kredit Usaha Rakyat

Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan *plafond* kredit sampai dengan Rp500 juta yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan.

4. Kredit Usaha Pembibitan Sapi

Kredit yang diberikan bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah. Yang dimaksud pelaku usaha pembibitan sapi adalah perusahaan peternakan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi.

5. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Energi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

6. Kredit Resi Gudang

Kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja yang sifatnya mendesak dan sumber pembayaran kembalinya jelas dan dapat dipastikan, baik dari hasil usaha maupun penjualan barang yang pemilikannya dibuktikan dengan resi gudang dan dijadikan jaminan di bank.

Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) diberikan kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi.

Kredit Resi Gudang Non Subsidi diberikan kepada perorangan dan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

7. Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah

Kredit yang diberikan bank kepada pengusaha mikro dan kecil secara kelompok/koperasi/badan usaha atau perorangan yang penggunaannya untuk meningkatkan hak atas tanah yang bukti kepemilikan tanahnya secara hukum tidak ada masalah/sengketa.

8. KUMKSU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)

Kredit yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan produksi dan/atau pengendalian polusi yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil.

9. Kredit *Linkage* Program BPR

Kredit yang diberikan bank kepada pengusaha mikro dan kecil melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik yang sudah menjadi anggota APEX maupun belum menjadi anggota APEX





bankjatim

bersama kami, berkembang pasti



07
PENUTUP



*Penghargaan
Tahun 2013*

NO	PENGHARGAAN	KETERANGAN
01		<p>PIAGAM PENGHARGAAN DARI <i>INDONESIAN ENVIRONMENTAL OBSERVER (MAPALHI)</i> ATAS DEDIKASI PELOPOR PRODUKSI BERSIH DAN CSR TANGGAL 7 MEI 2013</p>
02		<p>PIAGAM PENGHARGAAN DARI MARKPLUS INSIGHT DAN INFOBANK SEBAGAI <i>INDONESIA BANK LOYALTY CHAMPION 2013 CATEGORY SAVING ACCOUNT - REGIONAL DEVELOPMENT BANK</i> TANGGAL 17 APRIL 2013</p>



03



BANK JATIM DIANUGRAHI “*PLATINUM AWARD*” SEBAGAI BANK DENGAN KATEGORI SANGAT BAIK DALAM KINERJA KEUANGAN 10 TAHUN TERAKHIR (2003-2013) BUKU 2, BANK DENGAN MODAL RP 1 T – RP 5 T DARI INFOBANK TANGGAL 12 JULI 2013

04



PIAGAM PENGHARGAAN DARI TEMPO GROUP KEPADA BANK JATIM SEBAGAI *BEST PERFORMANCE BANKING 2013* KATEGORI BANK BUKU 2 BANK BPD TANGGAL 04 OKTOBER 2013

05



PIAGAM PENGHARGAAN DARI MARKPLUS INSIGHT KEPADA BANK JATIM SEBAGAI *THE BEST OF SURABAYA SERVICE EXCELLENCE AWARD 2013* KATEGORI BANK KONVENSIIONAL (ASET < 150T) TANGGAL 30 OKTOBER 2013



06



PIAGAM PENGHARGAAN DARI BEI, OJK, KPEI, DAN KSEI KEPADA BANK JATIM SEBAGAI *BEST EXHIBITOR* DALAM *INVESTOR SUMMIT & CAPITAL MARKET EXPO 2013* TANGGAL 31 OKTOBER 2013

07



PIAGAM PENGHARGAAN DARI MUSEUM REKOR DUNIA INDONESIA UNTUK BANK JATIM SEBAGAI PEMRAKARSA ATAU PENYELENGGARA JALAN SEHAT MENGENAKAN UDHENG (IKAT KEPALA) TERBANYAK TANGGAL 24 NOVEMBER 2013

08



PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA BANK JATIM DARI SERIKAT PERUSAHAAN PERS SEBAGAI "*THE 2ND INDONESIA PUBLIC RELATION AWARDS & SUMMIT*" TANGGAL 29 NOVEMBER 2013



09



PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI (AMB) 2013 DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP), KATEGORI MITRA USAHA TANGKAP TELADAN, SUB KATEGORI PERBANKAN TANGGAL 9 DESEMBER 2013.





Informasi Penting

NO.	JENIS INFORMASI	KETERANGAN
1	Nama Perusahaan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (G4-3) Jl. Basuki Rachmad 98-104 Surabaya 60271 PO BOX 917, Provinsi Jawa Timur Indonesia (G4-5) Tel: 62-31 5310090-99 Fax: 62-31 5460002
2	Jumlah dan Nama Negara (G4-6) Perusahaan Beroperasi	1 di Indonesia
3	Situs Perusahaan	www.bankjatim.co.id
4	Tanggal Pendirian Perusahaan	17 Agustus 1961
5	Pencatatan Saham/Listing	Bursa Efek Indonesia
6	Tanggal Pencatatan Saham	12 Juli 2012
7	Komposisi Pemegang Saham (per 31 Desember 2013) (G4-7)	- Pemerintah Daerah 80% - Karyawan 0,20% - Lain-Lain 19,80%
8	Jenis Usaha (G4-8)	Bank Umum
9	Kode Saham	BJTM
10	Akuntan Publik	Purwantono, Suherman & Surja Anggota Ernst & Young Global Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt.7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel : 62-21 52895000 Fax: 62-21 52894100
11	Biro Administrasi Efek	PT Datindo Entrycom Puri Datindo-Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220, Indonesia Tel : 62-21 5709009 Fax: 62-21 5709026
12	Call Center	14044
13	Pemegang Saham (G4-7)	Sampai dengan 31 Desember 2013, bank dimiliki oleh 6310 pemegang saham, yang terdiri dari 6240 pemegang saham domestik dan 70 pemegang saham asing



Umpan Balik Laporan Keberlanjutan

Umpan Balik Laporan Keberlanjutan 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (G4-31)

Area	Kriteria Penilaian			
	Buruk	Cukup	Bagus	Sangat Bagus
Aspek keterbukaan, kelengkapan dan manfaat informasi				
Tata letak dan tampilan				
Penggunaan dan tata bahasa				
Saran untuk Laporan Keberlanjutan tahun berikutnya :				

Profil Anda

Nama Lengkap :
 Umur dan jenis kelamin : tahun L/P (coret yang tidak perlu)
 Kelembagaan/Perusahaan :

Jenis Kelembagaan/Perusahaan : Pemerintah LSM Media
 Industri Masyarakat Lainnya

Pengembalian formulir dan hal-hal lain terkait dengan Laporan Keberlanjutan 2013 dapat disampaikan kepada *Corporate Secretary*

Bank Jatim Kantor Pusat Lt. 4
 Jl. Basuki Rachmad 98-104
 Surabaya 60271 PO BOX 917,
 Provinsi Jawa Timur Indonesia
 Email : humas@bankjatim.co.id
www.bankjatim.co.id



Referensi Silang Global (G4-32)

NO.	KATEGORI	HALAMAN
1	STRATEGI DAN ANALISIS	
G4-1	Pernyataan dari pengambil keputusan tertinggi di organisasi terkait dengan hubungan keberlanjutan kepada organisasi dan strateginya	3, 5
G4-2	Deskripsi dampak kunci, risiko dan kesempatan	23
2	PROFIL ORGANISASI	
G4-3	Nama Organisasi	138
G4-4	Merek Utama, produk dan/atau layanan	40
G4-5	Lokasi kantor pusat organisasi	29, 138
G4-6	Jumlah negara dimana organisasi beroperasi dan nama-nama negara dimana ada kaitannya dengan keberlanjutan atau terkait dengan operasi utama atau yang khusus	138
G4-7	Sifat kepemilikan dan badan hukum	9, 28, 138
G4-8	Pasar yang dilayani (termasuk rincian geografis, sektor yang dilayani, jenis pelanggan/penerima manfaat	29, 30, 138
G4-9	Ukuran organisasi yang melaporkan: Jumlah karyawan Jumlah Operasi Total kapitalisasi (dalam bentuk hutang dan ekuitas) Kuantitas produk dan jasa yang diberikan Penjualan Bersih	19, 28, 40, 57
G4-10	Jumlah karyawan kontrak berdasarkan jenis kelamin Jumlah karyawan tetap berdasarkan tipe dan jenis kelamin Jumlah angkatan kerja berdasarkan jabatan dan jenis kelamin Jumlah angkatan kerja berdasarkan wilayah kerja dan jenis kelamin Bagian substansial pada organisasi kerja yang dibentuk oleh pekerja yang secara hukum dikenal sebagai pekerja sendiri atau individu atau pengawas termasuk untuk pegawai kontrak Variasi yang signifikan pada jumlah pekerjaan	57, 58, 60



G4-11	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian kerja bersama tersebut	60
G4-12	Penjelasan mengenai aktivitas atau bagian aktivitas yang menyediakan produk dan layanan dari organisasi	31
G4-13	Perubahan signifikan yang terjadi pada masa pelaporan terkait ukuran, struktur atau kepemilikan	29
G4-14	Prinsip kehati-hatian yang dilakukan organisasi	80, 115, 117
G4-15	Daftar ekstern pengembangan ekonomi, lingkungan dan <i>social charter</i> atau inisiatif lain yang diikuti organisasi atau yang mendukung	NA
G4-16	<p>Daftar keanggotaan asosiasi (seperti asosiasi industri) dan advokasi nasional atau organisasi advokasi internasional yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memegang posisi atau badan pemerintahan - partisipasi dalam proyek atau komite - menyediakan pengumpulan dana rutin atas keanggotaan - melihat keanggotaan sebagai strategi 	11
3	ASPEK IDENTIFIKASI MATERI DAN BATASAN LAPORAN	
G4-17	Daftar entitas termasuk pernyataan keuangan konsolidasi atau dokumen semacam itu.	8
G4-18	Proses dalam menetapkan isi laporan dan batasan organisasi telah melaksanakan prinsip pelaporan dalam menetapkan isi laporan	7
G4-19	Mendata aspek materi yang teridentifikasi dalam proses menetapkan isi laporan	7
G4-20	<p>Untuk masing-masing aspek materi, batasan pada organisasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan adanya aspek materi pada organisasi - Apabila bukan aspek materi untuk semua entitas pada organisasi (seperti dideskripsikan pada G4-17), pilihlah satu dari dua pendekatan dan laporan keduanya <p>Daftar entitas atau kelompok entitas termasuk G4-17 yang mana bukan aspek material atau daftar entitas atau kelompok entitas termasuk dalam G4-17 untuk aspek yang material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan beberapa pembatasan spesifik terkait aspek batasan pada organisasi 	7
G4-21	<p>Untuk masing-masing aspek material, laporan aspek batasan di luar organisasi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan seandainya terdapat aspek material di luar organisasi - Jika terdapat aspek material di luar organisasi, melakukan identifikasi terhadap entitas, kelompok entitas atau elemen yang mana aspek bersifat material untuk identifikasi entitas - Laporan beberapa pembatasan spesifik terkait aspek batasan di luar organisasi 	8



G4-22	Efek dari beberapa uraian informasi yang disediakan pada laporan sebelumnya dan alasan untuk uraian tersebut	8
G4-23	Perubahan signifikan dari laporan sebelumnya pada ruang lingkup dan batasan	7
4	KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
G4-24	Daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi	122
G4-25	Dasar dari identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan	128
G4-26	Pendekatan organisasi kepada keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk frekuensi keterlibatan berdasarkan tipe kelompok pemangku kepentingan, dan indikasi keterlibatan apakah telah khusus dijalankan sebagai bagian dari proses persiapan laporan	122
G4-27	Topik dan perhatian utama yang dimunculkan melalui pelibatan pemangku kepentingan dan bagaimana organisasi merespon topik dan perhatian utama tersebut, termasuk melalui pelaporannya	122
5	PROFIL LAPORAN	
G4-28	Masa pelaporan dan informasi yang disajikan	7
G4-29	Tanggal laporan paling akhir	7
G4-30	Siklus pelaporan	7
G4-31	Poin kontak untuk pertanyaan terkait dengan laporan dan isinya	8, 139
G4-32	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pilihan 'In Accordance' mana yang dipilih organisasi - Laporan pilihan pada <i>GRI Content Index</i> yang dipilih (lihat tabel di bawah) - Laporan referensi dari laporan <i>assurance eksternal</i>, jika ada (GRI merekomendasikan penggunaan <i>assurance eksternal</i> tetapi bukan merupakan persyaratan pada 'In Accordance' dengan <i>Guidelines</i>) 	140
G4-33	Kebijakan dan praktek saat ini yang ditujukan untuk mencari <i>assurance eksternal</i> untuk laporan. Jika memasukkan laporan <i>assurance</i> untuk mendampingi laporan berkelanjutan, jelaskan ruang lingkup dan dasar dari setiap <i>assurance eksternal</i> yang tersedia. Jelaskan juga hubungan antara organisasi dan penyedia <i>assurance</i>	8
6	STRUKTUR TATA KELOLA DAN KOMPOSISI	
G4-34	Struktur tata kelola organisasi termasuk komite tertinggi. Identifikasi beberapa komite yang bertanggung jawab pada pembuatan keputusan dalam pengaruh ekonomi, lingkungan dan sosial	87, 93
G4-35	Proses untuk mendelegasikan kewenangan ekonomi, lingkungan dan topik sosial dari badan tata kelola tertinggi kepada eksekutif senior dan pegawai lainnya	94, 95, 96, 97



G4-36	Laporan apakah organisasi telah menunjuk sebuah posisi level eksekutif atau posisi-posisi yang bertanggung jawab pada topik ekonomi, lingkungan dan sosial dan apakah laporan pemegang tertinggi secara langsung kepada badan pengelola tertinggi	94, 95, 96, 97
G4-37	Laporan proses-proses untuk konsultasi di antara pemangku kepentingan dan badan pengelola tertinggi dalam ekonomi, lingkungan dan topik sosial. Jika konsultasi didelegasikan, jelaskan kepada siapa dan beberapa proses timbal balik kepada badan pengelola tertinggi	99, 126
G4-38	Laporan komposisi badan pengelola tertinggi dan komitennya yaitu: <ul style="list-style-type: none">- Eksekutif dan non eksekutif- Independen- Masa jabatan badan pengelola- Jumlah masing-masing posisi signifikan lainnya dan komitmen, dan sifat komitmen- Jenis kelamin- Keanggotaan- Kompetensi terkait dampak ekonomi, lingkungan dan sosial- Perwakilan pemangku kepentingan	93, 94, 97, 101, 105, 108
G4-39	Tunjukkan apakah Ketua dari badan pengelola tertinggi juga merangkap pejabat eksekutif (dan jika ternyata iya, maka tunjukkan fungsi mereka dalam pengelolaan organisasi dan alasan mengapa terjadi kondisi semacam itu	107
G4-40	Proses nominasi dan seleksi untuk badan pengelola tertinggi dan komitennya, dan kriteria yang digunakan untuk melakukan nominasi dan seleksi anggota-anggota badan tata kelola tertinggi, termasuk: <ul style="list-style-type: none">- Apakah dan bagaimana perbedaan dipertimbangkan- Apakah dan bagaimana independensi dipertimbangkan- Apakah dan bagaimana keahlian dan pengalaman terkait topik ekonomi, lingkungan dan sosial dipertimbangkan- Apakah dan bagaimana pemangku kepentingan (termasuk pemegang kepentingan) berbelit-belit	87
G4-41	Proses yang ada di dalam badan pengelola tertinggi untuk dalam menjamin terhindarnya konflik kepentingan	108
G4-42	Badan pengelola tertinggi dan peran eksekutif senior pada perkembangan, izin, dan pembaharuan tujuan organisasi, nilai atau pernyataan misi, strategi, kebijakan dan tujuan terkait dengan pengaruh ekonomi, lingkungan dan sosial	12, 20, 94, 114
G4-43	Laporan langkah/tindakan yang diambil untuk mengembangkan dan mempertinggi pengetahuan badan pengelola tertinggi tentang topik ekonomi, lingkungan dan sosial	109



G4-44	<p>Laporan proses evaluasi pada kinerja badan tata kelola tertinggi dengan penghargaan kepada dalam topik ekonomi, lingkungan dan sosial. Laporan tersebut apakah evaluasinya independen atau tidak, frekuensinya. Laporan apakah evaluasi tersebut adalah penilaian sendiri</p> <p>Laporan tindakan yang diambil dalam menanggapi evaluasi terhadap kinerja badan pengelola tertinggi termasuk topik ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai perubahan minimum dalam keanggotaan dan praktek organisasi.</p>	17, 32, 102, 106
G4-45	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan peran badan pengelola tertinggi dalam identifikasi dan manajemen pengaruh ekonomi, lingkungan dan sosial, risiko dan peluang termasuk peranan badan pengelola tertinggi dalam melaksanakan proses ketekunan - Laporan apabila konsultasi pemangku kepentingan digunakan untuk membantu badan pengelola tertinggi untuk identifikasi dan manajemen pengaruh, risiko dan peluang ekonomi, lingkungan dan sosial 	89, 91
G4-46	Laporan peranan badan pengelola tertinggi dalam mengkaji keefektifan dari proses manajemen risiko organisasi untuk topik ekonomi, lingkungan dan sosial	100, 114
G4-47	Laporan frekuensi dari badan pengelola tertinggi untuk mengkaji pengaruh, risiko dan peluang ekonomi, lingkungan dan sosial	100, 114
G4-48	Laporan komite tertinggi atau posisi yang secara formal mengkaji dan memberikan persetujuan terhadap laporan keberlanjutan organisasi dan menjamin aspek material tercakup	6
G4-49	Laporan proses untuk membicarakan perhatian kritis terhadap badan pengelola tertinggi	32, 87, 99, 100, 101
G4-50	Laporan proses pembicaraan mengenai perhatian kritis yang dibicarakan kepada badan pengelola tertinggi serta mekanisme yang ditunjukkan dan mengatasi hal tersebut	88, 89, 91, 92
G4-51	<p>Laporan kebijakan remunerasi untuk badan pengelola tertinggi dan eksekutif senior untuk tipe remunerasi di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran tetap dan pembayaran variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran berdasarkan kinerja • Pembayaran berdasarkan hak • Bonus • Saham yang dihitung dan tetap - Pembayaran insentif - Pembayaran pensiun - Kompensasi karena mencapai target kerja - Pengunduran diri, termasuk perbedaan di antara gambaran keuntungan dan perhitungan kontribusi untuk badan pengelola tertinggi, eksekutif senior dan pegawai lain <p>Laporan bagaimana kriteria kinerja pada kebijakan remunerasi terkait sasaran ekonomi, lingkungan dan sosial badan pengelola tertinggi dan eksekutif senior</p>	106, 107, 112
G4-52	<p>Laporan proses untuk penentuan remunerasi. Laporan apabila konsultan remunerasi dilibatkan dalam penentuan remunerasi dan apabila mereka independen dalam manajemen.</p> <p>Laporan beberapa proses hubungan lainnya yang mana konsultan remunerasi mempunyai dengan organisasi</p>	99, 106, 112



G4-53	Laporan bagaimana pandangan dari pemangku kepentingan dicari dan diperhitungkan mengenai remunerasi, termasuk hasil penilaian mengenai kebijakan dan usulan remunerasi, jika berlaku	99, 106
G4-54	Laporan rasio total kompensasi tahunan untuk individu dengan pembayaran tertinggi di masing-masing organisasi dari operasi signifikan terhadap total kompensasi rata-rata tahunan untuk semua pegawai (termasuk individu dengan pembayaran tertinggi) di negara yang sama	113
G4-55	Rasio persentase peningkatan total kompensasi tahunan untuk pembayaran individu tertinggi pada masing-masing negara pada operasi signifikan terhadap rata-rata persentase peningkatan kompensasi total tahunan untuk semua pegawai (termasuk pembayaran individu tertinggi) di negara yang sama	111
7 ETIKA DAN INTEGRITAS		
G4-56	Penggambaran nilai-nilai organisasi, prinsip, standar dan norma kelakuan seperti kode etik pegawai dan kode etik	82, 83, 84, 85
G4-57	Laporan mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh nasehat mengenai perilaku etis dan sah menurut hukum, dan hal-hal yang berkaitan dengan integritas organisasi	119
G4-58	Mekanisme pelaporan internal dan eksternal untuk mengenai perilaku tidak etis atau tidak sah menurut hukum, dan hal-hal yang berkaitan dengan integritas organisasi, seperti peningkatan seputar manajemen, mekanisme <i>whistleblowing</i>	118
8 PENGUNGKAPAN STANDAR SPESIFIK		
G4-DMA	<p>a. Laporan mengapa aspek bersifat material. Laporan pengaruh yang membuat aspek material</p> <p>b. Laporan bagaimana organisasi mengatur aspek material atau pengaruhnya</p> <p>c. Laporan evaluasi pendekatan manajemen, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme untuk mengevaluasi keefektifan dengan pendekatan manajemen • Hasil dari evaluasi dengan pendekatan manajemen • Penyesuaian terkait pendekatan manajemen 	7
INDIKATOR KINERJA EKONOMI		
G4-EC1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke penyedia modal dan pemerintah	18
G4-EC2	Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim	19
G4-EC3	Daftar cakupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan manfaat yang sudah ditetapkan	19
G4-EC4	Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah	18



G4-EC5	Parameter standar upah karyawan di jenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu	69
G4-EC6	Proporsi manajemen senior yang diambil dari komunitas setempat pada lokasi operasi yang signifikan	45
G4-EC7	Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan atau pun yang sifatnya <i>pro-bono</i>	50
G4-EC8	Penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung, termasuk luasan dampak	12
G4-EC9	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan	70
INDIKATOR KINERJA DI BIDANG LINGKUNGAN		
MATERIAL		
G4-EN1	Penggunaan bahan, diperinci berdasarkan berat atau volume	NA
G4-EN2	Persentase penggunaan bahan daur ulang	NA
ENERGI		
G4-EN3	Penggunaan energi di dalam organisasi	79
G4-EN4	Pemakaian energi di luar organisasi	NA
G4-EN5	Intensitas energi	NA
G4-EN6	Pengurangan konsumsi energi	79
G4-EN7	Persyaratan pengurangan energi untuk produk dan pelayanan	79
AIR		
G4-EN8	Total pengambilan air per sumber	NA
G4-EN9	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air	NA
G4-EN10	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang	NA
BIODIVERSITAS (KEANEKARAGAMAN HAYATI)		
G4-EN11	Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam atau yang berdekatan dengan daerah-daerah yang dilindungi atau yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi	80
G4-EN 12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang dilindungi dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang dilindungi	80
G4-EN13	Perlindungan dan pemulihan habitat	80
G4-EN 14	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi	NR



EMISI		
G4-EN15	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung	NA
G4-EN16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya tidak langsung	NA
G4-EN17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya	NA
G4-EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca	NA
G4-EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca	NA
G4-EN20	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon	NA
G4-EN21	Nox, Sox dan emisi udara signifikan lainnya	NA
EFLUEN DAN LIMBAH		
G4-EN22	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan	NA
G4-EN23	Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan	NR
G4-EN24	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan	NR
G4-EN25	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII dan persentase limbah yang diangkut secara internasional	NR
G4-EN26	Ukuran identitas, status yang diproteksi dan nilai biodiversitas air dan habitat yang dipengaruhi karena pengambilan air organisasi	NR
PRODUK DAN JASA		
G4-EN 27	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut	80
G4-EN28	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori	NR
KEPATUHAN		
G4-EN29	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan	80
PEMINDAHAN		
G4-EN30	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan dan tenaga kerja yang memindahkan	79
ASPEK MENYELURUH		
G4-EN31	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis	80
ASPEK PENILAIAN LINGKUNGAN PEMASOK		
G4-EN32	Persentase dari pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria lingkungan	NR
G4-EN33	Pengaruh lingkungan sebenarnya yang signifikan dan berpotensi negatif terhadap aktivitas yang menyediakan produk dan layanan dari organisasi	NR



ASPEK MEKANISME KELUHAN LINGKUNGAN		
G4-EN34	Jumlah dari keluhan mengenai dampak lingkungan yang ditujukan dan diselesaikan melalui mekanisme keluhan yang formal	80
ASPEK KETENAGAKERJAAN		
G4-LA1	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan baru kontrak dan karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin dan wilayah	60
G4-LA2	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut lokasi signifikan operasi	63
G4-LA3	Kembali bekerja setelah cuti melahirkan	70
ASPEK HUBUNGAN TENAGA KERJA/MANAJEMEN		
G4-LA4	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kerja bersama tersebut	60
ASPEK KESEHATAN DAN KEAMANAN PEKERJAAN		
G4-LA5	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam Panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasehat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan	60
G4-LA6	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang dan ketidakhadiran dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah dan jenis kelamin	62
G4-LA7	Pekerja dengan risiko kecelakaan atau risiko tinggi penyakit terkait dengan pekerjaan	62
G4-LA8	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan	60
ASPEK PELATIHAN DAN PENDIDIKAN		
G4-LA9	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan	66
G4-LA10	Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karir	59, 69
G4-LA11	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karir secara teratur berdasarkan jenis kelamin dan kategori karyawan	64, 65
ASPEK KEBERAGAMAN DAN PERSAMAAN KESEMPATAN		
G4-LA12	Komposisi badan pengelola dan pembagian karyawan per karyawan berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya yang relevan	58, 93, 94, 101, 105



ASPEK PERSAMAAN REMUNERASI UNTUK WANITA DAN PRIA		
G4-LA13	Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan oleh lokasi operasi yang signifikan	63
ASPEK PENILAIAN PEMASOK UNTUK PELATIHAN TENAGA KERJA		
G4-LA14	Persentase pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria pelatihan tenaga kerja	NA
G4-LA15	Tindakan signifikan dan pengaruh negatif yang potensial untuk praktek ketenagakerjaan pada aktivitas yang menyediakan produk dan layanan serta tindakan yang dilakukan	14
G4-LA16	Jumlah keluhan mengenai praktek perburuhan yang diajukan dialamatkan dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal	70
ASPEK INVESTASI		
G4-HR1	Jumlah dan persentase dari perjanjian investasi yang signifikan dan kontrak yang memuat klausa hak-hak asasi manusia	71
G4-HR2	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal kebijakan serta prosedur yang terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan	71
G4-HR3	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan	71
G4-HR4	Operasi serta pemasok yang mana diidentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan terhadap hak untuk bebas berasosiasi dan perjanjian kerja bersama serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut	NA
G4-HR5	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan timbulnya terjadi kasus pekerja anak	71
G4-HR6	Langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak	71
G4-HR7	Persentase dari tenaga keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan hak asasi manusia atau prosedur yang relevan untuk usaha	71
G4-HR8	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil	71
G4-HR9	Jumlah dan persentase operasi yang sudah mereview mengenai hak asasi manusia atau penilaian pengaruh	NA
G4-HR 10	Persentase pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria hak asasi manusia	NA
G4-HR11	Pengaruh sebenarnya dari hak asasi manusia yang signifikan dan berpotensi negatif terhadap aktivitas yang menyediakan produk dan layanan dari organisasi dan tindakan yang diambil	NA
G4-HR12	Jumlah keluhan mengenai akibat hak asasi manusia yang diisi, ditujukan dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal	71



ASPEK KEMASYARAKATAN		
G4-SO1	Persentase operasi dengan keterlibatan komunitas lokal, pengaruh penilaian dan pengembangan program	49
G4-SO2	Operasi dengan pengaruh komunitas lokal yang benar-benar signifikan dan berpotensi negatif	None
G4-SO3	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi	119
G4-SO4	Komunikasi dan pelatihan prosedur dan kebijakan anti korupsi	67, 68, 120
G4-SO5	Konfirmasi kejadian korupsi dan tindakan yang diambil	NA
ASPEK KEBIJAKAN PUBLIK		
G4-SO6	Jumlah nilai kontribusi politik oleh negara dan penerima	56
ASPEK ANTI PERSAINGAN		
G4-SO7	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan, <i>anti-trust</i> dan praktek monopoli serta sanksinya	56
ASPEK KEPATUHAN		
G4-SO8	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan dilakukan	56, 80
PENILAIAN PEMASOK UNTUK PENGARUH TERHADAP MASYARAKAT		
G4-SO9	Persentase pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria untuk pengaruh terhadap masyarakat	NA
G4-SO10	Tindakan signifikan dan pengaruh negatif yang potensial terhadap masyarakat pada aktivitas yang menyediakan produk dan layanan dari organisasi dan tindakan yang diambil	80
ASPEK MEKANISME PENGADUAN UNTUK DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT		
G4-SO11	Jumlah keluhan mengenai dampak kemasyarakatan yang diisi, ditujukan dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal	49
ASPEK TANGGUNG JAWAB PRODUK		
G4-PR1	Persentase produk signifikan dan kategori pelayanan yang mana berpengaruh terhadap kesehatan dan keamanan dinilai untuk perbaikan	31
G4-PR2	Jumlah kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela terutama dengan pengaruh kesehatan dan keamanan produk dan pelayanan sepanjang siklus hidup, berdasarkan tipe akibat	31



G4-PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut	72
G4-PR4	Jumlah ketidakpatuhan peraturan dan kode sukarela mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label per produk	56
G4-PR5	Hasil dari survei pengukuran kepuasan nasabah	76
ASPEK KOMUNIKASI PEMASARAN		
G4-PR6	Penjualan produk yang dilarang atau dalam sengketa	None
G4-PR7	Jumlah ketidakpatuhan peraturan dan kode sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi dan <i>sponsorship</i> menurut produknya	56
ASPEK KERAHASIAAN NASABAH		
G4-PR8	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran kekeluasaan pribadi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	75
G4-PR9	Nilai moneter dari denda ketidakpatuhan hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa	56
INDIKATOR TAMBAHAN: SEKTOR JASA KEUANGAN		
FS1	Kebijakan dengan komponen spesifik lingkungan dan sosial yang diimplementasikan pada lini bisnis	130
FS2	Prosedur untuk menilai dan menyaring risiko lingkungan dan sosial dalam lini bisnis	130
FS3	Proses untuk memantau pelaksanaan dan kepatuhan klien terhadap persyaratan lingkungan dan sosial yang termasuk dalam perjanjian atau transaksi	130
FS4	Proses untuk meningkatkan kompetensi staf dalam melaksanakan kebijakan lingkungan dan sosial beserta prosedur yang diterapkan pada lini bisnis	130
FS5	Interaksi dengan klien/asosiasi/mitra bisnis mengenai risiko lingkungan dan sosial beserta peluangnya	130
FS6	Persentase portofolio untuk lini bisnis berdasarkan wilayah, ukuran dan sektor	18
FS7	Nilai moneter produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan manfaat sosial yang spesifik untuk masing-masing lini bisnis berdasarkan tujuannya	131
FS8	Nilai moneter produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan manfaat lingkungan yang spesifik untuk masing-masing lini bisnis dibedakan berdasarkan tujuannya	NA
FS9	Cakupan dan frekuensi audit untuk menilai pelaksanaan kebijakan lingkungan dan sosial dan prosedur penilaian risiko	NA
FS10	Persentase dan jumlah perusahaan dalam portofolio institusi yang sudah berinteraksi dengan organisasi pelapor dalam isu-isu lingkungan atau sosial	NA
FS11	Persentase aset yang terdampak positif dan negatif oleh penyimpangan lingkungan atau sosial	NA



FS12	Kebijakan pemungutan suara diterapkan pada isu-isu lingkungan dan sosial pada kepemilikan saham di mana organisasi pelapor memegang hak untuk memilih atau memberi saran pada pemungutan suara	NA
FS13	Akses di daerah yang rendah populasi penduduknya atau yang kurang berkembang ekonominya berdasarkan jenis	29
FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi orang-orang yang kurang beruntung	131
FS15	Kebijakan untuk perancangan dan penjualan produk dan jasa keuangan yang adil	43
FS16	Inisiatif untuk meningkatkan pemahaman finansial berdasarkan jenis penerima	NA

NA: *Not Available*
NR: *Not Relevant*
AR: *Refer to Annual Report*
None: *No such cases indicated*



LAPORAN KEBERLANJUTAN
2013
MENDUKUNG KEPEDULIAN
TERHADAP LINGKUNGAN
DENGAN MEMBANGUN SINERGI
PERBANKAN DAN CSR YANG
BERKELANJUTAN